



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang disebabkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam ...

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;
 25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD

BAB VI Penutup

Pasal 2 ...

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2015 yang meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015; dan
- b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2015**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2015**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 23 TAHUN 2015
 TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
 PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
 TAHUN 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-10
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-15
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	2-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	2-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan wilayah.....	2-5
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	2-16
2.1.1.4 Aspek Demografis.....	2-17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-21
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	2-21
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	2-40
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	2-53
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	2-51
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	2-54
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	2-99
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-113
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	2-114
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/infrastruktur.....	2-115
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	2-122
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	2-125
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	2-131
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	2-153

2.3.1	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	2-153
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Program.....	2-172
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 Dan Perkiraan Tahun 2013.....	3-8
3.1.2	Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015	3-11
3.1.2.1	Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 Dan Tahun 2015.....	3-11
3.1.2.2	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 Dan Tahun 2015.....	3-14
3.2.	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-18
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	3-20
3.2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3-20
3.2.1.2	Dana Perimbangan.....	3-23
3.2.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	3-26
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	3-28
3.2.2.1	Belanja Tidak Langsung.....	3-28
3.2.2.2	Belanja Langsung.....	3-31
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-33
3.2.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	3-33
3.2.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	3-33
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	4-1
4.2.	Prioritas dan Pembangunan Daerah.....	4-13
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD.....	V-1
5.1	Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	5-1
5.2	Rencana Kerja SKPD	
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur	2 - 2
Tabel 2.2	Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur	2 - 4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Penggunaan Lahan [ha] Tahun 2001	2 - 5
Tabel 2.4	Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur	2 - 7
Tabel 2.5	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur	2 - 10
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 18
Tabel 2.7	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 19
Tabel 2.8	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 20
Tabel 2.9	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009-2013	2 - 20
Tabel 2.10	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 22
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013	2 - 24
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009- 2013 (Juta Rp)	2 - 27
Tabel 2.13	Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2009-2013	2 - 29
Tabel 2.14	PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013	2 - 31
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 34
Tabel 2.16	IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012	2 - 37
Tabel 2.17	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 39
Tabel 2.18	Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun ke atas Tahun 2009-2013	2 - 40
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2008-2012	2 - 41
Tabel 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 42
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013	2 - 43
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013	2 - 44

Tabel 2.23	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012	2 - 46
Tabel 2.24	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 47
Tabel 2.25	Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2013	2 - 48
Tabel 2.26	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2009-2013	2 - 51
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009-2013	2 - 52
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 54
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 55
Tabel 2.30	Rasio Guru Terhadap Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 56
Tabel 2.31	Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 58
Tabel 2.32	Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 60
Tabel 2.33	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 61
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kesehatan	2 - 64
Tabel 2.35	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 65
Tabel 2.36	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 66
Tabel 2.37	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 68
Tabel 2.38	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013	2 - 70
Tabel 2.39	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 76
Tabel 2.40	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 77
Tabel 2.41	Rasio Jaringan Inggasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 78
Tabel 2.42	Sarana Peribadatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013	2 - 78
Tabel 2.43	Capaian Indikator Urusan Perumahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 80
Tabel 2.44	Jumlah permukiman layak huni dan rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 81
Tabel 2.45	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 82
Tabel 2.46	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 83

Tabel 2.47	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 83
Tabel 2.48	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2013	2 - 84
Tabel 2.49	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 85
Tabel 2.50	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 85
Tabel 2.51	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 86
Tabel 2.52	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tahun 2010-2013	2 - 86
Tabel 2.53	Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 89
Tabel 2.54	Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 89
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2013	2 - 91
Tabel 2.56	Capaian Indikator Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	2 - 92
Tabel 2.57	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012	2 - 92
Tabel 2.58	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 93
Tabel 2.59	Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 94
Tabel 2.60	Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 94
Tabel 2.61	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 97
Tabel 2.62	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 98
Tabel 2.63	Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 98
Tabel 2.64	Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 99
Tabel 2.65	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 99
Tabel 2.66	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 100
Tabel 2.67	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 101
Tabel 2.68	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 101
Tabel 2.69	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 102
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 102
Tabel 2.71	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 103

Tabel 2.72	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 105
Tabel 2.73	Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 105
Tabel 2.74	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 106
Tabel 2.75	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 106
Tabel 2.76	Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 107
Tabel 2.77	Jumlah Surat Kabar, Radio, Televisi Lokal/Nasional di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 108
Tabel 2.78	Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 108
Tabel 2.79	Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 110
Tabel 2.80	Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 111
Tabel 2.81	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dengan Migas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 113
Tabel 2.82	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian tanpa Migas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 114
Tabel 2.83	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 116
Tabel 2.84	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 117
Tabel 2.85	Produksi Minyak Bumi dan Batu bara di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 118
Tabel 2.86	Kunjungan Wisata di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 120
Tabel 2.87	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013	2 - 120
Tabel 2.88	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 122
Tabel 2.89	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 123
Tabel 2.90	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif, Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 124
Tabel 2.91	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 125
Tabel 2.92	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 126
Tabel 2.93	Prakiraan Kebutuhan Bahan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 127
Tabel 2.94	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 128
Tabel 2.95	Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 129

Tabel 2.96	Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012	2 - 129
Tabel 2.97	Lama Proses Perijinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012	2 - 130
Tabel 2.98	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 133
Tabel 2.99	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD	2 - 127
Tabel 2.100	Keterpaduan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014	2 - 167
Tabel 2.101	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	2 - 172
Tabel 3.1	Target Capaian Indikator Tahun 2014	3 - 7
Tabel 3.2	Nilai Sektor dalam PDRB ADHB Tahun 2008 s.d 2012 (dalam juta rupiah)	3 - 9
Tabel 3.3	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kabupaten Kutai Timur	3 - 17
Tabel 3.4	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014	3 - 27
Tabel 3.5	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014	3 - 32
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014	3 - 34
Tabel 4.1	Penjelasan program Prioritas Pembangunan Daerah	4 - 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahap Penyusunan RKPD Kabupaten	1 - 5
Gambar 1.2	Bagan Alur Perencanaan	1 - 10
Gambar 2.1	Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur	2 - 6
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013	2 - 25
Gambar 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013	2 - 26
Gambar 2.4	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	2 - 28
Gambar 2.5	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	2 - 30
Gambar 2.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013	2 - 32
Gambar 2.7	Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013	2 - 33
Gambar 2.8	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012	2 - 36
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kecamatan Tahun 2012	2 - 38
Gambar 2.10	Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	2 - 38
Gambar 2.11	Perkembangan Capaian Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	2 - 63
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013	3 - 10



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan (Kuncoro, 2012). Perencanaan membutuhkan pemahaman posisi daerah saat ini dan arah yang hendak dituju. Arah yang dituju tercermin dalam visi dan misi, yang pencapaiannya membutuhkan rumusan strategi yang sesuai. Pengorganisasian diperlukan oleh daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya fisik maupun sumber daya konseptual agar perencanaan dapat dilaksanakan. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dalam pemanfaatan sumberdaya untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Pengendalian merupakan fungsi manajemen terakhir yang intinya untuk mengevaluasi dan melaporkan kinerja organisasi dan pembangunan daerahnya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat di daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Pendekatan politik dilakukan sebagai proses perencanaan karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh



setiap calon kepala daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*) yang antara lain melalui pelaksanaan musrenbang. Proses *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, provinsi dan nasional sedangkan proses *top down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk *dedicated program*.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

RKPD mengacu pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang mendasari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, substansi RKPD harus mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya. Dokumen RKPD menuntut adanya keberlanjutan (*sustainability*) dan percepatan (akselerasi) program dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan menjadi pendorong dalam percepatan pencapaian target tersebut, selain itu konsistensi antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan juga sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran



pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

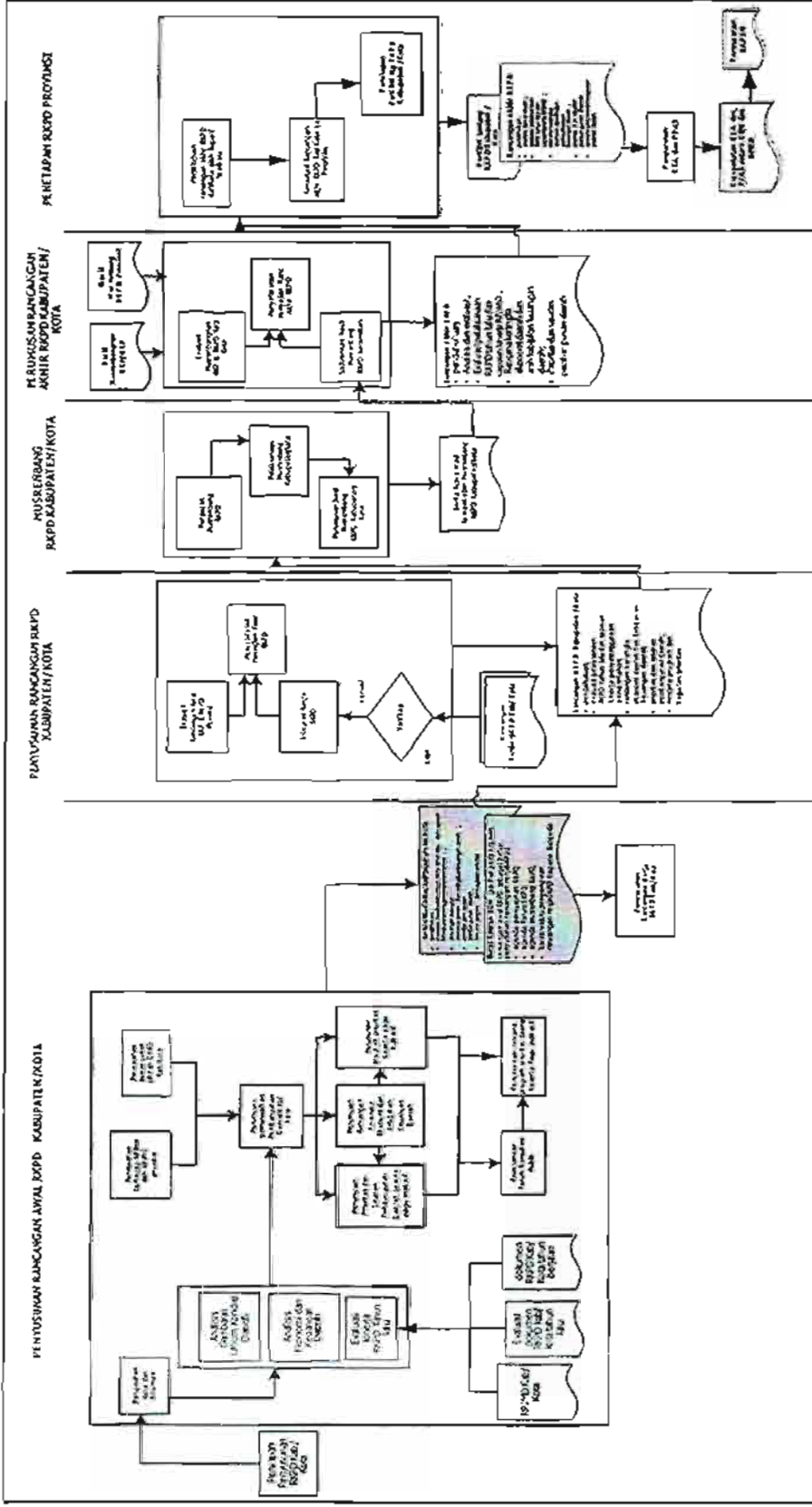
Namun demikian, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, beberapa keadaan yang dapat dilakukan perubahan RKPD, diantaranya meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sementara itu berdasarkan perkembangan pelaksanaan RKPD Tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan asumsi makro yang digunakan sebelumnya terutama pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga SPN tiga bulan, *lifting* minyak, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, juga terjadi koreksi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang diasumsikan lebih besar sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus melakukan perubahan RKPD Tahun 2014. Perubahan tersebut diharapkan tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta pencapaian optimal sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 adalah seperti pada bagan alir Gambar 1.1 berikut :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;



30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2014;
32. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 06);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
40. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014;



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

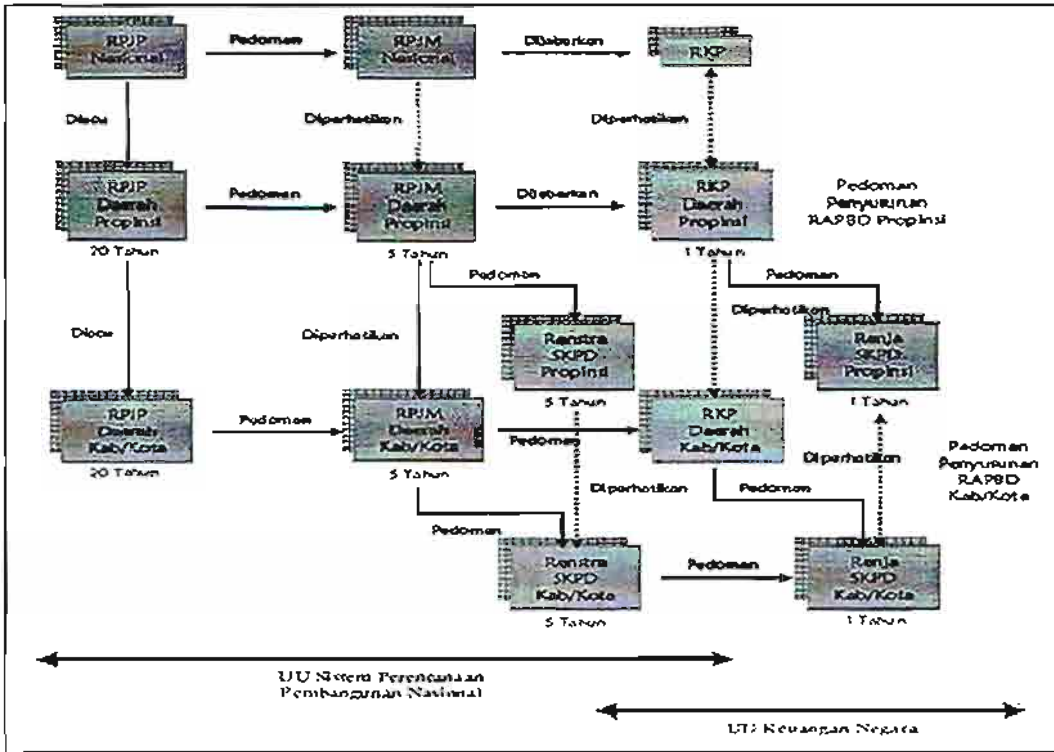
RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2
Bagan Alur Perencanaan



Sumber : UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004

1.4 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKPD] Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, yang mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD beserta perubahannya serta menjelaskan dasar pertimbangan perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.



1.3 Hubungan antar dokumen

Bagian ini menguraikan tentang hubungan antar dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya

1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Mendesripsikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Sebelumnya dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk:

- a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;
- b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2014 triwulan II,
- c) Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tahun 2014 triwulan II.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengemukakan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah meliputi :

- a) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah



- b) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

III. PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan :

- a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah
- b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah berdasarkan analisis.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat penjelasan perubahan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan;



- b) Uraian arah kebijakan berkaitan dengan perubahan target pendapatan daerah
- c) Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai target.

3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan serta sasaran pembangunan lima (5) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.



V. PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

VI. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD dan menyusun dokumen Perubahan Renja SKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sehingga Perubahan RKPD tahun 2014 ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:

1. Penyusunan Renja-SKPD, KUPA dan PPAS perubahan, serta RAPBDP Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014;
2. Menjaga konsistensi antara capaian perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kutai Timur dipergunakan sebagai acuan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Adapun gambaran umum ini terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi menjelaskan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek :

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km² atau sekitar 17 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Batas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebelah utara adalah Kabupaten Berau, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.





Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa	Luas	
			Km ²	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muara Ancalong	8	2.739,30	7,66
2	Busang	6	3.721,62	10,41
3	Long Mesangat	7	526,98	1,47
4	Muara Wahau	9	5.724,32	16,01
5	Telen	7	3.129,61	8,75
6	Kombeng	7	581,27	1,63
7	Muara Bengkal	7	1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	6	204,50	0,57
9	Sangatta Utara	4	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11	3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6	831,00	2,32
12	Rantau Pulung	8	1.660,85	4,65
13	Sangatta Selatan	4	143,82	0,40
14	Kallorang	7	3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	13	438,91	1,25
16	Sandaran	7	3.419,30	9,57
17	Kaubun	8	257,45	0,72
18	Karangan	7	3.064,36	8,57
Kabupaten Kutai Timur		135	35.747,50	100,00

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. 115°58'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

- a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) - Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde Ibu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde I) -





Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur.

- b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa daratan landai, bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai, dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah dataran mencapai 46 persen, pegunungan 30 persen, perbukitan 16 persen dan lainnya mencapai 8 persen.

Di antara variasi topografi yang dimaksud adalah:

- a) Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman, pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan prioritas untuk pengembangan lapangan terbang.
- b) Kawasan pegunungan kapur terdapat di daerah Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong, sesuai untuk pengembangan pertanian tanaman tertentu seperti jati dan karet.
- c) Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan terutama Sungai Sangatta, Sungai Marah dan Sungai Wahau. Sungai-sungai di daerah tersebut airnya dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai sumber air minum dan jalur transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Sedangkan danau terdapat di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang, berpotensi sebagai sumber mata air maupun pengembangan perikanan budidaya air tawar.
- d) Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten dengan ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai kemiringan lereng datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan.



4. Geologi

Geologi Kabupaten Kutai Timur sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar disepanjang pantai. Disamping itu terdapat kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwartier. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat.

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi. Semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur

No	Fisiografi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.84
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007

5. Klimatologi

Kutai Timur yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26°C, di mana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°-7°C. Jumlah curah hujan antara 2000-4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 sebanyak 38,6 persen merupakan kawasan hutan, yaitu hutan primer, hutan bekas tebangan, hutan



belukar, hutan kerangas, hutan di karst, hutan sejenis (HTI), hutan rawa, dan mangrove. Hutan primer banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kabupaten Kutai Timur juga terdapat 2 danau sebagai sumber mata air, yaitu Danau Ngayau (1900 ha) dan Danau Karang (750 ha) yang semuanya terdapat di Muara Bengkal.

Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 52,01 persen didominasi oleh belukar (32,2 persen) dan alang-alang (13,2 persen). Kawasan pertanian sebanyak 3,5 persen atau sekitar 106.056 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Sedangkan penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi sangat besar, baik untuk budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lahan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 0,22 persen atau sekitar 7.113 Ha.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Menurut Penggunaan Lahan (ha) Tahun 2001

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hutan Primer	443.035	13,40	13	Belukar	1.062.811	32,15
2	Hutan Bekas Tebangan	562.816	17,03	14	Padang rumput	28.819	0,87
3	Hutan Belukar	84.465	2,56	15	Alang-Alang	437.488	13,24
4	Hutan Kerangas	1.382	0,04	16	Perkebunan	29.083	0,88
5	Hutan di karst	106.338	3,22	17	Sawah	3.479	0,11
6	Hutan rawa	11.788	0,36	18	Tambak	78	0,00
7	Mangrove	34.318	1,04	19	Tambang Batubara	7.113	0,22
8	HTI	30.865	0,93	20	Pemukiman	18.902	0,57
9	Ladang	15.775	0,48	21	Danau	304	0,01
10	Lahan Basah	38.740	1,17	22	Sungai	14.506	0,44
11	Lahan Terbuka Karst	53.124	1,61	23	Awan	8.682	0,26
12	Lahan terbuka	9.019	0,27	24	Tidak ada data	302.538	9,15
					Jumlah	3.305.469	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

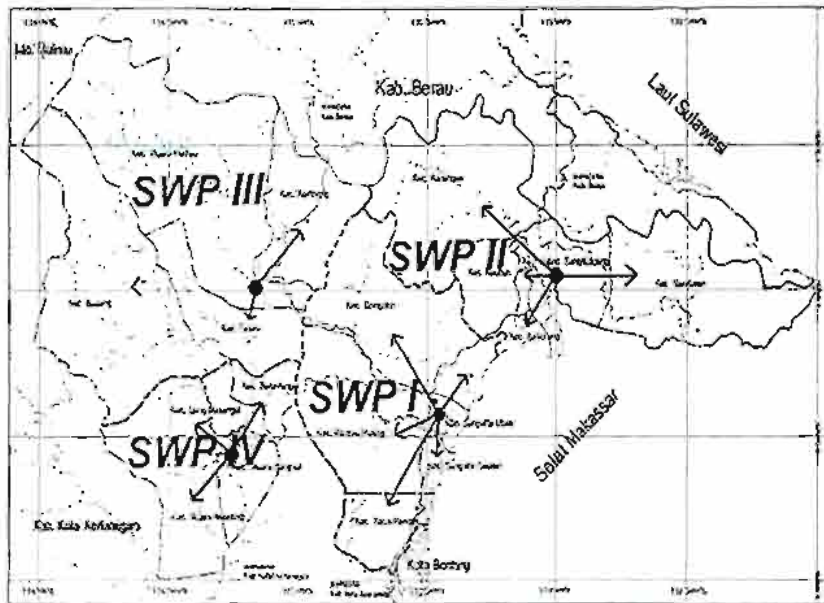
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan kawasan yang berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti



Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada Ibukota Kabupaten yaitu Sangatta karena posisi geografisnya berada di kawasan pesisir pantai yang memudahkan transaksi barang dan jasa lebih mudah. Tetapi seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karakteristik yang ada tersebut mengalami penggeseran sehingga menciptakan kluster-kluster perkembangan.

Gambar 2. 1
Sub Wilayah Pengembangan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

Pengembangan wilayah yang berpotensi di dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007, selain memperhatikan adanya penggeseran tersebut diatas, juga direncanakan terdapat 4 SWP (Subwilayah Pengembangan). Adapun SWP tersebut terdiri dari :

- a) SWP I : Berpusat di Sangatta Utara
- b) SWP II : Berpusat di Ibukota Kecamatan Sangkulirang
- c) SWP III : Berpusat di Ibukota Kecamatan Muara Wahau
- d) SWP IV: Berpusat di Muara Bengkal

Potensi masing-masing kawasan perencanaan di 18 kecamatan pemekaran Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut:



Tabel 2. 4
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Potensi
(1)	(2)	(3)
1	Muara Ancalong (Ibukota Kecamatan: Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir)	Terdapat potensi perkebunan sawit yang saat ini dikelola oleh PT. 3 S (Sawit Sukses Sejahtera).
2	Busang	Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi lading Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk, dan pisang Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
3	Long Mesangat (Ibukota Kecamatan: Sumber Sari)	Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani, dengan komoditi pada umumnya adalah: Padi, Kacang, Jagung. Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku yang berasal dari Indonesia Timur, Bali, Jawa, dan Sunda yang memiliki budaya bertani dan bercocok tanam. Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber sari (komoditi ikan Patin) di Sungai Long Mesangat bantuan merupakan salah satu program dari Pemkab.
4	Muara Wahau	Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat Memiliki hamparan dominan yang landai (0-7 persen) dengan ketinggian yang variatif antara 0-1000 dpi dan pegunungan kapur sehingga sangat kondusif untuk pengembangan perkebunan jati dan karet.
5	Telen	Memiliki perkebunan produktif dengan komoditas utama kelapa sawit dan coklat Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6	Kongbeng	Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit Sektor Peternakan dengan komoditas sapi
7	Muara Bengkal (Ibukota Kecamatan: Muara Bengkal Ulu)	Danau kecil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku dan sudah terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM-nya berasal dari danau tersebut.



No	Kecamatan	Potensi
(1)	(2)	(3)
		<p>Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Gunung putra daerah yang berasal dari Muara Bengkal).</p> <p>Potensi perikanan dengan jenis komoditi ikan: Pipija, Baong, Saleh, Patin, Jelawat, Ikan Betutu (orientasi ekspor berdasarkan survei wawancara).</p>
8	Batu Ampar (Ibukota Kecamatan: Batu Timbau)	Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9	Sanggatta Utara	<p>KPC (Kaltim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan 'kota mandiri' di Kawasan Perkotaan Sangatta merupakan potensi sebagai pusat pertumbuhan khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa.</p> <p>Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sangatta yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir.</p> <p>Sungai Sangatta sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.</p>
10	Bengalon	Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsung dan Keraitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat
11	Teluk Pandan (Ibukota Kecamatan: Teluk Pandan)	<p>Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi sawah, pisang, dan cokelat.</p> <p>Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kecamatan ini adalah: Jeruk Martadinata, Pinili, Nenas, Selak</p>
12	Rantau Pulung (Ibukota Kecamatan: Margo Mulyo)	<p>Memiliki potensi pertanian karena pada umumnya masyarakatnya adalah transmigran yang sudah terlatih untuk membudidayakan lahan pertaniannya (sawah tadah hujan dan buah-buahan)</p> <p>Memiliki kandungan tambang batu bara.</p>
13	Sanggatta Selatan (Ibukota Kecamatan: Sanggatta Selatan)	<p>Potensi sektor pertanian yaitu sayur-sayuran dan produksi ikan segar khususnya ikan bandeng dan ikan kakap. Potensi perikanan tersebut lebih banyak dibudidayakan di tambak dan sebagian lagi dari hasil tangkap nelayan laut.</p> <p>Memiliki potensi wisata lokal di Teluk Lombok maupun Teluk Kabak.</p> <p>Pusat pertumbuhan di kecamatan ini adalah pasar ikan yang terdapat di Desa Sanggatta Selatan.</p>



No	Kecamatan	Potensi
(1)	(2)	(3)
14	Kaliorang	<p>Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa, coklat, kopi dan pisang</p> <p>Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan tangkap</p> <p>Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur</p> <p>Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum serta pasir kuarsa</p>
15	Sangkulirang (Ibukota Kecamatan: Benua Baru Ulu)	<p>Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut dan <i>outlet</i> barang se-kabupaten.</p> <p>Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan komoditi adalah udang lobster.</p>
16	Sandaran	<p>Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama kelapa, pisang, coklat, lada</p> <p>Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayur</p> <p>Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik tambak, kolam ataupun perikanan tangkap</p>
17	Kaubun (Ibukota Kecamatan: Bumi Etam)	<p>Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.</p> <p>Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang terlatih untuk bertani dan berkebun sehingga memudahkan untuk pengembangan program pertanian.</p>
18	Karangan (Ibukota Kecamatan: Karang Dalam)	<p>Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari.</p> <p>Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan milik perusahaan.</p> <p>Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara yang saat ini sudah mulai eksplorasi, pariwisatanya yaitu wisata air panas (desa mukti lestari) dan goa kelelawar, walet serta terdapat air panas dan air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).</p>

Sumber:

- Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Kabupaten Kutim Tahun 2008
- Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007
- Data diolah



Potensi permintaan hasil produksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya hasil produksi yang berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui, diantaranya adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusiis dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya mencakup kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan, pariwisata, kawasan Honkam dan kawasan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kabupaten Kutai Timur terdapat di 11 wilayah kecamatan dengan peruntukan perkebunan yang dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten Kutai Timur

No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan	No	Lokasi (Kecamatan/ Desa)	Peruntukan		
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)		
1	Bengalon		8	Sandaran			
	- Tepian Langsat	Sawit		- Susuk Dalam	Sawit, Karet		
	- Keraitan	Sawit		- Susuk Luar	Sawit		
2	Kaliorang	- Sekerat	Kakao	- Manubar	Karet		
		- Selangkau	Kakao	- Marukangan	Karet		
		- Bumi Rapak	Sawit, Kakao	9	Sangatta		
		- Bumi Etau	Sawit		- Rantau Pulung	Kenaf	
3	Kaubun	- Cipta Graha	Sawit	10	Sangkulirang		
		- Bukit Makmur	Sawit		- Karang Dalam	Sawit, Cokelat, Pisang, Kakao	
		- Bukit Permata	Sawit, Kakao		- Tp.Terap	Sawit	
4	Kongbeng		- Pelawan	Sawit	11	Telen	
		- Miau Baru	Cokelat/Lada, Batak Pagar	- Kerayaan		Sawit, Cokelat, Pisang	
5	Muara Ancalong		- Mundu Dalam	Sawit	- Karang	Sawit	
		- Long Tesak	Sawit	- Saka	Sawit	- Baay	Sawit, Pisang
6	Muara Wahau		- Bt.Lepoq	Sawit, Kakao	- Pengadan	Sawit, Kakao	
		- Dabeq	Sawit	- Karangan	Sawit	- Mandu	Sawit
		- Nehes Liahbing	Sawit	- Baay	Sawit, Pisang	- Sempayau	Sawit
		- Benhes	Sawit	- Mandu	Sawit	- Keraitan	Sawit, Kakao
		- Diakay	Sawit	- Tanjung Manis	Sawit, Cokelat		



No	Lokasi [Kecamatan/ Desa]	Peruntukan	No	Lokasi [Kecamatan/ Desa]	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7	Muara Bengkal			- Jukayag	Sawit
	- Batu Ampar	Sawit		- Bt.Pedi	Sawit
8	Sandaran			- Muara Halog	Sawit
	- Susuk Dalam	Sawit, Karet		- Marhalog	Sawit
	- Susuk Luar	Sawit			
	- Marubar	Karet			
	- Marukangan	Karet			

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur 2007

1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan yang berada dalam pengawasan Unit Hamparan Pengkajian (UHP) dan hutan rakyat. Sedangkan Hutan Produksi menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dibedakan menjadi 3 macam kawasan yaitu: a) Kawasan hutan produksi terbatas, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, b) Kawasan hutan produksi tetap, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru, c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pengaturan kawasan hutan produksi menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 meliputi: a) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, b) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian di kawasan hutan produksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau koperasi yang telah memperoleh



ijin dapat menanam dengan sistem tumpang sari sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan tersebut.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2 bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kabupaten Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi polemik dimasa yang akan datang yang meliputi berkurangnya produktivitas padi yang mengakibatkan goyahnya swasembada pangan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal mungkin pencegahan, berkurangnya lahan sawah seminimal mungkin, terutama untuk lahan irigasi teknis dan lahan produktif lainnya.

3. Kawasan Perkebunan

Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan hasil produksi berupa cengkeh, coklat, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan karet.



Hasil produksi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri.

4. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Kutai Timur, baik peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti kambing, sapi, dll) mempunyai potensi yang dapat memenuhi permintaan yang cukup besar untuk kebutuhan lokal kabupaten maupun kebutuhan regional Provinsi Kalimantan Timur yang masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan diantaranya dengan adanya surplus produksi unggas dan daging besar.

5. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Kutai Timur mencakup perikanan darat, laut dan tambak, dengan orientasi pengembangan pada pemanfaatan potensi, dengan upaya sebagai berikut:

- a) Kawasan darat dikembangkan dengan pola budidaya berbentuk kolam, umpung, atau sistem karamba di kali dan waduk.
- b) Kawasan pesisir dikembangkan pola tambak air tawar, air payau dan air laut dengan tetap mempertimbangkan ekosistem pesisir.
- c) Kawasan laut dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut sebagai outlet dengan pengembangan dermaga ikan, TPI dan pasar ikan.

Perikanan laut, pesisir dan perikanan darat di kawasan Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi pasar yang cukup baik. Hasil produksi perikanan laut mempunyai peluang pasar ekspor sedangkan perikanan darat, meskipun ada peluang ekspor, namun lebih diarahkan peluang pasar dalam negeri.

6. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kutai Timur perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan kawasan lindung, karena potensi kawasan pertambangan yang ada sekarang ini dimasa yang akan datang kemungkinan berada di kawasan lindung. Oleh karena itu mempertahankan kawasan lindung adalah upaya pertama, sedangkan upaya selanjutnya adalah revitalisasi kawasan bekas pertambangan, agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal di masa mendatang.



7. Kawasan Industri

Pengembangan industri di Kabupaten Kutai Timur diorientasikan pada pembentukan kawasan industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan industri kecil dengan membuat sentra-sentra industri. Pengembangan kawasan industri meliputi industri kecil dan industri besar, dengan pertimbangan-pertimbangan potensi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk dikembangkan. Pengembangan industri yang dilakukan mencakup industri hulu maupun hilir yang meliputi industri manufaktur dan industri pendukung pertanian.

Kawasan industri direncanakan dengan pertimbangan memenuhi syarat zona industri, yaitu:

- a) terletak pada jalur arteri
- b) memenuhi syarat secara geografis
- c) tersedia sumber air baku cukup
- d) adanya sarana pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- e) tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah
- f) tidak menimbulkan dampak sosial negatif
- g) menanggapi lerah landai atau kemiringan lahan kurang dari 15 persen
- h) daya dukung lahan dan potensi air bawah tanah sedang sampai tinggi
- i) tidak rentan terhadap tanah, banjir dan bencana alam lainnya
- j) aksesibilitas mudah

Berdasarkan kriteria di atas, maka pengembangan kawasan perindustrian terutama industri menengah besar dapat dilakukan di lokasi kecamatan yang masuk dalam jalur transportasi nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur, yang sesuai peruntukannya di Kalimantan Malay. Sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat dikembangkan di Kota Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kaliorang, Muara Wahau dan Sangkulirang.

Kawasan industri dikembangkan di dekat kawasan pelabuhan yang sudah ada agar terjadi keterkaitan pembangunan sistem transportasi yang ada yaitu di Kota Sangatta dan Kota Sangkulirang, sehingga lahan yang diperlukan disediakan di sekitar kawasan perkotaan, sehingga bagian pengembangan kawasan perkotaan.

8. Kawasan Industri Perikanan

Sektor perikanan merupakan sektor yang potensial memberikan masukan bagi pendapatan daerah (PAD) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor yang terkait, seperti pertanian (bunga, buah,



perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata dapat meningkat.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur berupa daya tarik kesenian rakyat, bangunan peninggalan sejarah, produk kerajinan rakyat ataupun atraksi keseharian masyarakat lokal.

9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan atas perkembangannya mencakup kawasan perkotaan di sekitar muara sungai, kawasan perdesaan di sekitar sungai dan kawasan tepi perbatasan. Sedangkan perkembangan yang terjadi seiring perubahan perilaku transportasi yang digunakan, maka banyak berkembang kawasan permukiman di sekitar jaringan jalan terutama pada kawasan atau lokasi yang cukup strategis.

Tuntutan perkembangan kawasan yang semakin berkembang maka akan banyak tuntutan untuk pengembangan kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan, untuk itu perlu dipersiapkan kawasan-kawasan permukiman baru bagi pengembangan kawasan permukiman yang bisa berupa kawasan kota baru, desa baru dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi.

Kebutuhan khusus yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan permukiman sebagai berikut :

a) Pemenuhan kebutuhan perumahan

Kebutuhan perumahan yang cukup besar memerlukan upaya penyediaan lahan, sebagai kawasan permukiman. Untuk itu kawasan permukiman bisa dikembangkan di sekitar kawasan permukiman yang telah berkembang maupun kawasan baru yang memungkinkan. Permukiman ini bisa dikembangkan di beberapa lokasi terkait dengan kegiatan berikut; kawasan perkebunan sebagai plasma ketahanan hutan sebagai pengelola kehutanan, kawasan pertambangan dan industri baru di kawasan baru sebagai kota baru dan desa baru.

b) Penataan kawasan permukiman liar

Kawasan permukiman liar yang dimaksud adalah kawasan permukiman yang



berkembang di kawasan yang bukan atau dilarang untuk permukiman, seperti di Taman Nasional Kutai. Penataan yang dimaksud mencakup pemahaman dan pemberdayaan masyarakatnya baik dari sisi pengetahuan hukum positif, pemberdayaan sosial dan ekonomi serta penyiapan lokasi baru atau tetap di lokasi tersebut tetapi melakukan pembatasan-pembatasan dengan dilokalisasi terbatas.

c) Revitalisasi permukiman adat

Revitalisasi permukiman adat yang dilakukan merupakan upaya pelestarian bentuk dan fungsi perumahan yang ada, tetapi revitalisasi yang dilakukan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Revitalisasi permukiman adat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya serta kerajinan budaya lokal yang dimiliki oleh suku setempat.

d) Pengembangan permukiman perdesaan

Pengembangan permukiman perdesaan harus mendapat perhatian sebagai upaya dalam arus urbanisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi potensi pertanian sebagai pusat produksi pertanian, sehingga kawasan perdesaan akan semakin berkembang, jika kawasan pertanian juga diperhatikan sebagai yang tidak terpisahkan dengan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan lingkungannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di wilayah Kabupaten Kutai Timur, kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi yaitu rawan bencana banjir dan gerakan tanah.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang berada di antara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh di kawasan di tempat tersebut.

Kawasan rawan bencana banjir tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi kawasan rawan bencana. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian alam



yang lebih tinggi pada masa depan demi kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Peningkatan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
 - b) Gerakan penghijauan lingkungan
 - c) Meningkatkan pengelolaan dan penanggulangan banjir
- Kawasan rawan bencana terutama kawasan dengan kemiringan lahan yang landai terdapat di Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Anjalong.

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah [Longsor]

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaannya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan bencana longsor ini terdapat di wilayah yang mempunyai kemiringan > 40 persen terletak di sebagian wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Busang.

2.1.1.4 Kondisi Geografis

Aspek geografis memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan daerah, terutama bagi perencanaan kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan maupun program. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk dengan karakteristik cenderung sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang lalu dan yang akan berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam pembangunan infrastruktur yang busuk dan memadai serta lapangan pekerjaan yang akan datang.

Sebagai produsen penghasil batu bara dan dengan wilayah hutan yang sangat luas merupakan daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Pada sensus penduduk tahun 2000 terdapat 1,2 juta penduduk yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, terbukanya lapangan kerja yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha industri betubruk dan pengolahan kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. *Kedua*, Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 jumlah penduduk





Kutai Timur sebesar 245.817 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 554.751 jiwa tahun 2013. Persebaran penduduk tidak merata, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak 175.179 jiwa atau sebesar 31,58 persen dari total penduduk Kutai Timur. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Ampar yaitu sebanyak 21 jiwa atau sebesar 1,42% dari total penduduk Kutai Timur.

Table 2.6
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Catatan: Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No		Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penduduk	Jiwa	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
2	Pertumbuhan penduduk	Jiwa	32.055	121.430	63.618	96.858	27.028
3	Persebaran penduduk	(%)	15	49.40	17.32	22,47	5,12
4	Kepadatan penduduk	Jiwa/km ²	6,14	7,36	12,05	14,76	15,52

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

Sementara itu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio 121,58 pada tahun 2011 menjadi 123,81 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak daripada penduduk perempuan. Perubahan demografis ini dapat dimungkinkan karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak didominasi laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Timur berada diatas rata-rata rasio jenis kelamin Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 111. Persebaran penduduk Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2013 Kecamatan Sangatta Utara (31,58%), Kecamatan Bengalon (9,52%), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,96%).

Table 2.7
Perubahan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

Jenis Kelamin	2011		2012		2013	
	L	P	L	P	L	P
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Muslim	8.881	8.051	9.813	9.013	9.908	8.945
Buddha	3.891	3.266	4.286	3.722	4.200	3.666
Kristen	4.433	3.802	5.236	4.454	5.312	4.499
Muslim	14.187	11.519	17.333	14.559	20.397	16.739



Kecamatan	2011		2012		2013	
	L	P	L	P	L	P
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Teluk	5.780	4.589	7.143	5.671	7.228	5.752
Kor	10.329	8.891	15.205	12.880	16.980	14.354
Mi	8.027	8.556	11.609	10.353	11.273	9.929
Batu	3.724	3.172	4.834	3.627	4.251	3.600
Sangat	80.081	64.053	93.935	74.101	98.424	76.755
Beng	15.576	12.003	27.649	22.054	29.651	23.170
Teluk	12.364	10.001	15.864	12.515	16.963	13.328
Sang	21.417	17.113	23.318	19.635	24.370	19.794
Ri	5.420	4.561	5.441	5.573	6.742	5.832
Kalio	7.713	6.614	9.146	7.783	9.522	8.083
Kaub	5.518	4.541	7.696	6.282	8.749	7.126
Sang	1.591	10.773	13.999	11.755	14.588	12.271
Karu	9.116	6.117	10.306	7.467	10.953	7.956
Sang	5.043	4.111	6.518	5.292	7.522	5.919
Jua	239.392	194.173	290.887	226.836	303.945	245.484
Ju	430.865		527.723		554.751	
Res	112.56		122.82		123.94	
Per	17.32		22.47		5.12	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara hingga tahun 2013 sebesar 100 persen. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar di Kalimantan Pri. Soal (KPS). Persebaran penduduk di kecamatan lain relatif seragam, yang merupakan kecamatan kecamatan pemekaran dan aksesibilitas yang masih rendah.

Table 2.8

Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2008-2013

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2008	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
1	Sangatta Utara	5,15	3,82	3,53	3,59	3,40
2	Sangatta Selatan	1,77	1,81	1,62	1,52	1,42
3	Sangatta Tengah	1,97	2,31	2,11	1,84	1,77
4	Vahau	2,82	3,31	3,14	6,13	6,69
5	Sangatta Barat	2,76	3,23	2,41	2,43	2,34
6	Sangatta Timur	6,61	4,43	4,43	5,32	5,65
7	Sangatta Selatan	5,63	4,87	4,22	4,16	3,82
8	Sangatta Utara	23,44	1,33	1,60	1,51	1,42



No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Waya Utara	23,28	31,61	33,46	31,84	31,58
10	Waya Selatan	10,15	7,36	6,56	9,42	9,52
11	Waya Tengah	5,07	5,91	5,20	5,38	5,46
12	Waya Sela	7,71	9,32	9,08	8,25	7,96
13	Pulung	2,92	2,37	2,34	2,28	2,27
14	Waya	3,41	2,53	3,14	3,21	3,17
15	Waya	3,00	2,50	2,13	2,65	2,86
16	Waya	6,44	4,64	5,43	4,88	4,84
17	Waya	2,74	3,15	3,10	3,37	3,41
18	Waya	2,51	2,52	2,34	2,24	2,42
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2013 sebagai berikut. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok 5-29 jiwa sebanyak 212.220 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur 30-34 jiwa sebanyak 171.110 jiwa, dan selanjutnya kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 58.919 jiwa.

Tabel 2.9
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
pada Tahun 2009-2013

No	Kecamatan	2009	2010	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Waya Utara	47.225	51.713	47.225	28.220
2	Waya Selatan	10.150	7.360	6.560	51.713
3	Waya Tengah	5.070	5.910	5.200	52.675
4	Waya Sela	7.710	9.320	9.080	45.604
5	Pulung	2.920	2.370	2.340	51.850
6	Waya	3.410	2.530	3.140	48.372
7	Waya	3.000	2.500	2.130	43.454
8	Waya	6.440	4.640	5.430	59.003
9	Waya	2.740	3.150	3.100	61.964
10	Waya	2.510	2.520	2.340	66.460
11	Waya	15.220	17.110	17.110	53.704
12	Waya	7.110	7.110	5.550	65.875
13	Waya	10.579	10.579	10.579	44.019
14	Waya	6.721	10.342	6.721	53.648
15	Waya	4.023	5.758	4.023	34.554
16	Waya	2.334	3.388	1.970	43.079
	Jumlah	527.723	554.751	527.723	554.751

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Dari Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari *dependency ratio* sebagai daerah terbuka yang terkenal potensi sumber daya alam yang melimpah, menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama dari mereka yang datang untuk bekerja/mencari kerja ke daerah ini, dimana sebagian besar berusia antara 16-40 tahun pada usia produktif.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.10
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

No	Indikator	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laju pertumbuhan ekonomi	11,43	12,68*	11,43**
2	PDRE dasar harga berlaku (juta rupiah)	40.748.819,66	50.184.447,90*	60.931.993,14**
3	PDRE dasar harga konstan (juta rupiah)	35.197.68,22	21.319.122,21*	23.756.969,22**
4	Pendapatan perkapita per tahun (Rp)	211.371	177.866.088	
5	Jumlah penduduk miskin	27.431	24.295 ¹⁾	21.158 ²⁾
6	Persentase penduduk miskin	6,37	6,12 ¹⁾	5,87 ²⁾
7	IPM	74,30	75,21 ¹⁾	75,46 ²⁾
8	Daya beli riil (juta rupiah/bulan)	600,29	602,23	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur dan Tahun 2013
 *) sementara
 **) sangat sementara
 *) Provinsi Kalimantan Timur, 2013
 **) 2013

A. Perubahan PDRE

PDRE merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah. Disamping itu PDRE juga dapat pula menggariskan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam



serta faktor produksinya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan harga bruto, pada setiap sektor dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggalakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu. Nilai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat peserasan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perubahan kontribusi sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor yang mendukukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama sektor pertambangan migas (batubara) masih merupakan pendukung utama pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur ditandai dengan kontribusi migas yang mencapai 58,21% dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan MVA sebesar Rp 17.310.004,69 juta di tahun 2009 dan Rp 60.511,4 juta di tahun 2013. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas yaitu sebesar Rp 27.217,3447,9 juta, Rp 51.73.447,9 juta.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas yang meningkat dari Rp 17.310.004,69 juta di tahun 2009 menjadi Rp 60.511,4 juta di tahun 2013. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas yaitu sebesar Rp 27.217,3447,9 juta, Rp 51.73.447,9 juta.

PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara pada periode 2009-2013 sebesar Rp 4.101.439,75 juta, Rp 5.593.641,7 juta, Rp 12.000,63 juta dan Rp 7.522,2 juta.

La Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2009 hingga tahun 2013 dan 2013 dengan pertumbuhan 100% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013, tanpa migas dari tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013, tanpa migas dan batubara tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013. Dari beberapa indikator yang menunjukkan gambaran bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2009 hingga tahun 2013, tanpa migas dari tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013, tanpa migas dan batubara tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013. Sama halnya dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2009 hingga tahun 2013, tanpa migas dari tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013, tanpa migas dan batubara tahun 2009 menjadi 100% tahun 2013.



Tabel 2.11
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2009	17.110.004,09	15.530.201,70	26.430.182,46	15.313.671,39	4.101.439,75	2.017.156,18	5,60	5,57	4,15
2010	18.410.000,14	16.371.545,22	59.655.652,52	23.605.844,51	7.522.322,06	2.865.750,89	11,43	11,53	4,35

Sumber: BPS - Pusat Kependudukan, dan Kab. Kutai Timur Tahun 2014

* } Angka sementara

** } angka sangat sementara

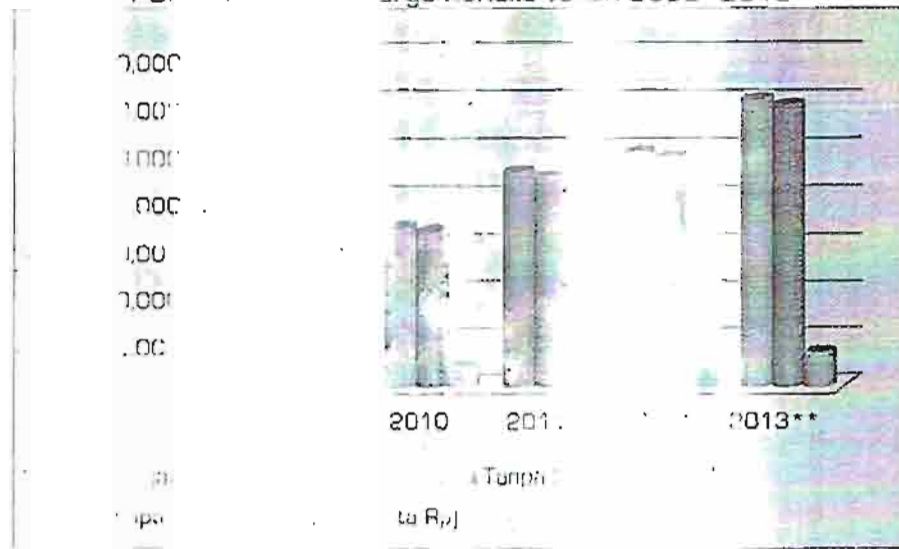


Faktor lain yang menunjukkan diunggulkan oleh pemerintah bukan sektor pertambangan

terutama sektor migas dan batubara juga relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur belum memperhatikan sektor lain yang berpotensi dikelola secara lebih maksimal lagi.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur belum memperhatikan sektor lain yang berpotensi dikelola secara lebih maksimal lagi.

Gambar 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berlaku Tahun 2009-2013



8. Sektor pertambangan dan perikanan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa subsektor migas dan perikanan

peranan sektor migas sangat dominan membentuk PORB terutama di sektor migas ini cukup luas struktural, dalam artian migas juga tidak dapat hasil tambang wasai. Pemerintah memerlukan kebijakan yang menguntungkan terhadap sektor migas

peranan sektor migas sangat dominan membentuk PORB terutama di sektor migas ini cukup luas struktural, dalam artian migas juga tidak dapat hasil tambang wasai. Pemerintah memerlukan kebijakan yang menguntungkan terhadap sektor migas

Bertujuan untuk meningkatkan ketergunaan kualitas kebijakan prioritas

kegiatan pembangunan di Kutai Timur akan terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam sektor migas

kegiatan pembangunan di Kutai Timur akan terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam sektor migas



Gambar 2.3
Angka Konstan Tahun 2010-2013



a) Struktur

Struktur ekonomi Kutai Timur dilihat dari kontribusi member sektor. Pertambangan dan energi dominan terakhir sumber

Sektor jasa dan Air Bersih, Usaha Perusahaan, dan lain-lain kurang dari 1%. Kutai Timur belum berkembang jasa. Sektor lain yang berkembang adalah Perdagangan, Industri dan Pertambangan, dan perkembangan perdagangan lain agar menjadi tambahan.

Pertambangan dan energi Tahun 2010-2013

terhadap pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan energi yang berkembang sektor pertambangan dan energi. Pertambangan dan energi relatif stabil dan masih dibawah

adalah sektor jasa dan Air Bersih, Usaha Perusahaan, dan lain-lain kurang dari 1%. Kutai Timur belum berkembang jasa. Sektor lain yang berkembang adalah Perdagangan, Industri dan Pertambangan, dan perkembangan perdagangan lain agar menjadi tambahan.

Pertambangan dan energi Tahun 2010-2013

Kutai Timur dapat dilihat dari kontribusi member sektor dalam pertumbuhan ekonomi setelah sektor jasa dan energi dengan masih berkembang beberapa tahun 2010-2013, sedangkan

adalah sektor jasa dan Air Bersih, Usaha Perusahaan, dan lain-lain kurang dari 1%. Kutai Timur belum berkembang jasa. Sektor lain yang berkembang adalah Perdagangan, Industri dan Pertambangan, dan perkembangan perdagangan lain agar menjadi tambahan.

Pertambangan dan energi Tahun 2010-2013



Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Juta Rp)

No	Sektor Usaha	2009		2010		2011		2012*		2013**	
		Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
6	Hotel dan Restoran	1.440.445	2,38	1.721.825,70	3,00	2.777.180,46	5,03	3.206.212,18	5,74	3.338.180,18	6,00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	542.403,45	1,58	557.656,41	1,75	651.635,18	1,92	543.551,09	1,69	1.007.665,64	1,85

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara



Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan harga barang impor meningkat. Hal ini berdampak pada lapangan usaha dalam negeri yang mengalami penurunan pertumbuhan. Pada periode 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mengalami penurunan dari 10,9% pada tahun 2009 menjadi 7,1% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh sektor pertanian yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi dari 12,5% pada tahun 2009 menjadi 10,5% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi padi yang menjadi komoditas unggulan di Kutai Timur. Selain itu, sektor pertambangan juga mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor pertambangan mengalami penurunan kontribusi dari 10,5% pada tahun 2009 menjadi 9,5% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi batubara yang menjadi komoditas unggulan di Kutai Timur. Sektor industri dan perdagangan juga mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor industri dan perdagangan mengalami penurunan kontribusi dari 10,5% pada tahun 2009 menjadi 9,5% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi barang industri yang menjadi komoditas unggulan di Kutai Timur. Sektor jasa juga mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor jasa mengalami penurunan kontribusi dari 10,5% pada tahun 2009 menjadi 9,5% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi jasa yang menjadi komoditas unggulan di Kutai Timur.



Sumber: BPS Kutai Timur, 2014



Sumber: BPS Kutai Timur, 2014

Tabel 2.4
Kontribusi Sektor
Pertanian dan
Pertambangan
terhadap PDRB
Kutai Timur
2009-2013

Tahun	Pertanian (%)	Pertambangan (%)
2009	12,5	10,5
2010	11,5	10,0
2011	11,0	9,5
2012	10,5	9,5
2013	10,5	9,5



b) Str

Timur
tamba
tidak
tamba
berper
dan bi
Timur
endilny

pa | us dan 'la
da | salah snc
la | am (SDA)
mn | komoditi
teke | el/ Peruh
jat | a baik pa
s | angan sok
ny | dan min
li | nya ak

rovinsi Kalimantan
migas dan bahan
omoditi SDA yang
di pada komoditi
upun harga, pasti
seperti pertanian
dari PDRB Kutai
at pengaruh dan

No	(1)
1	F
2	P
3	F
4	F
5	F
6	F
7	F
8	F
9	F

Sumber

pentar
tahun
perkel
perda
bangu
Perubli
Pemerit

Bel 2	as dari '0
20.1	15
20.7	20.7
21.1	21.1
21.2	21.2
21.3	21.3
21.4	21.4
21.5	21.5
21.6	21.6
21.7	21.7
21.8	21.8
21.9	21.9
21.10	21.10

Kuta
i dan
P
2,00
sda
am ak
700.1

3	Rata-rata
18	27,59
48	4,75
7	1,88
1	0,85
3,71	14,61
4,41	26,32
10	12,84
4,71	5,57
15	5,78
10	100,00

2009-2013, sektor
PDRB. Pada
dengan sektor
adalah sektor
n disusul sektor
pengangkutan dan

komuni
perusa

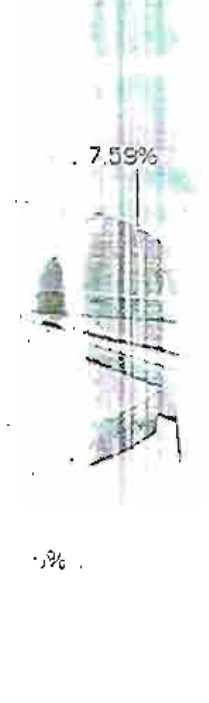
Rata-



B. ...
rata p
konse
jumlah
region
pajak
pendi
tahun
deng
tanpa
pendi
perhit

Pembal
Pemerin

... sektor
... gelian ser
... ambar 2.
... ur Harga
... Usaha



... r Taha
... r Region
... an Ber
... rik da
... ch dem
... ada te
... jurang
... hasil d
... un ya
... 009-20
... an pe
... an se
... an
... urisu
... kapita



... keuangan dan jasa
... an dibawah 7%.

... gas dan Batubara



... gambarkan rata-
... tertentu. Secara
... al PDRB dengan
... kan pendapatan
... penyusutan dan
... t dibagi dengan
... kat pada setiap
... kapita. Sejalan
... gas dan PDRB
... i perkapita dan
... dikeluarkan dari
... itu jauh dengan

pende
Kabup
secara
daerah
taraf

Tahun
(1)
2009
2010
2011
2012
2013

Sumber:

migas
kurun
yang
[khusu
hasil p
domin
diiring
dalam
sektor
tidak t
ekstr
demik
priorit
kebijak

Perubah
Pemerit

ajikan tu
basar. C
mpak a
tersebut

Tabel 2.1
Pendapa
Berlaku

Tahun	PDRB Perkapita
(4)	
2009	129.097
2010	131.025
2011	139.102
2012	175.972
2013	198.059

Kabupat

kan b
erkapit
rencem
pemb
on sek
ai Tim
dan
erbagai
akan
ktor
perkap
erbagai
lakukan
non t
untuk



an yang terjadi di
uruh masyarakat
n yang terjadi di
adanya perbaikan

Ta
3

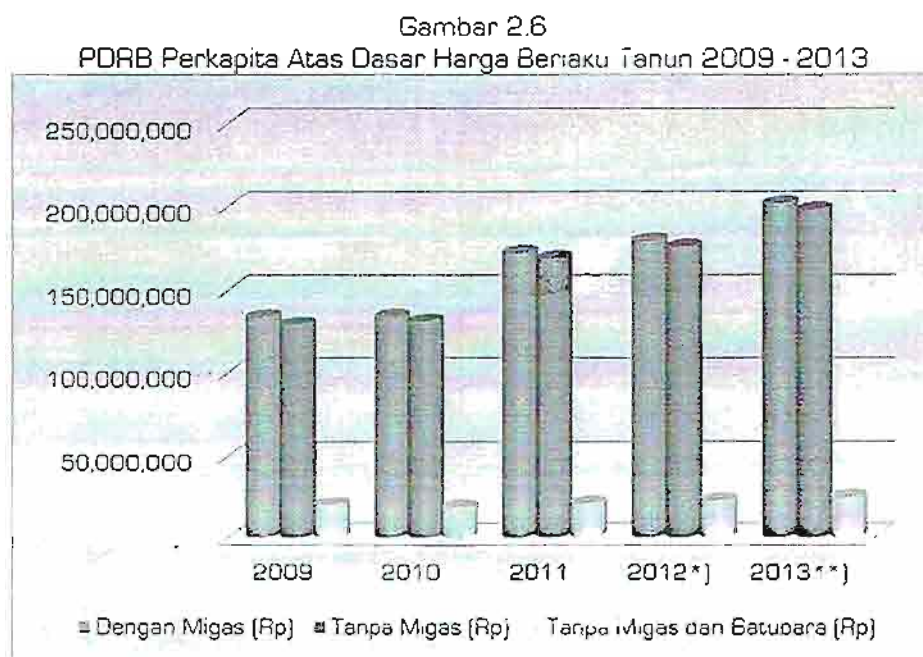
Migas dan Batubara	
ORB kapita	Pendapatan Regional Perkapita
(6)	(7)
133.311	14.774.195
155.674	13.861.970
116.039	15.516.327
17.298	16.977.011
00.106	n.a

erkapita (dengan
tubara) selama
sil pembangunan
n pertambangan
dengan kata lain,
an pada sektor
tersebut tidak
lainnya, maka
ada keberadaan
an sektor yang
perluasan usaha
il tambang yang
perhatian dan
hangan melalui
s pelaku atau



sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Karena hal ini seiring dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa mendatang.

Sementara itu pendapatan regional merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka akan dihasilkan suatu pendapatan regional perkapita. Namun demikian pendapatan regional tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk di daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi dan mengalir ke pihak luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tersebut.



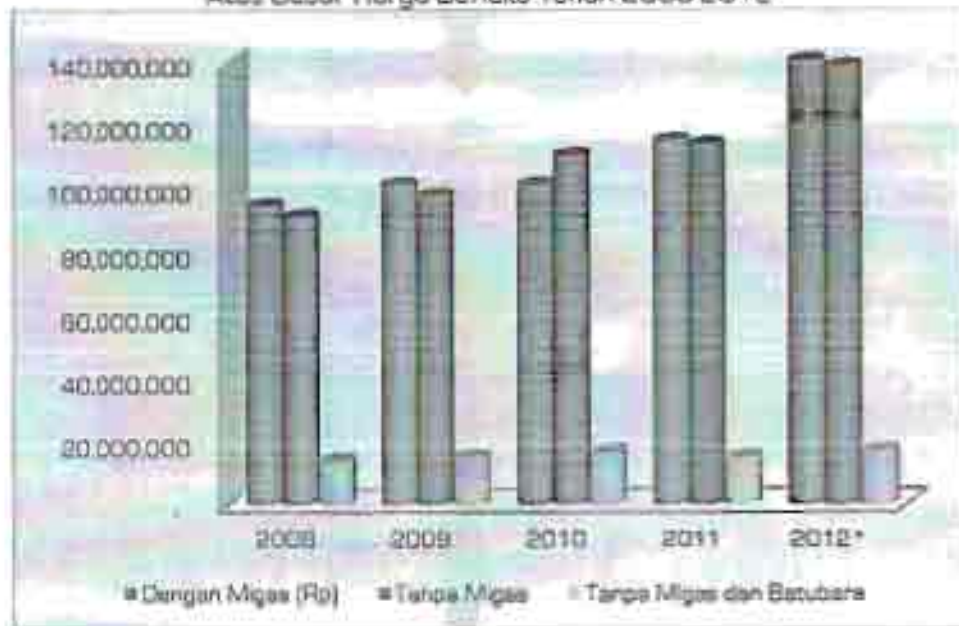
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

Pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2008-2012 tetap mengalami peningkatan cukup berarti. Tidak terjadi perbedaan antara pendapatan perkapita total dengan pendapatan regional tanpa migas. Namun bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita tanpa migas dan batubara nampak jelas kesenjangan. Kondisi ini dapat dimengerti karena kontribusi minyak dan batubara memberi sumbangan terhadap pendapatan regional hingga 87 %.





Gambar 2.7
Pendapatan Regional Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

C. Kemiskinan

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat penting manfaatnya untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Hal ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Indikator penentu dalam melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan salah satu suksesnya pembangunan milenium (MDGs) adalah pengentasan kemiskinan absolut.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan





pendekatan ini dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKID (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dan pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. Pengurangan penduduk miskin hingga separuh merupakan salah satu target MDGs pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi kemiskinan tingkat nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 12,49 persen berhasil menurunkan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 13,33 persen. Sementara itu angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur secara kuantitatif justru mengalami kenaikan dari 6,63 persen atau sebesar 247.900 jiwa pada tahun 2011 menjadi 6,68 persen atau sebesar 253.340 jiwa pada tahun 2012. Situasi ini menunjukkan terjadi pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang sangat tinggi dan tambahan masuknya penduduk migran yang ditengarai mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Tahun	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
	(Jiwa)	(%)
(1)	(2)	(3)
2009	22.890	9,31
2010	29.200	7,95
2011	27.432	6,37
2012	24.295*	6,12*
2013	21.158**	5,87**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

*) Data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

**) LKPD

Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun 2012 yakni masing-masing sebesar 6,37 persen dan 6,12 persen telah berada





pada posisi dibawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, yakni 6,68 persen pada tahun 2012, serta masih lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional tahun 2011 sebesar 12,49 persen. Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2009-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.15

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan estándar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Davies A and G. Gullivan-2006, A Panel Data Analysis of The Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics).

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah menggunakan indikator *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pembangunan manusia akan tercermin dalam kualitas sumberdaya manusia. Kondisi kualitas sumberdaya manusia sebagai obyek maupun subyek pembangunan tampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan untuk melihat tujuan atau produk akhir pembangunan, yakni [1] masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup, [2] pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang dan rata-rata tahun bersekolah, serta [3] standar kehidupan (*standard of living*) yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) untuk mencerminkan biaya hidup (Todaro, 2004: 68).

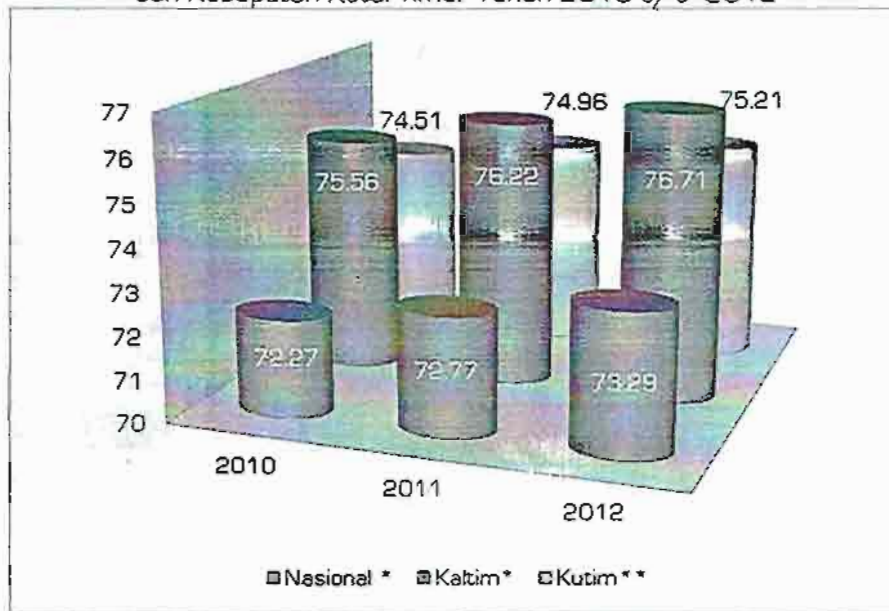
Berdasarkan perkembangan tingkat nasional, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan peringkat. Walaupun dalam laporan *United Nations Development Programme* (UNDP), tahun 2011 IPM Indonesia berada di peringkat 108, dan pada tahun 2011 turun ke peringkat 124 dari 187 negara. Capaian IPM pada tingkat nasional besar kemungkinannya berdampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini terlihat dari perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2009, angka IPM mencapai 75,11 dan tahun 2010 mencapai nilai 75,56, dan semua capaian diatas nilai target yang ditetapkan tahun 2010 sebesar 75,38. Kemudian tahun 2011 mencapai 76,22 melampaui rata-rata nasional sebesar





72.77. Pencapaian tersebut menempatkan Kalimantan Timur posisi peringkat 5 setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau dan DIY.

Gambar 2.8
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 s/d 2012



Sumber:

- *) Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)
- **) Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Sementara itu Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari 497 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, pada tahun 2010-2013 menempati posisi di atas rata-rata IPM nasional namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur (Lihat Gambar 2.8).

Pencapaian IPM Kabupaten Kutai Timur menurut kecamatan pada tahun 2008-2012 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan
Tahun 2008-2012

Kecamatan	Angka IPM				
	2008	2009	2010*	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muara Ancalong	70,45	70,67	59,86	60,98	63,14
Busang	68,92	69,14	56,92	57,21	60,11
Long Mesangat	70,63	70,84	63,13	64,14	66,18
Muara Wahau	71,46	71,67	64,33	64,80	67,31
Telen	68,87	69,07	60,09	60,37	61,53
Kongbeng	70,11	70,31	63,52	63,81	65,95



Kecamatan	Angka IPM				
	2008	2009	2010*	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muara Bengkal	70,21	70,41	62,00	62,29	64,17
Batu Ampar	69,06	69,27	62,55	62,94	63,14
Sanggata Utara	70,83	72,03	74,85	75,18	77,01
Bengalon	70,01	70,20	65,26	65,33	67,11
Teuk Pandan	70,33	70,55	64,99	65,35	67,42
Sanggata Selatan	71,58	71,78	70,66	70,98	73,53
Rantau Pulung	70,35	70,56	62,81	63,15	66,39
Sangkulirang	70,84	71,04	63,91	64,19	66,54
Kaliorang	70,80	71,00	62,39	61,68	64,31
Sandakan	68,06	68,27	60,42	60,72	61,83
Kaubun	70,67	70,87	65,23	65,58	67,45
Karangan	68,08	68,29	62,82	63,16	64,24
Kutai Timur	70,84	71,23	74,51	74,96	75,21

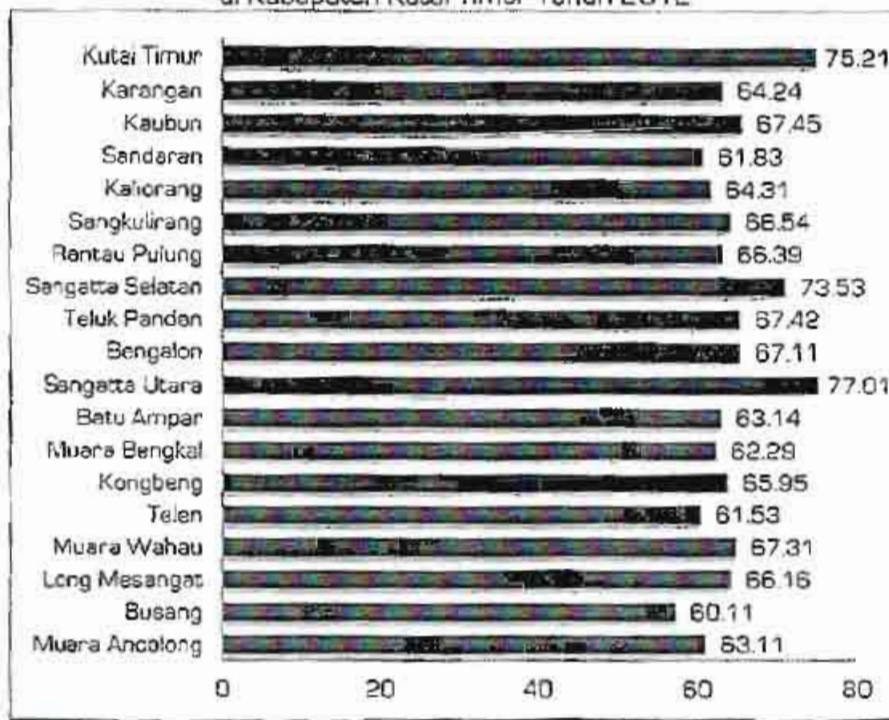
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
Keterangan: *) Hasil perhitungan lokal

Pada tahun 2011 Angka IPM kecamatan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi, antara 57,21 sampai 75,18. Nilai APM tertinggi pada Kecamatan Sanggata Utara sebesar 75,18 sebagai ibukota kabupaten hal ini wajar karena relatif memiliki fasilitas dan sarana/prasarana lebih lengkap dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Kemudian IPM tertinggi kedua diduduki oleh Kecamatan Sanggata Selatan dengan angka 70,98. Sementara 5 kecamatan dengan IPM terendah adalah Kecamatan Busang, Telen, Sandaran, Muara Ancalong dan Kaliorang yaitu berturut-turut sebesar 57,21, 60,37, 60,72, 60,98 dan 61,68. Gambar lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Kondisi geografis kecamatan ternyata baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan manusianya. Kecamatan-kecamatan yang paling sulit dijangkau di Kabupaten Kutai Timur, kesulitan sarana transportasi inilah yang diperkirakan menjadi sebab tertinggalnya dari kecamatan lain. Selain itu, secara umum kecamatan pemekaran cenderung memiliki angka IPM yang relatif lebih rendah. Sebagai kecamatan yang terhitung baru, kondisi ini tentu saja dapat dimaklumi. Karena kecamatan-kecamatan tersebut masih dalam proses pembangunan. Namun ini tentu saja menjadi tantangan dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mewujudkan kebijakan pembangunan yang merata di wilayahnya.

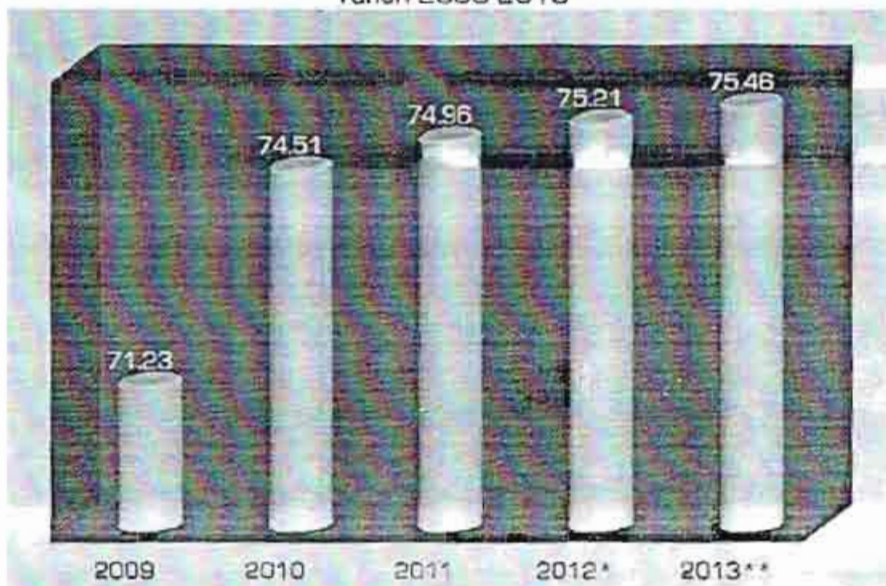


Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia menurut Kecamatan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 (diolah)

Gambar 2.10
Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013



Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur 2013
*) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013
**) Angka proyeksi sementara



Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, nilai IPM Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan secara berturut-turut adalah 71,23, 74,51, 74,96 75,21 dan 75,46. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 menjadi sebesar 74,51 dari sebelumnya tahun 2009 sebesar 71,23 atau naik 3,28 poin. Sementara pada tahun 2013 diproyeksi sebesar 75,46 terjadi peningkatan angka IPM dibanding dengan tahun 2012 sebesar 75,21, atau naik 0,25 poin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Tabel 2.17
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angka melek huruf (%)	96,44	97,76	97,99	98,23	98,28
2	Rata-rata lama sekolah	7,65	8,03	8,05	8,10	8,49
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	97,55	114,47	120,36	125,52	119,88
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	79,09	96,77	99,36	100,59	101,31
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%)	70,43	58,63	69,88	72,08	82,58
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	94,53	97,30	99,51	99,58	99,66
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	73,52	75,13	62,58	84,29	66,53
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%)	56,07	47,16	51,80	52,08	60,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai oleh peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lainnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah. Angka melek huruf telah





digunakan sebagai indikator tercapainya *Education for All* (EFA) dan MDG's dan berperan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Indikator angka melek huruf dapat digunakan untuk: 1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Kutai Timur tercatat penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf lainnya, atau dapat membaca huruf latin dan lainnya berjumlah sekitar 204.846 orang atau 96,44 persen dari total penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berjumlah 212.408 orang yang berarti jumlah buta huruf masih terdapat sekitar 7.562 orang atau 3,56 persen. Sementara itu angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 95,89 persen menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis adalah 96,44 persen. Kecamatan Sangatta Utara memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu 97,69 persen. Sedangkan Kecamatan Sandaran merupakan kecamatan dengan angka melek huruf terendah, yaitu 91,40 persen.

Tabel 2.18
Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun ke atas
Tahun 2009-2013

Kemampuan membaca/menulis	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buta huruf	3,56	2,24	2,01	1,77	1,72
Mampu	96,44	97,76	97,99	98,23	98,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengalami buta huruf telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni





pada tahun 2010 sebesar 2,24 persen menjadi 1,77 persen pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 dan 2012 telah berhasil menurunkan penduduk yang tidak mampu membaca/menulis huruf latin (angka buta huruf) di Kabupaten Kutai Timur yakni program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun yang merupakan upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan (akses) pendidikan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Kutai Timur khususnya.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2008-2012

Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Yang Dapat Membaca dan Menulis/Melek Huruf	Orang	141,068	168,009	171,348	179,721	189,080
	%	95,21	96,44	97,58	98,25	98,87
Dapat Membaca Huruf Latin	Orang	48,169	56,444	41,476	62,170	187,588
	%	32,51	32,40	23,62	33,26	98,09
Dapat Membaca Huruf Latin&Arab	Orang	88,146	103,289	116,439	105,35	122,126
	%	59,49	59,29	66,31	51,25	63,86
Buta Aksara/Huruf	Orang	7,097	6,202	4,249	3,201	2,161
	%	4,79	3,56	2,42	1,75	1,13
Jumlah	Orang	148,165	174,211	175,598	182,92	191,241
Persentase	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Jika dilihat pertumbuhannya, maka dari tahun 2010-2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang memiliki kemampuan baca-tulis huruf latin yakni sebesar 44,74 persen. Peningkatan juga terjadi pada penduduk yang bisa baca-tulis huruf lainnya yakni sebesar 65,16 persen. Sedangkan rata-rata akumulasi penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya dibanding jumlah seluruh penduduk menurun sebesar 44,80 persen dan yang tidak dapat membaca dan menulis meningkat sebesar 6,5 persen. Sehingga secara akumulatif pertumbuhan dari tahun 2010 hingga 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang melek huruf, yakni sebesar 6,72 persen, sedangkan yang tidak mampu membaca dan menulis (buta huruf) menurun sebesar 24,65 persen.





2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2009	7,65	0,53
2010	8,03	4,96
2011	8,05	0,25
2012	8,10	0,62
2013	8,49	4,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 adalah 8,10 tahun, kemudian pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,49 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menduduki kelas 2 SMP dan hal ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (lulus SD). Pada tahun 2011 Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di Kecamatan Sangatta Utara yaitu 8,30 tahun, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sandaran dan Karanganyar, yaitu 6,30 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya





anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2009-2013

No	APK	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	97,55	114,47	120,36	125,52	119,88
2	SLTP	79,09	96,77	99,36	100,59	101,31
3	SLTA	70,43	58,63	69,88	72,05	82,58

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2010-2013 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 capaian APK SD sebesar 114,47 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2011 yakni menjadi sebesar 120,36 persen jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 98 persen. Kemudian pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 125,52 persen, juga jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 98 persen. Capaian pada tahun 2011, APK SD Kabupaten Kutai Timur berada jauh di atas, jika dibandingkan dengan APK SD Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 104,83 persen.

Capaian APK SD di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 telah mencapai 125,52 persen dan tahun 2013 mencapai 119,88 persen. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun), yaitu selisih 25,52 persen pada tahun 2012. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 25,52 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun. Pencapaian nilai APK di Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2012 telah melebihi target yaitu sebesar minimal 98 persen, bahkan telah juga melampaui target APK Nasional sebesar 95 persen. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat distribusinya, karena pada tahun 2011 terdapat empat kecamatan yang masih di bawah 100 persen diantaranya Kecamatan Bengalon, Sangatta Selatan, Sangkulirang dan Kaubun. Oleh karena itu empat kecamatan tersebut harus mendapatkan prioritas utama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur khususnya SKPD yang bersangkutan.





Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat pada tahun 2011 sebesar 99,36 persen sudah lebih tinggi dari target RPJMD (minimal 97 persen). Demikian juga pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 104,67 persen lebih tinggi target yang telah ditetapkan RPJMD sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat SLTP lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat SLTP (13-15 tahun), yaitu selisih 4,67 persen pada tahun 2012. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 4,67 persen anak yang bersekolah di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 13-15 tahun.

Sedangkan APK SLTA sebesar 69,88 persen (tahun 2011) sudah lebih besar dari target RPJMD (62,63 persen). Demikian juga pada tahun 2012 capaian APK SLTA Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,05 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan RPJMD yakni sebesar 66,63 persen

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	APM	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	94,63	97,30	99,51	99,58	99,66
2	SLTP	73,52	75,13	62,58	84,29	97,01
3	SLTA	56,07	47,18	51,50	52,08	60,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



APM SD di Kabupaten Kutai Timur trendnya meningkat dari tahun 2010 hingga 2011 dan bahkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi (2,21 poin) sehingga sudah mencapai 99,51 persen kemudian pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan menjadi 99,58 persen. Ini berarti bahwa pada tahun 2011, ada 99-100 dari 100 anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan setingkat SD/MI. Angka ini sudah jauh melebihi APM Nasional yang hanya mencapai 94,37 persen, yang berarti dari 100 anak Indonesia usia 7-12 tahun, hanya 94 anak saja yang mengenyam pendidikan di tingkat SD/MI. Semakin tinggi APM SD berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kutai Timur pada tingkat pendidikan SD/MI.

Pada tahun 2011 APM SLTP sebesar 62,58 persen masih jauh dibawah target RPJMD tahun 2011 (75,5 persen). Demikian juga jika dibandingkan dengan capaian APM SLTP di Kalimantan Timur, APM SLTP Kutai Timur masih jauh di bawah, dimana pada tahun 2011 APM SLTP Provinsi Kalimantan Timur sebesar 72,40 persen. Namun demikian tahun 2012 APM SLTP meningkat tajam sebesar 84,29 persen di atas target RPJMD sebesar 76 persen.

Sedangkan APM SLTA pada tahun 2011 sudah tercapai 51,5 persen sudah diatas target RPJMD tahun 2011 (50,0 persen), namun jika dibandingkan dengan APM SLTA Kalimantan Timur sebesar 54,58 persen, maka persentase APM SLTA Kabupaten Kutai Timur masih berada dibawahnya. Sedangkan pada tahun 2012 meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi APM SLTA Kabupaten Kutai Timur menjadi sebesar 52,08 persen, masih berada dibawah target RPJMD yang telah ditetapkan yakni sebesar 55 persen.

5) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat sebagai gambaran ketrampilan yang mereka peroleh dan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.





Tabel 2.23
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Sekolah/ Tidak tamat SD	24,04	27,22	25,10	20,77	19,21
Sekolah Dasar	30,69	31,89	25,74	30,59	31,53
S L T P Umum Dan Kejuruan	16,99	19,63	18,08	17,91	17,64
S L T A	21,70	18,85	25,55	26,98	27,23
Perguruan Tinggi	4,98	2,62	5,53	3,74	4,39
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Pada kurun waktu lima tahun 2008-2012 tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 10 tahun keatas mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama perkembangan pada tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA, sedangkan tingkat pendidikan perguruan tinggi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap potensi-potensi yang dimiliki dengan melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur.

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belum sekolah/tidak tamat SD pada tahun 2010 sebesar 25,10 persen kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 19,21 persen. Persentase Tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2010 sebesar 25,74 persen naik menjadi sebesar 31,53 persen pada tahun 2012. Kemudian tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2010 persentase yang ditamatkan sebesar 18,08 persen menjadi sebesar 17,64 persen pada tahun 2012. Selanjutnya tingkat pendidikan SLTA juga mengalami peningkatan persentase angka yang ditamatkan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 yakni dari sebesar 25,55 persen menjadi 27,23 persen. Namun demikian perkembangan peningkatan angka yang ditamatkan dan pendidikan SD, SLTP dan SLTA tidak diikuti peningkatan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi, yang justru mengalami naik turun. Pada tahun 2010 persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebesar 5,53 persen, kemudian turun pada tahun 2011 sebesar 3,74 persen, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012 yakni dengan estimasi persentase yang ditamatkan sebesar 4,39 persen.





B. Kesehatan

Tabel 2.24
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

No	Indikator	2011	2012	2013
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) (%)	88,13	81,93	85,44
2	Angka Harapan Hidup (UHH)	68,72	68,79	68,86*

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

*) LKPJ

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Tabel 2.24 menunjukkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang cukup cepat dan sudah tergolong rendah dan sudah jauh dibawah AKB Nasional (34 per 1.000 kelahiran) maupun target MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran. Selain itu juga menunjukkan trend yang menurun dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada penurunan dari 19,74 per 1.000 kelahiran di tahun 2007 menjadi 10,32 per 1.000 kelahiran di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu usia produktif usia subur mengalami peningkatan dalam hal kesehatannya, memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan makanan bergizi dan memeriksakan kesehatannya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Hasil analisis SDKI 2007 menunjukkan pendidikan ibu mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat kematian bayi, dimana anak dari ibu dengan pendidikan rendah umumnya mempunyai tingkat kematian yang lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan tinggi.

Cukup rendahnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Timur dan adanya trend menurun dari tahun ke tahun, disinyalir turut memberikan kontribusi penting dalam peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur.



Hal tersebut terlihat pada trend angka harapan hidup yang mengalami peningkatan dari 68,08 tahun di tahun 2007 menjadi 68,79 tahun di tahun 2012. Hal ini menggambarkan semakin sehatnya masyarakat, disinyalir karena peningkatan pelayanan kesehatan dan adanya peningkatan pendapatan hingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup dan memelihara tingkat kesehatan. Hasil analisis SDKI 2007 menunjukkan status kekayaan rumahtangga, dimana anak yang tinggal dalam rumahtangga yang lebih kaya mempunyai mortalitas yang lebih rendah daripada yang tinggal dalam rumahtangga miskin.

Tabel 2.25
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Tahun 2009-2013

Variabel	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kelahiran Total / TFR	Per Wanita	2,15	2,2	2,85	1,44	1,90
Angka Kematian bayi/IMR	Per 1000 kelahiran hidup	19,69	11,83	11,39	18,07	14,27
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,43	68,61	68,72	68,79	68,86

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

2) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Berdasarkan laporan BPS (2011), meskipun terjadi kenaikan Angka Harapan Hidup, namun AHH Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 adalah 68,82 tahun, dimana kondisi ini masih lebih belum mencapai (lebih rendah 0,59 tahun) target RPJMD (tahun 2011) sebesar 69,41. Kondisi tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan target AHH Provinsi Kaltim (2011) yaitu 71,20 tahun maupun target AHH Indonesia (tahun 2011) yaitu 70,76 tahun.

Pada tahun 2007 angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur



sebesar 68,08 tahun, kemudian meningkat 68,25 tahun pada tahun 2008, dan selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 68,79 tahun, yang artinya bahwa setiap bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup selama 68 tahun. Kecamatan Muara Wahau adalah kecamatan dengan angka harapan hidup tertinggi di Kabupaten Kutai Timur yaitu 69,46 tahun. Sedangkan AHH terendah dimiliki oleh Kecamatan Busang sebesar 67,21.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur yang masih belum *on track* yaitu berada dibawah angka rata-rata nasional, maupun target RPJMD Kutai Timur, sehingga diperlukan perubahan strategi untuk percepatan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

C. Pertanian

Pemanfaatan lahan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersediaanya sumber daya alam yang melimpah berpotensi untuk investasi besar. Masuknya investasi akan memberikan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak. Penyerapan tenaga kerja sebagai dampak masuknya investasi akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjangnya



diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.26 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2009 tercatat sejumlah 174.211 jiwa meningkat 134,89 persen menjadi 409.204 jiwa pada tahun 2013. Jika dilihat dari jenis kelamin, tercatat peningkatan jumlah penduduk usia kerja laki-laki cenderung lebih besar jika dibandingkan penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja laki-laki meningkat sebesar 146,96 persen sedangkan yang perempuan 120,90 persen dari tahun 2009 ke tahun 2013. Data penduduk usia kerja tahun 2009-2013 dapat dilihat Tabel 2.26:



Tabel 2.26
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (Penduduk Usia Kerja)
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2009-2013

Kelompok Umur	2009			2010			2011			2012			2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-24	22.391	19.312	41.703	24.146	20.873	45.019	22.724	48.817	22.724	51.018	44.690	95.708	55.519	46.969	102.488
25-34	22.428	19.343	41.771	29.132	24.766	53.898	27.507	58.863	27.507	68.994	55.670	124.664	72.403	57.618	130.021
35-44	21.454	18.503	39.957	22.693	17.155	39.848	18.244	41.435	18.244	52.123	39.023	91.146	52.904	39.410	92.314
45-54	13.814	11.914	25.728	12.932	8.752	22.684	9.044	21.937	9.044	29.482	21.463	50.945	29.314	21.022	50.336
55-59	4.237	3.655	7.892	3.547	2.185	5.732	3.422	6.477	3.422	8.685	5.501	14.186	8.397	5.371	13.768
60+	9.213	7.947	17.160	5.914	4.063	9.977	1.912	5.593	1.912	12.854	7.959	20.813	12.466	7.811	20.277
Jumlah	93.540	80.671	174.211	98.364	78.794	177.158	82.853	182.922	265.775	223.156	174.306	397.462	231.003	178.201	409.204

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlah penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis agribisnis. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2013

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	30.307	51,56	39.349	51,77	45.669	55,03
Pertambangan	15.352	26,12	17.793	23,41	18.076	21,78
Listrik, Gas dan Air Bersih	215	0,37	425	0,59	425	0,54
Bangunan	1.135	1,93	1.787	2,35	1.789	2,16
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.060	5,21	3.685	4,85	3.992	4,81
Pengangkutan dan Komunikasi	1.177	2,00	2.584	4,40	2.903	3,50
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	290	0,49	369	0,49	369	0,45
Jasa-jasa	7.244	12,32	9.987	13,14	9.733	11,73
Total	58.780	100,00	76.006	100,00	82.983	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja pada berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2013 adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 55,03 persen atau sejumlah 45.669 jiwa dan diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 21,78 persen atau sebesar 18.076 jiwa, kemudian disusul sektor jasa-jasa dengan persentase 11,73 persen. Sedangkan pada sektor-sektor lain yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih dibawah 5 persen.



2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kutai Timur sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan gerak jalan santai.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.



A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, *skill*, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Adapun gambaran umum urusan pendidikan secara terperinci dilihat dari capaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2009-2013

No	APS	2009	2010	2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SD	98,67	99,13	99,14	99,25	99,65
2	SLTP	96,16	94,97	95,13	94,82	97,01
3	SLTA	62,27	62,56	63,45	63,76	60,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

APS SD dari tahun 2010 hingga tahun 2013 yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2011 sebesar 0,01 poin, yakni sebesar 99,13 persen pada tahun 2010 menjadi 99,14 persen. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat 0,11 poin dari 99,14 persen tahun 2011 menjadi 99,25 persen pada tahun 2012. Namun demikian jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah melampaui target yaitu minimal 99,0 persen.

Pada tahun 2010 sebesar 94,97 persen, naik pada tahun 2011 menjadi sebesar 95,13 persen, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 94,82 persen. Trend APS SLTP Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga





tahun 2013 masih terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan, meskipun pada tahun 2011 hingga 2013 sudah *on track* dengan RPJMD.

Trend capaian APS SLTA Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2012 masih sedikit dibawah target atau belum *on track* dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) indikatornya ditunjukkan oleh seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.29
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	-	59,29	58,71	59,75	59,55
SLTP	-	61,15	61,15	58,79	56,29
SLTA	-	33,20	34,07	31,74	39,60

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada Tabel 2.29 di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD selama kurun waktu 2010-2013 cenderung tetap, dengan capaian yang jauh melebihi target RPJMD.

Demikian juga capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap usia penduduk sekolah SLTP telah jauh melampaui target meskipun selama 3 tahun terakhir (tahun 2011-2013) mengalami penurunan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.29.

Berbeda dengan rasio SD dan SLTP yang melampaui target RPJMD, maka sebaliknya dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah



SLTA masih berada dibawah target meskipun capaiannya cenderung mengalami kenaikan. Secara umum capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk baik tingkat SD dan SMP telah melampaui target.

C. Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.30
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Rasio Guru Terhadap Murid	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	-	14,44	14,66	15,11	14,98
SLTP	-	12,33	12,45	12,62	13,09
SLTA	-	11,92	11,62	12,62	11,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

D. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia (6) enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- a) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat



perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.

- b) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UUD Sisdiknas Nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini

- a) *Infant* (0-1 tahun)
- b) *Toddler* (2-3 tahun)
- c) *Preschool/ Kindergarten children* (3-6 tahun)
- d) *Early Primary School* (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)

Berdasarkan perkembangan capaian indikator PAUD selama kurun waktu 2010-2012 mengalami penurunan, dan bahkan masih jauh dari target, baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012, hal tersebut disinyalir karena pembinaan dan sosialisasi PAUD belum dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, selain itu kepedulian pemangku kepentingan dan komponen masyarakat masih terbatas dalam mengembangkan layanan PAUD.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA dan sederajat, jalur non formal berbentuk KB, TPA dan SPS serta jalur informal. Kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan PAUD. Dalam rangka memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia maka perlu dilaksanakan apresiasi lembaga PAUD berprestasi.

E. Angka Putus Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang



pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perbandingan angka putus sekolah tingkat SD antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 terdapat enam (6) kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Nunukan paling tinggi angka putus sekolahnya yaitu sebesar 5,2 persen. Sedangkan di Kabupaten Kutai Timur sendiri, angka putus sekolah pada tahun 2009 sebesar 1,4 persen yakni masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menekan angka putus sekolah masih perlu ditingkatkan.

Namun demikian, berdasarkan perkembangan trend angka putus sekolah selama kurun waktu 2010-2013 terus mengalami penurunan meskipun masih fluktuatif tetapi tidak signifikan. Secara umum capaian angka putus sekolah baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.31
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

AptS	Tahun				
	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
SD	-	0,15	0,25	0,28	0,10
SLTP	-	0,27	0,43	0,67	0,19
SLTA	-	0,27	0,64	0,67	0,20

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Angka Putus Sekolah SD terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,25 persen kemudian jumlahnya naik pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,28 persen, Sedangkan pada tahun 2013 turun kembali sebesar 0,1 persen. Capaian angka putus sekolah sudah mengalami penurunan namun demikian penurunan jumlah angka putus sekolah SD capaiannya masih belum memenuhi target target RPJMD. Meskipun capaian pada tahun 2013 selisih sedikit jika dibandingkan dengan targetnya.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*). Berbagai penelitian mengemukakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi



cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini (*early childhood education and development-ECED*) telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan baik.

Selanjutnya perkembangan capaian angka putus sekolah tingkat SLTP menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 justru mengalami peningkatan persentase, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan bahkan telah melampaui target RPJMD.

Capaian Angka Putus Sekolah SLTP, meskipun terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,43 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen, namun demikian capaiannya jika dibandingkan dengan target RPJMD juga masih belum tercapai, dimana target RPJMD tahun 2011 sebesar 0,25 persen dan tahun 2012 sebesar 0,23 persen. Namun pada tahun 2013 jumlah angka putus sekolah SLTP telah menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,19 persen atau melampaui target RPJMD sebesar 0,21 persen.

Sedangkan, Angka Putus Sekolah SLTA juga terbilang masih rendah yakni pada tahun 2011 sebesar 0,64 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen, namun demikian capaiannya dibandingkan dengan target RPJMD juga masih belum tercapai. Sedangkan tahun 2013 menurun kembali jumlah angka putus sekolah SLTA sebesar 0,2 persen sedikit melampaui target RPJMD sebesar 0,21.

Beberapa penyebab adanya angka putus sekolah disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geografis tempat tinggal yang biasanya jauh dari lokasi sekolah sehingga menyebabkan siswa tersebut merasa berat untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua menjadi salah satu penyebabnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan tersebut serta mewujudkan capaian target angka putus sekolah, maka program wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu dan yang telah menjadi program andalan Kabupaten Kutai Timur masih terus dilaksanakan diantaranya dengan melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur akan pentingnya pendidikan dan juga pemberian bantuan pendidikan berupa Biaya Operasional Sekolah, dimana



Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

F. Angka Kelulusan (SD/SLTP/SLTA)

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan. Selain itu Angka Lulusan (AL) merupakan indikator output yang memberikan gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.32
Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

AL	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
	(%)	(%)	(%)	(%)
SD	100,00	100,00	100,00	100,00
SLTP	99,56	99,60	99,00	99,94
SLTA	98,95	99,99	99,00	99,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 tercapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD di Kabupaten Kutai Timur cukup baik.

Demikian pula capaian indikator Angka Kelulusan tingkat SLTP juga menunjukkan prestasi yang cukup baik meskipun belum sampai 100 persen, namun telah mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian sebesar 99,6 persen dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 99 persen, hampir mencapai angka 100 persen. Demikian pula pada tahun 2012 telah mencapai sebesar 99 persen sebagaimana dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian indikator Angka Kelulusan SLTA juga menunjukkan capaian yang cukup bagus. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian indikator kelulusan yang hampir mencapai 100 persen yakni sebesar 99,9 persen.



Sedangkan pada tahun 2012 turun sedikit menjadi 89 persen, namun masih on track dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

G. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya sama dengan 100 persen, berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI, uia, dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Angka melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) ditambahkan ke dalam indikator untuk memantau kemajuan pencapaian target ketiga. Karena fokus MDGs pada pendidikan dasar, di Indonesia pendidikan dasar mencakup SD dan SMP, dan lulusan SD tidak otomatis menjadi siswa SMP, angka melanjutkan menjadi indikator yang penting berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menuntaskan pendidikan dasar.

Tabel 2.33
Angka Melanjutkan Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
	(%)	(%)	(%)	(%)
SD/MI ke SMP/MTs	85,55	94,85	82,88	94,50
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	95,38	93,57	92,19	95,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berikut data perkembangan capaian indikator Angka Melanjutkan dan SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2010 hingga 2012 yang masih fluktuatif. Pada tahun 2011 menunjukkan capaiannya sebesar 94,85 persen lebih besar dari target RPJMD sebesar 87,55 persen. Namun pada tahun 2012 mengalami



penurunan menjadi sebesar 82,66 dibawah target RPJMD sebesar 89,55 persen.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah lulusan SLTP dan sederajat (termasuk MTs, dan paket B setara SMP) terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada SLTA (termasuk SMA, SMK, MA, dan paket C setara SMA), dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditambahkan ke dalam indikator untuk memantau kemajuan pencapaian target 3. Meskipun fokus MOGs hanya pada pendidikan dasar, angka melanjutkan ini merupakan indikator *outcome* dari pendidikan dasar, khususnya berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar.

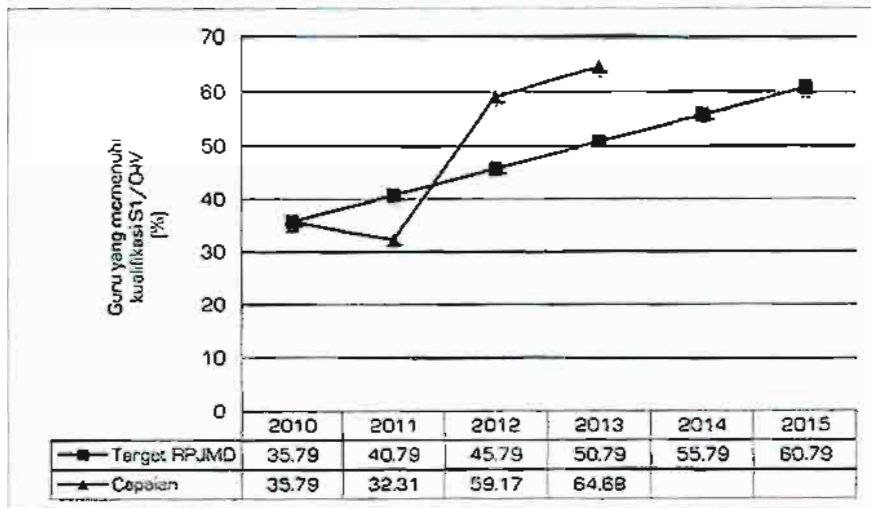
H. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menetapkan bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Arfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SOLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).

Berdasarkan capaian indikator tersebut, menunjukkan selama kurun waktu 2010-2013 mengalami capaian yang cukup positif. Pada tahun 2011 sekalipun capaiannya masih dibawah target RPJMD yakni sebesar 32,31 persen dari target sebesar 40,79 persen, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 59,17 persen dan 64,68 persen dibanding dengan target tahun 2012 sebesar 45,79 persen dan target 2013 sebesar 50,79. Sehingga diperkirakan pada tahun 2015 capaian Guru



Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV optimis akan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 60,79 persen.



Gambar 2.11 Perkembangan Capaian Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan erat antara kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualitas belajar mengajar. Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi guru yang tidak merata di perkotaan maupun perdesaan terutama daerah terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang berlebih. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru serta meningkatkan pemerataan distribusinya.

B. Kesehatan

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perilaku sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif.

Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup: (1) dana kesehatan yang terbatas, (2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme tenaga medis dan paramedis, (3) rendahnya mutu layanan medis, (4) sarana dan



prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5) belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, dan (6) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

Tabel 2.34
Capaian indikator Kesehatan
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,45	0,45	0,45	-
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	0,03	0,02
Rasio dokter per satuan penduduk	0,39	0,28	0,28	0,39
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,74	2,67	2,88	2,66
Rasio Posyandu per satuan balita	9,87	7,49	7,09	5,73
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100
Cakupan puskesmas (%)	105,56	105,56	116,67	116,67
Cakupan puskesmas pembantu (%)	69,15	73,33	73,33	84,44
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	75	27,02	39,31	12,12
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	58,21	41,79	62,42
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	55,50	72,90	85,15	69,09
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	54,50	61,43	65,93	73,33
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	68	35,38	40,49	50,85
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	82,24	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi (%)	56,57	97,26	72,41	61,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan rasio sudah mencapai target RPJMD sebesar 0,45. Sementara pada tahun 2013 sebesar 0,46 sedikit melebihi target RPJMD sebesar 0,45. Capaian rasio puskesmas, poliklinik dan pustu dengan jumlah penduduk yang telah mencapai target ini seyogyanya tetap dipertahankan dengan memperhatikan jumlah penduduk.



Tabel 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Puskesmas	19	19	19	21	21
2	Jumlah Poliklinik	12	12	11	12	5
3	Jumlah Pustu	92	96	95	95	114
4	Jumlah 1-3	123	127	126	128	140
5	Jumlah Penduduk	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:12.937	1:19.329	1:22.677	1:25.129	1:26.163
7	Rasio poliklinik per satuan penduduk	1:20.484	1:30.604	1:39.170	1:43.977	1:109.886
8	Rasio pustu per satuan penduduk	1:2.671	1:3.826	1:4.352	1:5.555	1:4.820
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1:1.781	1:2.892	1:3.340	1:4.123	1:3.924
10	Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	18
11	Jumlah Desa/Kelurahan	135	135	135	135	135
12	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1:1	1:1	1:1	1:1,17	1:1,17

Sumber:
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan (misal: Rumah Sakit) di Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang relatif lambat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk sehingga rasio RS per jumlah penduduk semakin kecil, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1 RS : 52.464 jiwa, tahun 2011 sebanyak 1 RS : 61.552 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 1 RS : 75.389 jiwa. Sejak tahun 2010 hingga pada tahun 2012 jumlah rumah sakit tetap sebanyak 7 buah dan puskesmas juga tetap sebanyak 19 buah, namun penambahan jumlah Pustu telah meningkat cukup tinggi (14 pustu).



Tabel 2.36
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah Sakit	6	7	7	7	7
2	Jumlah Penduduk	245.817	367.247	430.865	527.723	349.429
3	Rasio	1.40.970	1:52.464	1:61.552	1:75.389	1:78.849

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat, 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupation Rate (BOR)* yang ideal 60-80 persen; 2) Rata-rata lama rawat seorang pasien atau *Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal 6-9 hari; 3) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati/ *Turn of Interval (TOI)* yang ideal antara 1-3 hari; 4) angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam/ *Net Death Rate (NDR)* dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar; 5) angka kematian umum penderita yang dirawat rumah sakit/ *Gross Death Rate (GDR)* dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 45.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk pada tahun 2011 masih sesuai dengan target RPJMD sebesar minimal 0,02, namun pada tahun 2012 justru terjadi penurunan capaian rasio menjadi sebesar 0,01, hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012 sebesar 22,47 persen sedangkan jumlah RS tetap. Cakupan puskesmas telah memenuhi target RPJMD pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar masing-masing 105,56 dan 105,56, kemudian cakupan puskesmas pembantu telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar masing-masing 70,15 dan 72,15 dengan capaian indikator sebesar berturut-turut 73,33 dan 73,33.

Jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur akan berimplikasi pada rasio jumlah rumah sakit. Oleh karena itu, yang patut mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan program-program dan kegiatan dalam meningkatkan rasio rumah sakit yang perlu ditingkatkan seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang cepat terutama karena faktor migrasi sebagai bentuk pelayanan umum bagi masyarakat.



3) Rasio dokter per satuan penduduk

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Manusia yang sehat dan produktif akan meningkatkan daya saing suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kesehatannya. Hal tersebut merupakan amanah Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Menurut Indikator Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan RI, disebutkan bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk sebanyak 40 atau 1 dokter untuk 2500 jiwa. Dokter spesialis 6 per 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis untuk 1 untuk 16.000 jiwa. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 220 juta jiwa, itu artinya jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia adalah 88.000 dan dokter spesialis 13.200.

Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan 2012 masih jauh dari ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHO (1 dokter untuk 2500 jiwa). Demikian juga berdasarkan sebaran dokter masih terjadi ketimpangan, dimana tenaga dokter 50 persen lebih masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Jumlah dokter umum di Kabupaten Kutai Timur sebesar 91 dokter umum, dan 46 diantaranya berada di Kecamatan Sangatta Utara. Tenaga dokter paling banyak terdapat di RSUD Sangatta yaitu 32 orang, diikuti puskesmas sangatta selatan 8 orang, kemudian puskesmas teluk lingga 7 orang dan RS SOHC 6 orang.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015, maka capaian rasio dokter per satuan penduduk masih di bawah target, dimana pada tahun 2011 dan 2012 telah menetapkan target sebesar minimal 0,39. Sedangkan capaian rasio dokter tahun 2011 dan 2012 sebesar 0,20. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat di Kabupaten Kutai Timur namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah dokter.

Jika merujuk Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan RI, maka berdasarkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur, masih diperlukan cukup banyak tambahan jumlah dokter. Selain perlunya penambahan jumlah tenaga dokter, perlu diperhatikan distribusinya agar merata di semua kecamatan.



Tabel 2.37
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokter Umum	77	96	86	103	103
2	Jumlah Dokter Gigi	20	27	25	25	29
3	Jumlah Dokter Spesialis	20	19	19	19	16
4	Bidan	99	174	232	267	266
5	Sarjana Keperawatan	2	11	8		
6	Perawat	342	421	430	512	462
7	Tenaga Farmasi	25	20	39	55	32
8	Sarjana Farmasi dan Apoteker	17	19	25		
9	Tenaga Sanitarian	9	13	12	22	11
10	Kesehatan Masyarakat	20	32	38	34	69
11	Tenaga Gizi	17	16	23	22	10
12	Tenaga Terapi Fisik	6	7	5	6	3
13	Tenaga Ketenikisan Medis	28	38	33	41	36
14	Jumlah Penduduk	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
15	Rasio dokter terhadap penduduk	1:3192.43	1:3825.49	1:5.010	1:5.123	1:5.386
16	Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1:12290.85	1:13601.74	1:22.677	1:27.774	1:34.672
17	Rasio dokter gigi terhadap penduduk	1:12290.85	1:19328.79	1:17.234	1:21.109	1:19.129
18	Rasio tenaga farmasi dan apoteker terhadap penduduk	1:2483.00	1:2110.61	1:1.765.84		
19	Rasio tenaga gizi terhadap penduduk	1:122908.50	1:33368.09	1:18.733	1:23.987	1:55.475
20	Rasio tenaga keperawatan terhadap penduduk	1:718.76	1:872.32	1:920.65		
21	Rasio tenaga bidan terhadap penduduk	1:9832.88	1:16362.35	1:1.857	1:1.977	1:2.086



No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
22	Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk	1:14459.82	1:19328.79	1:11.338	1:15.521	18.040
23	Rasio tenaga sanitasi terhadap penduduk	1:27913.00	1:28249.77	1:35.905	1:23.987	-
24	Rasio tenaga teknis medis terhadap penduduk	1:12290.85	1:11476.47	1:13.056	1:12.871	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 (Data diolah)

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun menunjukkan capaian yang positif meskipun naik turun namun masih mencapai target RPJMD. Capaian selama 3 tahun terakhir 2011-2013 berturut-turut sebesar 2,67, 2,88 dan 2,66. Semaraca target tahunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,74. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rasio tersebut adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pendistribusian tenaga medis yang lebih merata.

5) Rasio posyandu per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada



masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.38
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Posyandu	214	214	213
2	Jumlah Balita	28.555	30.189	31.917
3	Rasio	7,49	7,09	5,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2012 sebesar 12,21, sedangkan target pada tahun 2015 adalah 12,37. Sehingga dapat diperkirakan pada tahun 2015 dapat mencapai target yaitu 12,37. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaiannya adalah 100 persen yaitu semua kasus balita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu mendapat perawatan insentif.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

Data cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2011 dan 2012 belum tersedia, sehingga belum dapat dianalisis dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan



7) Cakupan puskesmas

Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pada kurun waktu 2011-2013 menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 116,67 persen, jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 105,56 persen, maka telah memenuhi target (*on track*).

8) Cakupan puskesmas pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pembantu pada kurun waktu 2010-2013 menunjukkan adanya kenaikan yakni sebesar 68,15 persen pada tahun 2010 menjadi 73,33 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kemudian naik menjadi 84,44 persen pada tahun 2013. Sementara target akhir tahun 2015 sebesar 78,15 persen telah terlampaui.

9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen artinya setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2010, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani telah mencapai 100 persen, namun untuk tahun 2011 hingga tahun 2013 telah mengalami penurunan yakni berturut-turut sebesar 58,21 persen, 41,79 persen, dan 62,42 persen.

Penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang serius guna menemukan penyebabnya. Apakah karena faktor pengumpulan data atau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jika



kondisi yang sebenarnya akan berpotensi kepada meningkatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011-2013 masih terjadi fluktuatif yakni berturut-turut sebesar 72,9 persen, 85,15 persen, 69,09 persen. artinya telah mencapai target sebesar 56 persen tiap tahunnya. Jadi, meskipun capaiannya masih fluktuatif tetap pada posisi sudah *on-track*. Sehingga pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan akan bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

11) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian Universal child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap.

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Jika dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk dan rasio posyandu per satuan balita yang sedikit di bawah target serta cakupan kunjungan bayi yang sudah melebihi target di tahun 2011 dan 2012, dimana target cakupan desa/Kelurahan UCI sebesar 55 persen. Melihat dari perpaduan data tersebut, disinyalir bahwa belum semua bayi yang berkunjung ke pelayanan



kesehatan termasuk pelayan dan pustu mendapatkan pelayanan imunisasi atau saat kunjungan bayi, kader atau tenaga kesehatan kurang memberikan informasi tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman "*Mycobacterium tuberculosis*". Jumlah penderita TBC diseluruh dunia kurang lebih 18 juta orang dan kurang lebih 9 juta orang Tuberculosis (TBC) merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan yang utama di dunia.

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Capaian CDR Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 sebesar 35,38 persen, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 40,49 persen. Sekalipun terjadi kenaikan cakupan namun capaian ini masih jauh dari target pada tahun 2015 yaitu 70 persen.

Pada tahun 2009, di Indonesia tercatat sejumlah 294.732 kasus TB telah ditemukan dan diobati (data awal Mei 2010) dan lebih dari 169.213 diantaranya terdeteksi BTA+ dengan demikian *Case Detection Rate* 73 persen. Meskipun secara nasional menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam penemuan kasus dan tingkat kesembuhan, pencapaian di tingkat provinsi masih menunjukkan disparitas antar wilayah. Pada tahun 2009 tersebut, sebanyak 28 provinsi di Indonesia belum dapat mencapai angka penemuan kasus (CDR) 70 persen dan hanya 5 provinsi menunjukkan pencapaian 70 persen CDR dan 65 persen kesembuhan (Kemenkes RI, 2011).

Hasil penelitian Pasaribu (2005) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya CDR pada program TBC adalah kemiskinan, penyuluhan kesehatan dan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Sebagai contoh, studi mengenai perjalanan pasien TB dalam mencari pelayanan di Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagai penyebab TB yang tidak infeksius, misalnya merokok, alkohol, stres, kelelahan, makanan gorengan, tidur di lantai, dan tidur larut malam (Kemenkes, RI, 2011).

Stigma TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, mengurangi mitos-mitos



TB dapat dilakukan melalui kampanye pada kelompok tertentu dan membuat materi penyuluhan yang sesuai dengan budaya setempat agar pengetahuan masyarakat tentang TB meningkat. Sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di sekitarnya, untuk kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat.

Selain itu untuk dapat meningkatkan CDR, perlunya pemantapan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) pada praktisi kesehatan, terutama dokter praktek swasta dan tenaga kesehatan lainnya. Strategi ini terdiri atas lima komponen utama yakni adanya komitmen politik, tersedianya pelayanan pemeriksaan mikroskopik (*passive case finding using sputum-smear microscopy*), terjaminnya penyediaan obat yang merata dan tepat waktu, Adanya sistem monitoring yang baik, dan adanya program pengawasan keteraturan minum obat disertai jaminan agar setiap pasien pasti minum obat sampai tuntas (Mahendradhata, 2009).

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus *Flavivirus*, famili *Flaviviridae*. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2015 sebesar 85 persen, maka capaian tersebut telah melampauinya.

14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan rujukan pasien



maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Timur masih jauh dari target RPJMD. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan capaian berturut-turut sebesar 27,02 persen, 39,31 persen, 12,14 persen. Sementara target RPJMD tahun 2011 hingga tahun 2013 berturut-turut sebesar 78 persen, 81 persen, 84 persen.

Terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin secara berhasil guna dan berdaya guna diantaranya meliputi : (i) terlaksananya registrasi masyarakat miskin yang tepat sasaran sebagai peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, (ii) terlaksananya pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan dan taraf kesehatan masyarakat miskin, (iii) terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat miskin Program ini menjadi vital mengingat pengentasan kemiskinan di Kutai Timur merupakan prioritas pembangunan yang salah satunya dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi mereka. Mereka yang termasuk kelompok keluarga miskin (gakin) seringkali direpotkan masalah biaya saat berhadapan dengan problem kesehatan. Melalui program ini, gakin bisa terlepas dari beban biaya kesehatan, sebab pemerintah akan menanggung biaya pelayanan kesehatan untuk gakin. Dengan capaian yang masih rendah diharapkan ke depan ada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

15) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di kabupaten Kutai Timur telah mencapai target di tahun 2011 yaitu 97,26 persen (target sebesar 65 persen), sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 72,41. Namun demikian, capaian tersebut masih melampaui target RPJMD.



C. Pekerjaan Umum

Capaian urusan pekerjaan umum, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	48,73	56,91	58,53	n.a
Rasio jaringan irigasi	40	50	65	75
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,17	2,50	2,94	2,94
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Sesuai standar	28,69	27,71	27,71
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minima 1,5 m) (%)	0,079	0,079	0,10	0,10
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor ingkup kewenangan kota (%)	18,94	35	40,50	40,50
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	0,16	0,16	0,16	0,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikategorikan tiga kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan.

Kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih timpang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal sebagai upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Adapun gambaran mengenai proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tampak pada Tabel 2.40 berikut.



Tabel 2.40
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kondisi baik	514,00	539,29	583,47	315,00	-
2	Kondisi Sedang	210,00	-	227,20	383,00	-
3	Kondisi rusak ringan	55,00	210,00	-	217,00	-
4	Kondisi rusak berat	219,71	274,71	214,50	167,76	-
5	Jalan Kabupaten secara keseluruhan	998,99	1.024,00	1.025,17	1.082,76	-
6	Proporsi kondisi baik (%)	51,47	52,67	56,91	29,09	-
7	Proporsi kondisi sedang (%)	21,03	-	22,16	35,37	-
8	Proporsi kondisi rusak ringan (%)	5,51	20,51	-	20,04	-
9	Proporsi kondisi rusak berat (%)	22,00	26,83	20,92	15,49	-

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pada tahun 2011, untuk mendukung transportasi darat, pemerintah telah membangun jalan negara sepanjang 312,29 km, jalan provinsi sepanjang 285,00 km serta jalan kabupaten sepanjang 757,48 km. Dari total panjang jalan yang ada sekitar 54,49 persen masih tanah, sementara sisanya 25,86 persen sudah berupa aspal dan 19,65 persen berupa kerikil.

2) Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, namun pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap aspek sosial.

Infrastruktur yang berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan produksi pertanian, khususnya beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Pada tahun 2012, ketersediaan jaringan irigasi mengalami peningkatan pesat dalam jumlahnya. Peningkatan jumlah saluran irigasi pada tahun ini diindikasikan mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2012.



Adapun gambaran mengenai rasio jaringan irigasi sebagaimana tampak Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Tahun	Luas Sawah (Ha)	Panjang Atau Luas Irigasi (Ha)		
		Teknis	Non teknis	Sedehana
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
2009	6,147	2,090	3,240	817
2010	11,319	2,957	8,752	-
2011	17,112	2,495	13,622	995
2012	23,817,20	7,144	-	3,795
2013	-	-	-	-

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna untuk membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut.

Tabel 2.42
Sarana Peribadatan
Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

Sarana Peribadatan	Tahun		
	2011	2012	2013
{1}	{2}	{3}	{4}
Masjid/Musholla/Langgar	602	590*	713
Gereja Kristen Protestan	134	134	138
Gereja Kristen Katolik	51	51	53
Pura	16	16	16
Vihara	1	1	1
Jumlah	804	792	921

Sumber :- Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

- Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Bagian Sosial Sekretariat Kab. Kutai Timur Tahun 2013

Keterangan*) Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.42 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana peribadatan telah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah masjid dan gereja meningkat. Hal ini



menunjukkan bahwa seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur diikuti dengan adanya penambahan jumlah sarana peribadatan.

Berdasarkan perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan meskipun masih dibawah target tahunan RPJMD, namun optimis akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 dapat tercapai.

4) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini juga menuntut kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi penduduknya tersebut.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perlu juga didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2011-2013 masing-masing berturut-turut sebesar 28,69, 27,71, 27,71 telah sesuai dengan standar.

5) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2011 tercapai 0,079, kemudian tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 0,10. Meskipun tiap tahun terjadi peningkatan capaian namun masih belum mencapai atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencapai target tahunan dan target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 sebesar minimal 0,15 masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya.



6) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2012 capaian pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 40,50 persen telah melampaui target RPJMD dan bahkan telah melewati target akhir tahun 2015 sebesar 38,94 persen.

7) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Capaian sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar selama kurun waktu empat tahun terakhir 2010-2013 tidak mengalami perubahan sebesar 0,16 persen, sementara target yang ditetapkan tiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kerja keras untuk menurunkan persentasenya hingga tercapai pada akhir pelaksanaan tahun 2015.

D. Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan Rakyat salah satunya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Urusan Perumahan
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	62,50	-	67,50	-
Pembangunan rumah layak huni (unit)	84	500	750	114
Rasio pemukiman layak huni	52,80	60	70	85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air bersih, sarana pembuangan kotoran kakus/jamban, sarana pembuangan limbah cair, limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah tangga berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2)



pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); 4) pembuangan sampah.

Capaian persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan capaian yang cukup baik yakni pada tahun 2012 sebesar 90 persen jauh di atas target sebesar 67,5 persen. Pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diprediksi akan tercapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75 persen.

2) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan upaya tersebut dan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan perumahan ditujukan pula untuk mewujudkan perumahan permukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 84 unit, kemudian naik menjadi 500 unit tahun 2011 dan 750 unit pada tahun 2012. Program pembangunan rumah layak huni tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta juga mendorong pihak swasta untuk mensukseskan program tersebut, dimana salah satu program tersebut diarahkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

3) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.44
Jumlah permukiman layak huni
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Luas permukiman layak huni [ha]	735,31	-	-	-
2	Luas wilayah permukiman (ha)	770,31	-	-	-
3	Rasio permukiman layak huni	95,45	60	70	85

Sumber: Dinas PU Kabupaten Kutai Timur



Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Kutai Timur selama tiga tahun terakhir (2011-2013) terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target RPJMD.

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan agar muncul kepedulian sosial untuk partisipasi dan warga mampu terhadap yang kurang mampu.

E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 2.45
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Luas wilayah (Ha)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



B. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tabel 2.46
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.061	1.565	n.a	n.a	n.a
2.	Jumlah Bangunan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timur yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kutai Timur.

F. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2009-2013.

Tabel 2.47
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen Rencana Strategis SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur



G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rasio ijin trayek	0,08	n.a	n.a	n.a
Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	193	n.a	n.a	n.a
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	n.a	n.a	25-46 menit	25-46 menit
Pemasangan rambu-rambu	Sesuai standar	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Perkembangan capaian rasio ijin trayek di Kabupaten Kutai Timur sementara belum dapat dianalisis karena belum tersedianya data.

2) Jumlah uji kir angkutan umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutai Timur baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut adalah kondisi mengenai jumlah kendaraan wajib uji dan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2010-2012.



Tabel 2.49
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2010-2012

No	Angkutan Umum	2010			2011			2012		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mobil penumpang umum	91		-	81	-	-	52	-	-
2	Mobil bus	221		-	148	-	-	156	-	-
3	Mobil barang	3.267		-	3.297	-	-	3.488	-	-
	Jumlah	3.579			3.526			3.696		

Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2013

Mengingat belum adanya data yang tersedia persentase jumlah KIR dengan kendaraan yang wajib uji maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk mengontrol sarana mobilitas dalam rangka memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan bagi penumpang.

3) Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Tabel 2.50
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah pelabuhan laut	2	2	2
2	Jumlah pelabuhan udara	11	13	13
3	Jumlah terminal	-	10	12
	Jumlah	13	25	27

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun.

4) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Berdasarkan perkembangan capaian lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target RPJMD. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD per tahunan bahwa lama pengujian kelayakan angkutan umum maksimal selama 1 (satu) hari, namun dalam realisasinya lebih cepat dari target tersebut yaitu rata-rata selama 25 sampai 46 menit. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan umum yang baik bagi masyarakat.



5) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Berikut adalah kondisi pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.51
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	-	-	-	-	-
2	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang Seharusnya tersedia	-	-	-	-	-
3	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

H. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase penanganan sampah [%]	55	n.a	45	n.a
Persentase penduduk berakses air minum [%]	n.a	n.a	13,87	n.a
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	70	n.a	40	67
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Persentase penanganan sampah

Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap produksi sampah.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak



membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SN/ 19-2454-2000).

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya (Anonim,1986). Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tak dikehendaki atau sia-sia (Tchobanoglous, Thelsen dan Vigil 1993).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Bertambahnya jumlah penduduk, berimplikasi kepada meningkatnya permasalahan sampah di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang optimal serta antisipasi adanya peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi.

Berdasarkan perkembangan capaian persentase penanganan sampah dari tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan masih jauh dari target pencapaian yang ditetapkan, oleh karena itu perlu upaya kerja keras untuk mencapai target yang pada akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait diantaranya adalah perlunya penambahan personal mulai pengumpul, pengangkut sampah serta cukupnya rasio TPS, agar pelayanan bisa maksimal. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah pembangunan TPA beserta pengelolaannya yang diatur melalui Peraturan Daerah, penambahan alat kebersihan, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan seperti pembangunan TPS, penambahan truk pengangkut sampah dan penambahan alat berat TPA. Selain itu, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.



2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Berdasarkan capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2012 sebesar 13,87 persen menunjukkan masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2012, tentu hal ini akan semakin memperberat capaian pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 sebesar 80 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi membawa dampak meningkatnya perkembangan permukiman di Kabupaten Kutai Timur yang tentu berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan air bersih. Beberapa permasalahan pelayanan air bersih yang belum maksimal disinyalir diantaranya disebabkan oleh terbatasnya sumber air baku, tersebarnya kawasan permukiman, kawasan permukiman yang berada di tempat tinggi dan jauh dari jaringan, angka kehilangan air yang cukup tinggi mencapai kurang lebih 30 persen, sistem produksi yang kurang maksimal, biaya listrik tinggi, serta tariff yang masih rendah.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal selama tiga tahun terakhir (2011-2013) meskipun telah mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun belum mencapai target tahunan RPJMD. Oleh karena itu perlu ada upaya yang keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan guna lebih meningkatkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal yang diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 dapat tercapai.

4) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Capaian rasio TPS per satuan penduduk belum dapat dianalisis karena belum



tersedia data. Indikator tersebut sangat penting untuk diketahui agar sejauh mana selama ini kemampuan TPS dalam menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur Khususnya.

L. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase lahan bersertifikat. Kondisi administrasi pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 2.53
Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas wilayah daratan	-	-	-	-	-
2	Luas tanah bersertifikat HGB	-	-	-	-	-
3	Luas tanah bersertifikat HGU	-	-	-	-	-
4	Luas tanah bersertifikat HM	-	-	-	-	-
5	Luas tanah bersertifikat HPL	-	-	-	-	-
6	Total luas tanah bersertifikat	-	-	-	-	-
7	Prosentase HGB dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
8	Prosentase HGU dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
9	Prosentase HM dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
10	Prosentase HGPL dibanding luas daratan	-	-	-	-	-
11	Prosentase total luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PLTR dan BPN

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	13	n.a	71,90	n.a
Rasio bayi berakte kelahiran	n.a	n.a	46,13	n.a
Kepemilikan KTP	13	93	61,30	n.a
Penerapan KTP Nasional berbasis NK	65	n.a	61,30	n.a

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



1) Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP adalah merupakan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun. Capaian rasio penduduk ber KTP pada tahun 2012 menunjukkan sebesar 71,90. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari 100 penduduk Kabupaten Kutai Timur terdapat 71,90 yang ber KTP sedangkan sisanya 28,10 belum ber KTP. Jika dibandingkan dengan target RPJMD ditetapkan tiap tahun minimal 90 maka capaian tahun 2012 masih berada dibawah target. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan rasio penduduk yang ber KTP perlu adanya program sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang arti pentingnya ber KTP.

2) Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah keseluruhan bayi yang lahir. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2012 masih tercapai 46,13 dari 100 yang ditargetkan. Melihat perbandingan capaian dengan target tahunan dan akhir RPJMD yang masih jauh, diperkirakan akan sulit tercapai pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015.

3) Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP (> 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah) dikalikan 100 persen. Capaian indikator kepemilikan KTP masih fluktuatif, dimana pada tahun 2011 tercapai 93 persen yang melampaui target RPJMD sebesar 90 persen, namun tahun 2012 menurun menjadi 61,30 persen jauh di bawah target sebesar 90 persen. Oleh karena itu perlu kerja keras untuk melaksanakan program sosialisasi kepemilikan KTP guna mencapai target RPJMD tahun 2015 sebesar 90 persen.

4) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum menunjukkan capaian yang positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 61,30 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 75 persen. Sedangkan pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 ditargetkan sebesar 90 persen. Oleh karenanya diperlukan kerja keras bagi SKPD terkait untuk mencapai target tersebut dengan menerapkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.



K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	7,15	24,70	32,25	45,83
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	92,85	90	90	90
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	35-50	35-50	35-50	35-50
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif, dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir (2011-2013) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 tercapai 24,7 persen, kemudian tahun 2012 sebesar 32,25 persen, selanjutnya tahun 2013 sebesar 45,83 persen. Sementara target tahunan RPJMD hanya sebesar 10 persen. Sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 akan tercapai.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2011 dan 2013 telah memenuhi target RPJMD sebesar 90 persen, dan bahkan pada tahun 2012 mencapai 98 persen. Sehingga diperkirakan target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 akan tercapai.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah mencapai target RPJMD tahunan sebesar 35-50 persen. Sehingga diperkirakan akan tercapai target akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015.



4) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercatat selama tahun 2011 hingga tahun 2013 tercapai 100 persen sesuai dengan target RPJMD.

L Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2010-2013

Indikator	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,3	2,8	2,8	2,8
Rasio akseptor KB	82,88	65	68	71
Cakupan peserta KB aktif (%)	82,88	83,71	63,91	85,39

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Berkaitan dengan hal di atas, perkembangan jumlah anak dan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2010-2012 dapat dijelaskan sebagaimana tampak pada Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah anak	22.501	.	.
2	Jumlah keluarga	77.031	.	.
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,0	3,4	2,8

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Data diolah



2) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur sebesar 26.712. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3-4 anak. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 sebanyak 25.622 orang peserta dari total 42.365 PUS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah PUS	42.365	43.013	44.594
2	Jumlah Akseptor KB	25.622	26.635	28.501
3	Rasio Akseptor KB	0,60	0,62	0,64

Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2013

Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi. Terlihat pada tabel 3.61 menunjukkan adanya trend meningkat penggunaan kontrasepsi (sebagai akseptor) dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya relatif lambat. (0,02 per tahun).

Berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya peningkatan akseptor KB. Sebagaimana tampak pada Tabel 3.61 pada tahun 2010 jumlah akseptor KB sebesar 25.622, selanjutnya naik pada tahun 2011 sebesar 26.635, kemudian pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.501.

3) Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

Capaian cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2012 sebesar 63,91



persen masih jauh dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 84,55 persen. Oleh karena itu, diperlukan upaya kerja keras untuk mencapai target akhir pelaksanaan pada tahun 2015 sebesar 87,11 persen.

M. Sosial

Masalah sosial adalah perilaku atau keadaan kompleks yang akibatnya berpengaruh kesejahteraan orang banyak (umum) serta dapat mengganggu kestabilan masyarakat, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 2.59
Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	25,25	70,14	69,12	91,11
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	56,83	89,94	91,43	89,12

Sumber:
- Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

N. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.60
Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2009-2013

No	Variabel	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah pengangguran (Jiwa)	4.636	6.348	7.045	5.096	7.736
2.	Angka setengah menganggur (Jiwa)	15.014	27.354	27.354	32.500	37.646*
3.	Angkatan Kerja (AK)	83.387	122.551	128.874	130.685	130.985
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,07	69,79	70,45	80,20	65,23
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,56	5,18	4,95	3,90	5,91

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

1) Jumlah Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat,



sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dimana 95 persen angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan capaian tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan jumlah angka pengangguran pada tahun 2011 sebesar 7.045 jiwa kemudian tahun 2012 menurun menjadi sebesar 5.096 jiwa, selanjutnya tahun 2013 naik menjadi 7.736 jiwa.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktifitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

Berdasarkan capaian TPAK selama kurun waktu 2010-2012 menunjukkan



capaian yang sangat bagus (*on track*). Bahkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan capaian yang jauh melampaui target RPJMD. Meningkatnya persentase TPAK pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur semakin tinggi (meningkat).

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan serta capaian terhadap RPJMD *on track* pada tahun 2012 bahkan telah menembus capaian tahun 2014, sekalipun pada tahun 2011 sedikit di atas target. Sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan optimis akan memenuhi target.

4) Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Cara menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya



lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Tabel 2.61
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	122.551	128.874	130.685	130.985
Laki-laki	83.752	93.111	-	-
Perempuan	38.846	35.763	-	-
Bukan Angkatan Kerja	55.057	54.048	-	-
Laki-laki	13.777	6.958	-	-
Perempuan	41.280	47.090	-	-

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 (Sakernas)

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Simreda Tahun 2012) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sebesar 105.902 kemudian naik menjadi 116.742 pada tahun 2011. Berdasarkan kenaikan tersebut, maka rasio penduduk yang bekerja juga makin meningkat dimana pada tahun 2011 telah mencapai 90,58 melampaui target RPJMD sebesar 66,07.

D. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurun jumlah kemiskinan dan menurun jumlah pengangguran. Untuk mengetahui



jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.65 dibawah. Persentase koperasi aktif menunjukkan kecenderungan relatif tetap dari tahun ke tahun berkisar rata-rata sekitar 64 persen, dengan demikian perlu dilakukan pembinaan manajemen perkoperasian sehingga mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT menunjukkan keaktifan nil dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi.

Tabel 2.62
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah koperasi aktif	533	580	508	574	n.a
2	Jumlah koperasi	796	804	895	950	n.a
3	Persentase koperasi aktif (%)	66,96	72,14	56,76	60,42	n.a

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

B. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Untuk mengetahui jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-20120 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah seluruh UKM	2.945	3057	3.450	5.080	n.a
2	Jumlah BPR/LKM	1	9	46	46	n.a
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	0	0	0	0	n.a

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



C. Jumlah BPR/LKM

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, memudahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil dapat mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Untuk mengetahui jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.64
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah BPR	1	1	1	1	n.a
2	Jumlah LKM	8	8	45	45	n.a
3	Jumlah BPR dan LKM	9	9	46	46	n.a

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

P. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Namun hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Tabel 2.65
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	Jumlah Investor				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PMDN	7	6	-	-	-
2.	PMA	13	6	-	-	-
3	Total	20	12	15	21	4

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dapat mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.66
Jumlah Investasi PMDN/PMA Yang Disetujui
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Tahun	PMDN	PMA
	Nilai Investasi (Triliun Rp)	Nilai Investasi (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)
2009	-	-
2010	-	-
2011	1,3275	123
2012	1,8	69,3
2013	5,087	57

Sumber:

Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat dari sejumlah indikator: *Pertama*, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni budaya. *Kedua*, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang



dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan menginventarisir warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.

Tabel 2.67
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	10	6	6	3
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	6	4	4	4
3	Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan [100]	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Q. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperdayaannya. Sedangkan banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda dan organisasi olahraga menggambarkan tingkat partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui gambaran umum organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.68

Tabel 2.68
Jumlah Organisasi dan Kegiatan
Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah organisasi pemuda	10	38	38	38
2	Jumlah organisasi olahraga	10	43	43	43
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Sesuai kondisi eksisting	4	4	5
4	Jumlah kegiatan olahraga	Sesuai kondisi eksisting	10	9	16

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013



R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dari sisi tugas dan rasio jumlahnya dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 2.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah polisi pamong praja	97	116	-	-	-
2	Jumlah penduduk	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk					

Sumber: Satuan Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

B. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Gambaran umum keberadaan Satuan Linmas di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Linmas	1.877	1.877	-	-	-
2	Jumlah Penduduk	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	130	140	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012



S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013. Inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya perlu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengimplementasikan *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.71
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012

B. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penerima pelayanan. Indeks Kepuasan



Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, (10) kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini mengingat masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan dapat sebagai tolok ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakannya, dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan.

T. Ketahanan Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013.



Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton)	43.376	44.129	38.357	36.072	43.170
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	245.817	367.247	430.865	527.723	554.751
3	Jumlah Konsumsi Pangan Utama (ton)	24.155,11	31.614,52	34.975,28	-	-
4	Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama Terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	44,31	28,36	8,82	-	-

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

B. Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.73
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	√	√	√	√	√

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

U. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.



Tabel 2.74
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)	n.a	12	13	13
2	PKK Aktif (buah)	n.a	135	135	135
3	Posyandu Aktif (buah)	105	108	185	195

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

V. Statistik

Ketersediaan dokumen statistik merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.75
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√		√		√		√		√	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	√		√		√		√		√	
3	Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)										
4	KBDA										
5	Indeks Gini Rasio		√		√		√		√		√
6	Input Output	√		√		√		√		√	
7	Indeks Kemiskinan										



No	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masyarakat (IKM)										
8	Indeks Harga Konsumen (IHK)										

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

W. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis penyelenggaraan pemerintahan.

Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang profesional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangat penting.

X. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur berperan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jaringan komunikasi yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jaringan telepon genggam	5	6	6	6	6
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	6	7	7	7	7

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur



B. Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional

Tabel 2.77
Jumlah Surat Kabar, Radio dan Televisi Nasional/Lokal
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	1	1	1	-	-
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	3	3	3	-	-
3	Total jenis surat kabar (1+2)	4	4	4	-	-
4	Jumlah penyiaran radio lokal	N/A	N/A	8	-	-
5	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	-	-
6	Jumlah penyiaran Televisi lokal	N/A	N/A	1	-	-
7	Jumlah penyiaran Televisi nasional	11	11	11	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Media informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam penyebaran berbagai informasi termasuk informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagai media informasi yang ada.

Y. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.78
Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	-	-	-	-	-
3	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
4	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-



No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Total Perpustakaan (1+3)	-	-	-	-	-
6	Total pengunjung Perpustakaan (2+4)					

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur (konfirmasi data)

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca masyarakat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur.

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi dua (2) bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan



buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor) pada jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan budidaya dalam skala kecil yang telah dilakukan di Kutai Timur mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tabel 2.79
Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No.	Luas Lahan	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Padi Sawah	Ha	3.963	4.819	5.056	5.424
2	Padi Ladang	Ha	5.352	5.650	5.887	5.047
3	Jagung	Ha	768	538	338	307
4	Ubi Kayu	Ha	310	299	360	141
5	Ubi Jalar	Ha	186	191	236	76
6	Kacang Tanah	Ha	258	200	194	159
7	Kedelai	Ha	374	257	79	73
8	Kacang Hijau	Ha	108	67	39	13
9	Sayuran	Ha	2.090	1.763	1.537	1.352
10	Buah-buahan	Ha	4.757	3.409	2.916	5.841

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2011-2013 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan, terutama komoditas padi sebagai pangan utama. Seiring dengan perluasan lahan baik padi sawah maupun padi ladang dari tahun 2010 hingga 2012, maka diikuti dengan peningkatan produksi padi. Pada tahun 2010 luasan padi sawah sebesar 3.963 ha dan padi ladang sebesar 5.352 ha kemudian menjadi bertambah luas pada tahun 2012 yakni padi sawah seluas 5.056 ha dan padi ladang 5.887 ha.

Peningkatan dan penurunan luasan lahan tanaman tersebut berimplikasi terhadap hasil produksi tanaman pangan. Pada periode tahun 2010 hingga 2013 telah mengalami peningkatan produksi padi sawah sebesar 4.759 ton dan produksi padi ladang meningkat sebesar 1.762 ha. Sedangkan tanaman palawija yang mengalami penurunan perluasan juga mengalami penurunan produksi sebesar 1.773 ton selama kurun waktu 2010-2013 dengan rincian tanaman jagung menurun sebanyak 1.035 ton, ubi kayu menurun sebanyak 315 ton, kacang tanah menurun sebanyak 36 ton, kedelai menurun sebanyak 353 ton, serta kacang hijau menurun sebanyak 70 ton



Tabel 2.80
Produksi Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
1	Padi sawah	Ton	16.323	19.854	21.082	24.476
2	Padi ladang	Ton	13.026	13.768	14.788	12.719
3	Jagung	Ton	1.599	1.117	564	649
4	Ubi kayu	Ton	4.323	4.174	4.008	1.988
5	Ubi jalar	Ton	1.685	1.731	1.721	692
6	Kacang tanah	Ton	263	202	227	159
7	Kedele	Ton	434	299	81	86
8	Kacang hijau	Ton	111	68	41	14
9	Sayuran	Ton	1.606	5.064	3.188	3.386
10	Buah-buahan	Ton	8.171	25.148	7.818	25.353

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun 2010-2012, hanya padi yang terdapat kenaikan cukup menggembirakan baik luas tanam maupun produksinya, namun demikian produktivitasnya masih jauh dari target RPJMD yang ditetapkan. Sehingga diperkirakan pada akhir tahun 2015 target produktivitas padi sebesar 60 kw/ha akan sulit tercapai.

Sedangkan untuk tanaman pangan lainnya, dimana umbi-umbian relative tetap; buah dan sayuran masih fluktuatif dan bahkan palawija justru terdapat kecenderungan penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, perlu komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan produktivitas tanaman padi dari capaian yang stabil selama ini, sembari memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penurunan luasan dan produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang dialihfungsikan serta melakukan upaya-upaya terobosan dan inovatif untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija dalam mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan pada akhir tahun 2015.

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-lain. Upaya peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya dengan intensifikasi pertanian. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan



oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2) Produksi padi (ton)

Berdasarkan hasil capaian produksi padi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 dan 2012 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 33.621 ton kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 35.870 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan peningkatan luas lahan sawah.

Namun demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD maka, naik pada tahun 2011 maupun tahun 2012 masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga jika tidak dilakukan terobosan program yang baik untuk meningkatkan produksi padi, maka pada akhir tahun 2015 akan sulit terosisasikan.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produktivitas padi diantaranya adalah:

- a) Luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan tingkat teknologi yang sama, semakin luas lahan yang dapat ditanami padi, maka diduga akan semakin besar total produksinya.
- b) Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena semakin tinggi jumlah tenaga kerja hingga pada jumlah tertentu, produktivitas tenaga kerja mencapai optimal.
- c) Benih unggul berpengaruh positif terhadap produksi padi, dikarenakan benih yang bermutu mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi jika dibanding dengan benih yang bermutu rendah.
- d) Pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena sampai batas tertentu, dengan pemupukan akan meningkatkan produktivitas per satuan luas lahan.
- e) Irigasi berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan pengairan yang baik produktivitas padi per satuan luas lahan semakin meningkat.

3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur. Namun kontribusinya cenderung terus menurun seiring dengan meningkatnya peran



sektor pertambangan dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu dari 4,37 persen pada tahun 2008 menjadi 3,25 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 berdasarkan angka sementara BPS Kabupaten Kutai Timur perannya terus menurun yaitu hanya sebesar 3,10 persen. Namun demikian sektor pertanian diyakini dapat menyumbang terhadap pertumbuhan dan dapat membentuk struktur ekonomi seimbang dimasa mendatang (Rusastra, dkk 2004) apabila prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tetap berorientasi kepada pembangunan pertanian dalam arti luas. Potensi tersebut terlihat berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2008-2012, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi antara 29,17 persen - 29,38 persen, dimana subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian dengan *share* antara 8,41 persen - 10,58 persen pada tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 2.81
Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Dengan MIGAS Tahun 2008 - 2012

Sub Sektor	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012 *
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PERTANIAN	4,37	4,37	3,77	3,25	3,10
a. Tanaman Bahan Makanan	0,89	0,84	0,73	0,61	0,54
b. Perkebunan	1,25	1,38	1,23	1,16	1,22
c. Peternakan	0,38	0,38	0,32	0,26	0,24
d. Kehutanan	1,27	1,15	0,92	0,71	0,60
e. Perikanan	0,58	0,62	0,57	0,51	0,49

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Publikasi PDRB)

Keterangan: *) Angka sangat sementara

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan dalam RPJMD 2011-2015 selalu meningkat tiap tahunnya. Namun realisasinya justru sebaliknya, terjadi penurunan terlihat pada Tabel 3.86 dan Tabel 3.87. Persentase sektor pertanian terhadap PDRB dengan Migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012 berturut-turut sebesar 4,37 persen, 4,37 persen, 3,77 persen, 3,25 persen dan 3,10 persen. Demikian pula, persentase sektor pertanian terhadap PDRB tanpa Migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012 berturut-turut sebesar 29,38 persen, 29,17 persen, 27,50 persen, 25,63 persen dan berdasarkan penghitungan sementara BPS Kabupaten Kutai Timur terjadi peningkatan pada tahun 2012 yakni sebesar 26,86 persen.



Tabel 2.82
Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Tanpa MIGAS Tahun 2008 - 2012

LAPANGAN USAHA	Tahun (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012*
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
PERTANIAN	29,38	29,17	27,50	25,63	26,86
a. Tanaman Bahan Makanan	5,99	5,62	5,33	4,77	4,72
b. Tanaman Perkebunan	8,41	9,22	8,94	9,20	10,58
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,56	2,50	2,33	2,08	2,05
d. Kehutanan	8,51	7,65	6,73	5,58	5,23
e. Perikanan	3,90	4,17	4,18	4,00	4,27

Sumber :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur (Publikasi PDRB)

Keterangan: *) Angka sangat sementara

Pada Tabel 3.82 kontribusi PDRB sektor pertanian berdasarkan lapangan usaha terjadi naik turun dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah Tanaman Bahan Makanan dari 5,99 persen menjadi 4,72 persen, Peternakan dan hasil-hasilnya dari 2,56 persen menjadi 2,05 persen serta kehutanan dari 8,51 persen menjadi 5,23 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah Tanaman Perkebunan dari 8,41 persen menjadi 10,58 persen dan Perikanan dari 3,90 persen menjadi 4,27 persen.

Penurunan persentase kontribusi PDRB dengan migas tersebut bukan dikarenakan turunnya produktivitas dari sektor pertanian akan tetapi karena adanya kenaikan atau pertumbuhan pada sektor lainnya, khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kemudian persentase kontribusi PDRB tanpa migas sektor pertanian juga mengalami penurunan persentasenya tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan di sektor perdagangan. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan di sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), sedangkan di semua sektor lainnya telah mengalami penurunan persentase kontribusi terhadap PDRB.

4) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel 3.82 merinci kontribusi sektor pertanian ke dalam sub-sektor yang lebih kecil yakni kontribusi pertanian palawija. Namun demikian, tidak diketahui berapa rincian kontribusi dari sub-sektor palawija dari tahun 2008-2012. Dari informasi tersebut tidak diketahui berapa persentase kontribusi palawija terhadap ekonomi pada tahun 2011. Namun demikian, dari informasi yang lain





didapatkan bahwa pada tahun 2012, kontribusi sub-sektor palawija adalah sebesar 0,54 persen, yang mana terjadi penurunan dari tahun 2010 yang kontribusinya mencapai 0,73 persen. Adapun RPJMD menargetkan kontribusi sub-sektor palawija adalah sebesar 1,43 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

5) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Pada tahun 2012, sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2011-2012. Namun jika dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan pada beberapa komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan minat petani dan peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang menjadi favorit dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2011-2013 bertambah seluas 26.659,89 Ha atau meningkat 9,15 persen dengan peningkatan produksi 608.183,68 ton atau meningkat 32,07 persen. Peningkatan produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet dan kelapa sawit yang masing-masing meningkat 263,66 ton atau 94,17 persen dan 608.930,29 ton atau 32,23 persen. Kedua komoditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan pada Tahun 2012, yaitu 7,88 persen untuk karet dan 65,12 persen untuk kelapa sawit.





Tabel 2.83
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
Luas Lahan perkebunan (Ha):					
1	Karet	5.511,71	6.928,00	8.468,30	8.779,85
2	Keapa	2.150,18	1.659,07	1.275,85	1.190,62
3	Kopi Robusta	288,85	236,45	218,97	218,54
4	Lada	233,55	264,50	352,88	347,88
5	Vanili	44,60	40,78	35,43	35,43
6	Kakao	6.965,83	6.404,40	5.253,10	4.818,40
7	Keapa Sawit	224.368,51	275.454,06	302.307,53	360.210,19
8	Aren	247,85	249,95	257,30	270,80
9	Kemiri	111,78	76,93	61,67	62,67
Jumlah		239.922,86	291.314,14	317.974,03	375.934,38
Produksi perkebunan (Ton):					
1	Karet	267,67	279,98	543,64	347,86
2	Keapa	847,40	1.000,91	583,90	344,03
3	Kopi Robusta	194,09	81,16	42,56	37,81
4	Lada	56,03	107,00	77,27	52,34
5	Vanili	0,88	10,40	5,21	5,82
6	Kakao	3.766,07	3.156,87	2.510,91	2.419,89
7	Keapa Sawit	1.096.648,48	1.889.599,19	2.519.717,36	3.314.956,01
8	Aren	2.092,16	2.262,93	2.391,45	1.478,28
9	Kemiri	8,39	6,75	4,45	3,99
Jumlah		1.103.880,95	1.896.505,19	2.525.876,75	3.319.646,02
Produktivitas (Kg/Ha)					
Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:					
1	Karet	1.063,49	712,76	1.174,98	715,50
2	Kelapa	500,00	910,56	577,31	369,14
3	Kopi Robusta	935,82	478,29	274,48	247,44
4	Lada	304,90	597,07	491,16	333,24
5	Vanili	100,57	388,69	208,32	232,60
6	Kakao	854,10	774,31	759,16	831,92
7	Kelapa Sawit	19.409,36	20.179,04	20.293,56	20.171,98
8	Aren	14.000,03	13.323,10	13.956,52	8.660,09
9	Kemiri	194,12	181,98	130,75	117,42
Jumlah		37.362,39	37.545,80	37.866,24	31.679,33

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, telah pula diikuti dengan berkembangnya industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2012, telah terbangun 19 unit pabrik CPO di Kabupaten Kutai Timur dengan total kapasitas produksi terpasang 910 ton/jam dan kapasitas terpakai 880 ton/jam.

B. Kehutanan

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seluas 3.574.760 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan lindung luasnya 13,31 persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 9,98 persen, Hutan Produksi Terbatas 39,52 persen dan hutan produksi tetap sekitar 38,19 persen.

Kawasan hutan yang dimiliki, maka hasil hutan utama berupa kayu bulat di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari kurang lebih 12 jenis kayu dari 16 jenis kayu yang umumnya ada pada hutan Kalimantan Timur seperti; meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu indah, rengas, resak dan lainnya. Di daerah ini jenis kayu yang paling banyak di eksploitasi adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai.

Tabel 2.84
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Lindung	270.726	317.200	317.200	317.200	270.489
2	Hutan Suaka Alam dan Wisata	219.385	184.764	184.764	184.764	215.742
3	Hutan Produksi Terbatas	868.778	839.200	839.200	839.200	787.652
4	Hutan Produksi Tetap	839.455	956.500	956.500	956.500	920.599
5	Hutan Tetap	1.927.618	1.980.464	1.980.464	1.980.464	2.205.534
6	Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi	1.043.716	1.043.716	1.043.716	1.043.716	1.043.716
7	Luas Hutan	2.198.344	2.198.344	2.198.344	2.198.344	2.198.344
8	Luas Wilayah	3.574.760	3.574.760	3.574.760	3.574.760	3.574.760

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Perkembangan luasan hutan di Kabupaten Kutai Timur cenderung tetap, kecuali pada tahun 2010 terjadi peningkatan dan penurunan komposisi luasan hutan. Luasan hutan yang mengalami peningkatan adalah hutan lindung bertambah



sebesar 17,17 persen, hutan produksi tetap sebesar 13,94 persen dan hutan tetap sebesar 19,20 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah hutan suaka alam dan wisata sebesar 15,78 persen serta hutan produksi terbatas turun sebesar 3,40 persen.

C. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral salah satunya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang punya peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak bumi dan batubara. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 525,43 barrel, menurun tajam dibanding tahun sebelumnya. Hal yang berbeda terjadi pada perkembangan produksi batubara, yang mencapai produksi 74,22 juta ton pada tahun 2013 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebesar 64,36 juta ton. Hasil produksi tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan penyangga terbesar ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu juga hasil tambang batubara Kutai Timur digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Tabel 2.85
Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Produksi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Minyak Bumi (barrel)	1.018.350	738.498	617.90	682,68	525,43
2	Batubara (M tons)	38.154,491	39.951,221	57.982,231	64.357,783,17	74.216,224,29

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai 88,96 persen pada tahun 2012. Bila dirinci kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B (pertambangan non minyak dan gas bumi) berkontribusi paling tinggi yakni berkisar sebesar 86,73 persen, kemudian diikuti subsektor Galian A (pertambangan minyak dan gas bumi) sebesar 1,71 persen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53 persen. Namun besarnya kontribusi terhadap PDRB tersebut harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan cadangan sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.



D. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor ini memberikan peluang Bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.93 dapat dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2009 hingga 2012 terus-menerus mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2013. Kunjungan pada tahun 2013, sebagian besar tertuju pada wisata ke pantai sebanyak 24.903 orang atau sekitar 74,72 persen. Sedangkan kunjungan menuju pegunungan sebanyak 2.309 orang atau sekitar 6,93 persen. Adapun kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi yakni sebanyak 6.116 orang atau berkisar 18,35 persen dari total kunjungan wisata yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.86
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No.	Jenis Obyek Wisata	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pantai	9.185	10.150	19.062	45.594	24.903
2	Pegunungan	4.518	4.732	4.780	4.880	2.309
3	Hutan	2.061	2.369	2.555	14.525	6.116
	Jumlah Pengunjung	15.754	17.251	26.137	64.999	33.172

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

E. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:



Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu (*backward linkage*) maupun hilir (*forward linkage*), dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun pada perkembangannya selama kurun waktu 4 tahun yaitu 2010 hingga 2013 justru mengalami penurunan baik dari jumlah rumah tangga perikanan maupun dari sisi jumlah produksi perikanan dan nilai produksi perikanan.

Tabel 2.87
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
Rumah Tangga Perikanan:						
1	Perikanan Laut	RT	8.606	4315	4.166	4.207
2	Perikanan Perairan Umum	RT	2.726	1.268	116	1.172
3	Tambak	RT	479	437	440	414
4	Kolam	RT	234	181	255	246
5	Keramba	RT	328	336	339	300
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	164	163	168	170
	Jumlah	RT	12.537	6.700	6.548	6.509
Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ton	9.974,70	5668,9	5.584,3	5.211,0
2	Perikanan Perairan Umum	Ton	2.639,10	1155,1	1.146,3	1.028,1
3	Tambak	Ton	690,60	748,6	834,8	684,1
4	Kolam	Ton	502,10	574,5	588,6	573,1
5	Keramba	Ton	272,50	356,6	403,1	348,5
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	1.570,80	1612,7	1.748,5	1.604,4
	Jumlah	Ton	15.649,90	10.116,40	10.305,60	9.449,20
Nilai Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	182.763.460	133.365.100	131.579.350	132.895.144
2	Perikanan Perairan Umum	Ribu Rp	60.329.200	31.434.200	31.226.300	31.382.432
3	Tambak	Ribu Rp	26.173.985	20.753.100	32.037.950	25.915.650
4	Kolam	Ribu Rp	12.553.030	14.568.559	17.426.140	17.058.240
5	Keramba	Ribu Rp	7.319.700	2.686.000	16.333.750	13.919.600
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	11.786.700		20.214.000	16.775.250
	Jumlah	Ribu Rp	300.926.075	202.806.959	248.819.490	237.946.316

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014



Jumlah produksi dan konsumsi ikan dari tahun 2010 hingga 2013 masih mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah produksi telah mencapai 15.649 ton pada tahun 2010 turun menjadi 9.449 ton pada tahun 2013. Hal tersebut terjadi diantaranya adanya pergeseran usaha perikanan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan jumlah rumah tangga perikanan disinyalir karena beralih mata pencaharian. Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya rumah tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil produksi yang menurun.

Meskipun suo sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun dalam pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah yang akan dihadapi. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktifitas pada umumnya masih rendah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa



besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.88
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	621,34	675,99	600,29	600,24	n.a

Sumber:
• Simeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Arus lalu lintas pengguna jalan semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu signifikan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 179,03 persen. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.89
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan (km)	1.379,30	1.616,23	1.620,23		
2	Jumlah Kendaraan [unit]	31.541	39.811	60.976		
3	Pertumbuhan (%)	22,94	24,63	37,63		

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya



dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalui darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaan jalannya aspal yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang. Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Jumlah barang yang terangkut melalui bandara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada angkutan umum lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu, juga risiko dalam perjalanan dapat diminimalkan.

B. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Luas Wilayah Produktif, Luas Wilayah Industri, Luas Wilayah Rawan Banjir, Luas Wilayah Kekeringan dan Luas Wilayah Perkotaan.

Tabel 2.90
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW, Luas Wilayah Produktif,
Industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi RTRW
2	Rencana Peruntukan RTRW
3	Rasio (1/2)
4	Luas Wilayah Produktif



No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Rasio (4/14)	-	-	-	-	-
6	Luas Wilayah Industri	-	-	-	-	-
7	Rasio (6/14)	-	-	-	-	-
8	Luas Wilayah Rawan Banjir	-	-	-	-	-
9	Rasio (8/14)	-	-	-	-	-
10	Luas Wilayah Kekeringan	-	-	-	-	-
11	Rasio (10/14)	-	-	-	-	-
12	Luas Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
13	Rasio (13/14)	-	-	-	-	-
14	Luas Seluruh Wil. Budidaya	-	-	-	-	-

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur

C. Fasilitas Bank dan Non Bank

Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait dengan fasilitas bank dan non bank. Hal ini mengingat bahwa aktivitas perekonomian yang semakin tinggi akan selalu membutuhkan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana pembayaran, perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.91
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bank Umum					
	Konvensional	-	6	7		
	Syariah	-	-	1		
2.	BPR					
	Konvensional	-	-	1		
	Syariah	-	-	-		

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

D. Ketersediaan Air Bersih

Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80 persen kebutuhan fisik manusia adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap melakukan kegiatan sosial ekonomi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Air bersih yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah) dari tahun 2000 hingga 2008 mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa transisi dimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru 5,95 persen rumah tangga



yang mendapat saluran air bersih, dan terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 12,36 persen. Namun pada tahun 2007-2008 turun menjadi sekitar 12,07 persen dan 11,81 persen pelanggan yang mendapat layanan air bersih.

Rumahtangga pengguna air bersih untuk minum tdk hanya bersumber dari PDAM. Dari tabel yang ada sumber air minum rumahtangga banyak yang menggunakan air sungai. Pada tahun 2007 berturut-turut dari persentase terbanyak sumber air yang digunakan adalah 25,40 persen rumah tangga menggunakan air sumur tidak terlindung, 24,33 persen rumah tangga menggunakan air sungai, dan 16,01 persen menggunakan air ledeng (PDAM) untuk air minum.

Tabel 2.92
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih (%)
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sumber Air Bersih	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ledeng (Perpipaan)	16,01	4,94	5,19	-	-
2	Sumur Lindung	12,43	11,31	13,15	-	-
3	Sumur Tidak Terlindung	25,40	15,74	15,65	-	-
4	Mata Air Terlindung	1,01	5,94	0,22	-	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	1,81	4,01	0,22	-	-
6	Sungai	24,33	20,43	12,85	-	-
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8	Air Hujan	5,33	9,64	6,85	-	-
9	Air Kemasan	12,23	25,16	39,54	-	-
10	Leinnya	-	-	-	-	-
11	Tctal Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	-	-	-	-
12	Jumlah Rumah Tangga	53.481	65.014	77.031	-	-
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	-	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Bila dilihat jumlah pelanggan air bersih dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan itu adalah peningkatan volume air bersih yang digunakan Tahun 2000 jumlah pelanggan mencapai 2.246 pelanggan dengan debit air baku utama 940.068 m³ dan meningkat pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapa 5.329 dengan debit air baku mencapai 3.650.000 m³. Persentase air yang digunakan terhadap air baku yang tersedia pada tahun 2000 sebesar 53,27 persen dan ditahun 2008 turun menjadi 37,03 persen. Dengan kata lain peningkatan pelanggan belum maksimal bila melihat masih rendahnya pemanfaatan air bersih yang tersedia.



E. Fasilitas Listrik dan Telepon

1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73 persen rumahtangga yang mendapat aliran listrik PLN, dan turun ditahun 2002 menjadi 26,71 persen. Persentase pemenuhan listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 32,43 persen, namun turun kembali hingga sekitar 29,94 persen rumahtangga pelanggan listrik.

Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggan, penggunaan listrik masih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Tahun 2000 sekitar 93,59 persen pelanggan listrik adalah rumahtangga dari 10.460 jumlah pelanggan, dan ditahun 2008 turun menjadi 91,48 persen adalah rumahtangga dari 15.507 pelanggan dan selebihnya digunakan untuk usaha dan penerangan fasilitas umum.

Produksi listrik di Kutai Timur setiap tahun mengalami lonjakan pemakaian yang cukup tajam. Pada tahun 2000 produksinya mencapai 24.952 MWH dan meningkat tajam menjadi 72.808,06 MWH ditahun 2008 atau naik sekitar 65 persen. Dari produksi listrik yang ada terjual sebesar 24.717 MWH ditahun 2000 dan 66.625 MWH ditahun 2008. Atau jika diprosentasekan dari hasil yang diproduksi pada tahun 2000 terjual 99,06 persen dan turun ditahun 2008 menjadi 91,51 persen.

Masih rendahnya persentase kemampuan PLN dalam memenuhi fasilitas penerangan rumahtangga, maka untuk memenuhi kebutuhan listrik rumahtangga diperoleh dari berbagai sumber penerangan. Selama tahun 2000 hingga 2008 sekitar 22,52 persen menggunakan listrik non PLN dan selebihnya terutama untuk daerah pedesaan menggunakan non listrik seperti petromak, pelita dan sentir. Dari data yang ada ternyata pelanggan listrik PLN yang ada hanyalah pada kecamatan-kecamatan tertentu saja. Dari 18 kecamatan yang ada yang teraliri listrik PLN 61,11 persen (11 kecamatan).

Tabel 2.93
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kebutuhan						
	- Rumah tangga	MWH	60.949,68	50.820,55	55.656,38		
	- Komersial	MWH	3.544,59	11.895,32	14.322,00		
	- Publik	MWH	2.131,05	7.899,77	7.855,68		
	- Industri	MWH	-	-	-		
2.	Susut & Losses (T&D)	MWH	4.425,14	6.787,88	6.811,75		



No	Uraian	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Susut Pemakaian Sendiri	MWH	1.757,60	1.297,94	189,08	.	.
4.	Total Susut & Losses	MWH
5.	Faktor Beban	MWH
6.	Produksi	MWH	72.808,06	78.048,40	86.794,91	.	.
7.	Beban Puncak	MWH
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MWH	23.504,00	25.143,00	32.480,00	.	.

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

2. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Tabel 2.94
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RT dengan daya 450 watt	496	510	.	.	.
2.	RT dengan daya 900 watt	14.186	14.092	.	.	.
3.	RT dengan daya 1.300 watt	825	957	.	.	.
4.	RT dengan daya 2.200 watt
5.	RT dengan daya > 2.200 watt
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	14.186	14.092	16.255	.	.
7.	Jumlah Rumah Tangga	53.481	65.014	77.031	.	.
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	26,52	21,67	21,10	.	.

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Kalimantan Timur Dalam Angka 2012
- Data diolah

F. Ketersediaan Penginapan

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari luar untuk mengadu nasib. Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka memerlukan tempat tinggal sementara. Tempat singgah sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dari lokal maupun asing.



Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari Tabel 2.96 berikut. Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup cepat terutama dari tahun 2008 (79 buah) meningkat hingga tahun 2010 jumlah penginapan maupun hotel telah berubah menjadi 85 buah.

Tabel 2.95
Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Sarana/Prasarana	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah penginapan/Hotel	79	82	85		
2	Jumlah Kamar	1.177	1.230	1.290		
3	Jumlah Tempat Tidur	1.710	1.830	1.950		

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Ketersediaan kamar juga mengalami peningkatan cukup berarti terutama pada tahun 2006 sebanyak 814 kamar menjadi 1.177 kamar, bahkan melonjak menjadi 1.290 kamar pada tahun 2010. Perkembangan jumlah tempat tidur untuk memenuhi permintaan para pendatang juga mengalami lonjakan dari tahun 2006 (1.256 buah) melonjak menjadi 1.710 buah tempat tidur. Hingga tahun 2010 jumlah tempat tidur telah berjumlah 1.950 buah. Bila melihat perkembangan pendatang/imigran yang terus-menerus meningkat, maka sangat dimungkinkan kebutuhan akan jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur masih terus meningkat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Berdasarkan tampilan data pada Tabel 2.96 berikut dapat dilihat uraian tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Dari tahun ke tahun angka kriminal yang terjadi mengalami penurunan yang signifikan. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 angka tindak pencurian terjadi kenaikan kejadian perkara menjadi 93 kasus dari sebelumnya di tahun 2008 sebanyak 85 kasus



Tabel 2.96
Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah kasus Narkoba	11	18	22		
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	1	2		
3	Jumlah Kejahatan Seksual	2	8	5		
4	Jumlah kasus Penganiayaan	31	34	27		
5	Jumlah kasus Pencurian	83	75	93		
6	Jumlah kasus Penipuan	7	7	7		
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	-	1		
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 thn	317	225	220		
9	Jumlah Penduduk	213.762	245.815	262.972		
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,001	0,001	0,001		

Sumber:
- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

B. Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan.



Tabel 2.97
Lama Proses Perijinan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

No	Uraian	Lama mengurus (hari)
(1)	(2)	(3)
1	SUP	3 sd 7 hari kerja
2	TDP	3 sd 7 hari kerja
3	SUJK	5 hari kerja
4	IMB	14 hari kerja
5	HO	10 hari kerja

Sumber: Badan Perijinan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur

C. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penentu pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajak maupun retribusi sebagai sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan (SKPD/lembaga) dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya.

Selama periode 2008-2012 jumlah obyek pajak tidak mengalami peningkatan. Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut terus mengalami peningkatan yakni dari tahun 2008 sebanyak 18 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2010. Dan angka 18 tersebut terdapat 4 jenis retribusi yang dikategorikan mendukung iklim investasi. Adanya retribusi yang mendukung investasi ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Kebijakan yang terkait dengan retribusi yang mendukung iklim investasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.



1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Proses pembangunan dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas seseorang. Produktivitas inilah yang berperan dalam penggerak pembangunan. Dari sumber daya manusia yang berketrampilan dan berproduktivitas pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kalimantan Timur masih memerlukan upaya serta kerja keras. Dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 191 orang dan lulusan S3 hanya 3 orang, maka rasio lulusan sarjana S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk hanya berkisar 0,0074. Tentu saja rasio ini masih memerlukan upaya usaha keras untuk meningkatkan jumlah sekaligus rasio mencapai jenjang lebih baik.

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh penduduk dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan penduduk dalam periode tersebut mencapai angka 51 pada tahun 2009. Angka 51 mengisyaratkan bahwa dari 100 penduduk bekerja akan menanggung 51 penduduk yang tidak bekerja. Berdasarkan hal itu juga bahwa salah satu penyebab tingginya rasio ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan masih tingginya angka fertilitas terutama pada penduduk muda yakni kelompok 15 tahun ke bawah. Namun demikian pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terjadi penurunan rasio ketergantungan dimana tahun 2013 sebesar 38.

Tabel 2.98
Rasio Ketergantungan Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	106.884	144.542	140.225
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	9.422	8.327	11.149
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	116.306	152.869	151.374
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	314.559	360.983	398.055
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	37	42	38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 (diolah).



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 untuk implementasinya tahun ke-3 sesuai dengan prioritas pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2013 maupun evaluasi dengan indikator-indikator RPJMD dapat dijabarkan berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.99 di bawah ini:



Tabel 2.99
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka melek huruf	97,80%	98,28%	Disdik
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka rata-rata lama sekolah	8,62	8,49	Disdik
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	minimal 96%	119,88%	Disdik
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	minimal 97%	101,31%	Disdik
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	70,63%	82,58%	Disdik
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	minimal 97,30%	99,66%	Disdik
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Minimal 76%	68,53%	Disdik
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	60%	60,78%	Disdik
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	Minimal 99%	99,66%	Disdik
1.01.34	Program Pembinaan dan Pembudayaan Olah Raga	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	Minimal 96%	97,01%	Disdik
1.01.41	Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 74,56%	60,78%	Disdik
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	43,95%	59,55%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
		Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah (SMP)	43,22%	56,29%	
		Rasio guru/ murid (SD)	Minimal 99%	14,98	
		Rasio guru/ murid (SMP)	Minimal 96%	13,09	
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA/SMK)	44,48%	39,6%	
		Rasio guru terhadap murid	28,01%	-	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Diatas 90%	-	
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Diatas 90%	-	
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Minimal 95%	67,12	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09%	0,10%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,21%	0,19%	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,21%	0,20%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	minimal 99%	99,94%	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	minimal 99%	99,00%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91,55%	94,50%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Minimal 97,5%	95,38%	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,79%	64,68	

Bab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.02.	Kesehatan				
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka kelangsungan hidup bayi	92,67	85,44	Dinkes, RSUD
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka usia harapan hidup	70,91	-	Dinkes, RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rasio posyandu per satuan balita	11,37	5,73	Dinkes, RSUD
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio puskesmas, poliklinik, pusat per satuan penduduk	Minimal 0,45	-	Dinkes, RSUD
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Minimal 0,02	0,02	Dinkes
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39	0,39	Dinkes
1.02.16	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74	2,51	Dinkes
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	62,42%	Dinkes, RSUD
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %	98,69%	Dinkes, RSUD
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Oesa/kelurahan Universal Child Immunization [UCI]	Minimal 55 %	73,33%	Dinkes
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100%	Dinkes
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Minimal 70%	42,90%	RSUD
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %	100%	Dinkes



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	84%	24,38%	RSUD
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %	61,85%	RSUD
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan puskesmas	Minimal 105,56 %	116,67	RSUD
1.02.28	Program Kerjasama Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas pembantu	74,15%	84,44	Dinkes
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Dinkes
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan				Dinkes, RSUD
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				Dinkes
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat				Dinkes
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
1.03.	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%		DPU
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Jaringan Irigasi	70%	75%	DPU
1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio tempat ibadah per satuan [seribu] penduduk	3.00	2.94	DPU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70,0%		DPU
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	Sesuai Standart	27,71	DPU
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80%		DPU
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %	134%	DPU
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Rasio permukiman layak huni	58,80%	85%	DPU
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rasio panjang jalan dilatu Roda 4	0,0056	80	DPU
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15	0,1	DPU
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,07%	0,16	DPU
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	68%		DPU
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30,94%	40,50%	DPU
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	58,56%	74,99	DPU



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.03.37	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				DPU
1.03.38	Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur				DPU
1.03.39	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan				DPU
1.03.40	DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota				DPU
1.03.41	DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota				DPU
1.03.42	Sewa/olala Bidang Cipta Karya				DPU
1.04.	Perumahan				
1.04.19	Program Peningkatan Kesegaaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rumah tangga pengguna air bersih	75.44	-	DPU
		Rumah tangga pengguna listrik	Minimal 30 %	-	
		Rumah tangga ber-Sanitasi	70.0%	-	
		Rumah layak huni	Minimal 85 %	134%	
1.05.	Penataan Ruang				
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	minimal 40%	-	BPLTR
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	naik minimal 10%	100%	BPLTR

Tab 11. Evaluasi Matrik Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung jawab
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%		
		Ketaatan terhadap RTRW	100%		
1.06.	Perencanaan Pembangunan				
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Bappeda
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Bappeda
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Bappeda
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Bappeda
1.06.15	Program Pengembangan data/informasi				Bappeda
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah				Bappeda
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi				Bappeda
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya				Bappeda
1.06.25	Program Perencanaan Tata Ruang				Bappeda
1.07.	Perhubungan				
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angkutan Umum Darat	79.860		Dishub
1.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Angkutan Umum Laut/ Udara	567		Dishub



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio ijin trayek	0.11	-	Dishub
1.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah uji kir angkutan umum	317	-	Dishub
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terminal	11	12	Dishub
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	Pelabuhan Laut	2	2	Dishub
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pelabuhan Udara	11	11	Dishub
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan darat	0.65	-	Dishub
1.07.19	Program peningkatan dan penjaminan lalu lintas	Kepermilikan KIR angkutan umum	1.00	-	Dishub
1.07.20	Program peningkatan kelaikan peroperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Maksimal 1 hari	25-26 menit	Dishub
1.07.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Sesuai Standart	-	Dishub
1.07.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemasangan Rambu-rambu	Sesuai Standart	-	Dishub
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1.16%	-	
		Jumlah orang/berang melalui denmaga/bandara/ terminal per tahun	Meningkat	Meningkat	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.08.	Lingkungan Hidup				
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penanganan sampah	70%		BLH
1.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penduduk berakses air minum	minimal 60 %		BLH
1.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Luas pemukiman yang tertata	naik minimal 10%		BLH
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	32%		BLH
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengendalian Persampahan	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	44%		BLH
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	100%		BLH
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan penetapan status mutu air	29%		BLH
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Minimal 80 %	67	BLH
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %		BLH
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dari jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan hijau (RTH)	Penegakan hukum lingkungan	40%	100	BLH
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	52%		BLH
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				BLH



Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam				BLH
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial				BLH
1.09.	Pertanahan				
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase luas lahan bersertifikat	Naik Minimal 10%		BPLTR
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%		BPLTR
1.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelesaian izin lokasi	100%		BPLTR
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BPLTR
1.09.16	Program Perataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				BPLTR
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				BPLTR
1.09.19	Program Pertanahan				BPLTR
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Minimal 90 %		Discapil
1.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio bayi berakte kelahiran	100%		Discapil
1.10.15	Program Perataan Administrasi Kependudukan	Rasio pasangan berakte nikah	Minimal 75 %		Discapil
1.10.16	Program Keluarga Berencana	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %		Discapil
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %		

Tab 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada Lengkap	Ada	
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	80%	-	
1.11.	Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%	-	BPPKB
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%	-	BPPKB
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio KDRT	Menurun	45,83	BPPKB
1.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	-	BPPKB
1.11.07	Program Pelaksanaan Model-modul Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35% - 50%	35-30%	BPPKB
1.11.08	Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	BPPKB
1.11.09	Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/ d 3 anak	2 s/ d 3 anak	BPPKB
1.11.10	Program PIK - KRR	Rasio akseptor KB	85.39	71	BPPKB
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Perjarasutamaan Gender dan Anak	Cakupan peserta KB aktif	85.39	85,39%	BPPKB
1.11.20	Program Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21.93%	21,39%	BPPKB
1.11.26	Program Penguatan KKB				BPPKB
1.11.27	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) /Penyediaan dukungan operasional IMP				BPPKB

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.11.28	Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS				BPPKB
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				BPPKB
1.13.	Sosial				
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40,25%	91,11%	Dinsos
1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	71,83%	89,12%	Dinsos
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Dinsos
1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Dinsos
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				Dinsos
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar				Dinsos
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				Dinsos
1.13.19	Program pembinaan pantu asuhan/panti jompo				Dinsos
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				Dinsos



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.13.21	Program Pemberdayaan Keterbangan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.22	Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial				Dinsos
1.13.23	Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana				Dinsos
1.14.	Ketnagakerjaan				
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat		Disnakertrans
1.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pengangguran terbuka	4,25 %		Disnakertrans
1.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio penduduk yang bekerja	76,07		Disnakertrans
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Pengangguran	4,28		Disnakertrans
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	2.456,31		Disnakertrans
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio ketergantungan	33,45	38	Disnakertrans
1.14.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				Disnakertrans
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja				Disnakertrans
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)				Disnakertrans
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)				Disnakertrans



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase koperasi aktif	Meningkat	Meningkat	Diskop
1.15.02	Program peningkatan sorotona dan prasarana aparatur	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Meningkat	Meningkat	Diskop
1.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah BPR/LKM	Meningkat	Meningkat	Diskop
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Diskop
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				Diskop
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kellembangan Koperasi				Diskop
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)				Diskop
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Per-koperasian				Diskop
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah				Diskop
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri				Diskop
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi				Diskop
1.16.	Penanaman Modal Daerah				
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	Meningkat	BPMD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat	Meningkat	BPMD
1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur				BPMD
1.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				BPMD
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BPMD
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				BPMD
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				BPMD
1.16.17	Program Penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				BPMD
1.17.	Kebudayaan				
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	13 kali	3	Disporpar
1.17.20	Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	13 kali	4	Disporpar
1.17.21	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	Disporpar
1.17.22	Evaluasi Pelaporan Keanekaragaman Budaya	Jumlah gedung Kesenian	3		Disporpar
1.17.23	Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah				Disporpar
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya				Disporpar
1.17.26	Membangun Mitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat				Disporpar



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.17.27	Membangun Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Pemuda dan Olah Raga				Disporpar
1.18.					
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah organisasi pemuda	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	38	Disporpar
1.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah organisasi olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	43	Disporpar
1.18.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	5	Disporpar
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	16	Disporpar
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Gelombang / balai remaja (selain milik swasta)	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	.	Disporpar
1.18.20	Program Pembinaan dan Peningkatan Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	.	Disporpar
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	3	.	Disporpar
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga				Disporpar
1.18.25	Program Pembinaan Olahraga Berbakat				Disporpar
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan DKP	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	.	Bakesbang
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	.	Bakesbang
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur				Bakesbang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Bakesbang
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Bakesbang
1.19.16	Program penanggulangan kenetribmas dan pencegahan tindak kriminal				Bakesbang
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				Bakesbang
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				Bakesbang
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Diri Masyarakat Daerah				Bakesbang
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ratio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat		
1.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Unmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat		
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Ratio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Naik Minimal 10% dari sebelumnya		
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pertumbuhan ekonomi	Minimal 7%		
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kemiskinan	7,13	5,87	
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kalambeagaan Pemerintahan Daerah	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penegakan PERDA	100%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	.	
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%	.	
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	.	
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Sistim Informasi Manajemen Pemda	ada	ada	
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDJH	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	minimal 90%	.	
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pememksa dan aparatur pengawasan	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	7.682,007	.	
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jenis dan jumlah bank dan cabang	16	26	
1.20.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Angka kriminalitas	maximal 6,50	.	
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Lama proses perijinan	3 hari	.	
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	27 macam	.	
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri				
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
	Pemerintah Luar Negeri				
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan				
1.20.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Desa				
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia				
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah				
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perikonomian				
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
1.20.48	Program Peningkatan Pelayanan Aktual/Keagamaan				
1.20.49	Program Pengembangan Kegiatan				
1.20.50	Program Pendidikan dan Pengembangan				
1.20.51	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan				
1.21.	Ketahanan Pangan				
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	BKPP
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pangan utama	45.793	43.170	BKPP
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				BKPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				BKPP
1.21.15	Program Peningkatan Keselamatan Potoni				BKPP
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan				BKPP
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				BKPP
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	13	Bapemas
1.22.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	135	Bopemas
1.22.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Posyandu aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	195	Bapemas
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				Bapemas
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				Bapemas
1.22.21	Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan				Bapemas
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas Ketermbagaan Pemerintah Desa				Bapemas
1.24.	Kearsipan				
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Kantor arsip
1.26.	Perpustakaan	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan		Kantor arsip



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat		Kantor arsip
1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat		Kantor arsip
1.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Kantor arsip
1.26.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				Kantor arsip
2..	Usuran Pilihan				
2.01.	Pertanian				
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar produksi padi (ton)	52 kw/ha/ tahun	44,65 kw/ha/ tahun	Distan, Disbun
2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		45.793		Distan, Disbun
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	5.73%		Distan, Disbun
2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1.11%		Distan, Disbun
2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.86%		Distan, Disbun
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	100%		Distan, Disbun
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	9.19 Juta		Distan, Disbun
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan				Distan, Disbun
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan				Distan, Disbun
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh				Distan, Disbun



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.01.21	partanian/perkebunan lapangan				
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				Distan, Disbun
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				Distan, Disbun
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				Distan, Disbun
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				Distan, Disbun
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				Distan, Disbun
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman				Distan, Disbun
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan				Distan, Disbun
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				Distan, Disbun
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan				Distan, Disbun
2.02.	Kehutanan				
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	44%		Dishut
2.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kerusakan Kawasan Hutan	22%		Dishut
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PORB	1,40%		Dishut
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan				Dishut
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan				Dishut
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan				Dishut



Kode	Ususn/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan				Dishut
2.03.	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	Pertambangan tanpa ijin	0%		Distamben
2.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana administrasi	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	80,01%		Distamben
2.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Distamben
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Distamben
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Distamben
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				Distamben
2.03.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas				Distamben
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral IKT				Distamben
2.03.21	Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan				Distamben
2.03.22	Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar				Distamben
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur				Distamben
2.03.24	Program Penyusunan Perda Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur				Distamben
2.04.	Pariwisata				
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	23.251	24.950	Disperpor



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRE	0.25%		Disparpor
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan				Disparpor
2.05.	Keluhan dan Perikanan				
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produksi perikanan	100%		Diskantlaut
2.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Konsumsi ikan	65.64%		Diskantlaut
2.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan bina kelompok nelayan	77%		Diskantlaut
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Produksi perikanan kelompok nelayan	80.26%		Diskantlaut
2.05.07	Program Peningkatan Kerjasama				Diskantlaut
2.05.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Diskantlaut
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				Diskantlaut
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pendendalian sumberdaya kelautan				Diskantlaut
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam perdayagunaan sumberdaya laut				Diskantlaut
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat perikanan				Diskantlaut
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan				Diskantlaut
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				Diskantlaut
2.05.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan				Diskantlaut



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				Diskanalaut
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				Diskanalaut
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan				Diskanalaut
2.05.27	Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan				Diskanalaut
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil				Diskanalaut
2.06.	Perdagangan				
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDHB	5.96%		Disperindag
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu USD)	4.940.967		Disperindag
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.	Industri				
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kontribusi sektor Industri terhadap PDHB	0.35%		Disperindag
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pertumbuhan Industri.	Minimal 1		Disperindag
2.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Disperindag
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Disperindag
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Disperindag
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				Disperindag

*Sub 11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	SKPD Penanggung Jawab
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Disperindag
2.07.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Disperindag
2.08.	Kotranomigrasi				
2.08.18	Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi				Disnakertrans



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Penelaahan Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan isu-isu strategis yang bertujuan mendapatkan pokok-pokok kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah *Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*. Penjabaran visi ini ke dalam untai program dan rencana aksi dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan lima agenda yakni:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Penegakan pilar demokrasi
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014, dan khusus untuk tahun 2014 adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, RKP 2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMN 2010-2014. Informasi tentang sasaran yang sudah diperkirakan tercapai, sasaran yang membutuhkan kerja keras, dan sasaran yang sangat sulit dicapai diperlukan untuk menentukan program-program yang perlu mendapat perhatian lebih. Dengan demikian, *gap* antara sasaran RPJMN dengan perkiraan realisasi hingga tahun 2013 dapat diidentifikasi. Dengan memperhatikan kebutuhan akan penguatan ekonomi dan penggenapan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2014, serta



memperhatikan agenda pembangunan RPJMN 2010-2014, maka RKP 2014 ditetapkan dengan tema:

"Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan"

Dalam rangka mewujudkan kemantapan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang ada diantaranya:

Reformasi birokrasi dan tata kelola, pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi persepsi yang keliru bahwa reformasi birokrasi identik dengan kenaikan remunerasi, komitmen pimpinan belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi pada instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat khususnya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Pada aspek kelembagaan, masih dihindangi masalah dengan postur birokrasi instansi pusat dan daerah, yang belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi dan ukuran. Pada aspek SDM aparatur, masih menghadapi permasalahan dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik belum optimal dalam pelaksanaannya karena keterbatasan sumber daya dan regulasi.

Pendidikan, permasalahan yang masih dihadapi dan harus diupayakan pemecahannya untuk mencapai target pembangunan pendidikan tahun 2014 diantaranya: 1) masih belum meratanya akses pendidikan, terutama di jenjang SMP, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, 2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan yang ditandai oleh pengetahuan dan ketrampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing, 3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan jumlah guru yang telah tersertifikasi, 4) belum optimalnya pendidikan berkarakter yang ditandai dengan munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak usia sekolah. Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru, meningkatkan pemerataan distribusi guru, mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah



dan ruang kelas yang rusak, meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas, meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan.

Kesehatan, permasalahan yang memerlukan perhatian antara lain: 1) masih tingginya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas tenaga, jaminan pelayanan kesehatan; 2) upaya preventif dan promotif belum dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan *antenatal care*; 3) belum terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, dan perbatasan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak; 4) belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi; 5) belum optimalnya upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; 6) belum optimalnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; 7) belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: 1) program jaminan kesehatan bagi masyarakat masih ditemukan kendala pendataan peserta di lapangan; 2) permasalahan yang masih dihadapi dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yakni ketidaktepatan penetapan penerima dan waktu penyaluran sehingga manfaat BSM kurang efektif; 3) rendahnya pemakaian kontrasepsi bagi penduduk miskin dikarenakan oleh pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi KIE program belum merata jangkauannya; 4) PKH menghadapi kendala cakupan dan manfaat masih terbatas sehingga dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kurang signifikan; 5) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui PNPM-MP masih relatif rendah komitmen daerah dalam pengalokasian dana; 6) belum optimalnya upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya: 1) penanggulangan perubahan iklim yakni kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi sebagai basis penghitungan status tingkatan emisi GRK, rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas SDM di daerah dalam menyusun rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca, masih luasnya lahan kritis, belum adanya lembaga yang mengelola hasil rehabilitasi, masih rendahnya



keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan; 2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yakni masih terjadinya pencemaran lingkungan, masih rendahnya kapasitas SDM dan institusi pengelola serta masih rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM untuk mengoperasikan KPH serta penyuluh kehutanan, perambahan dan penebangan liar karena masih tingginya luasan hutan yang belum dibebani hak/izi; 3) penanggulangan bencana yakni ketersediaan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini serta kapasitas antisipatif yang kurang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang belum memadai dan keterbatasan SDM penanggulangan bencana di daerah, belum optimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi pengurangan resiko bencana, masih rendahnya komitmen dan kemampuan pendanaan pemerintah untuk penanggulangan bencana serta belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.

Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi diantaranya: 1) belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal, hal ini karena rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah; 2) kurangnya dukungan infrastruktur jalan, transportasi, energi dan telekomunikasi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; 3) program-program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dan perbatasan; 4) rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal dan perbatasan yang tercermin dari terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kesehatan dan umumnya belum terdistribusi secara merata di desa-desa terpencil dan terisolir.

B. Penelaahan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Penelaahan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Pemerintah Provinsi terpanjang, yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan mempertimbangkan tantangan lima tahun kedepan. Visi pembangunan RPJMD



2009-2013 Provinsi Kalimantan Timur adalah *"Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera"*.

Untuk mewujudkan visi pembangunan 2013 pemerintah provinsi menterjemahkan visi tersebut kedalam misi sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai *"Island of Integrity"*, adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem demokrasi yang kondusif, adalah membangun interaksi infrastruktur dan supra struktur politik yang demokratis di daerah; peningkatan wawasan kebangsaan; terbangunnya sarana dan prasarana keamanan; mewujudkan komponen-komponen cadangan dan pendukung Hankam.

Ketiga, mewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan terpencil adalah mempercepat pembangunan infrastruktur; pemenuhan kebutuhan dasar; tersedianya kebutuhan pokok dengan harga yang layak; melakukan kerjasama pembangunan antar Negara, Provinsi dan Kabupaten; membentuk Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil; mengembangkan perekonomian melalui berbagai sektor unggulan; serta mengembangkan dan meningkatkan sistem pengamanan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

Keempat, mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan regulasi pemanfaatan sumber caya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan ekspor migas dan non migas serta menurunkan impor migas dan non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan



budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa, dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima, mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik 600 MW dengan membangun PLTU, PLTG, PLTMG, PLTD, PLTH; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.000 unit; penuntasan dan pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan dermaga penyebarangan.

Keenam, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen; membangun sekolah unggulan berstandar internasional di setiap kab/kota; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap dan UGD minimal satu buah di setiap kecamatan; mendorong kegiatan olah raga, peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif, serta mengembangkan ketransmigrasian melalui pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi peringkat 3.

Ketujuh, mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan peranguangan/pengentasan masyarakat miskin adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu; meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berusaha.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur tahun 2014 merupakan perjabaran dari hasil analisis terhadap:

1. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2009-2013 yang belum tercapai
2. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2014
3. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP tahun 2014)
4. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan



Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013. Penekanan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2014.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2014 ditetapkan kebijakan pembangunan ditekankan pada penajaman seluruh program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 untuk mendukung penguatan keterkaitan (konektivitas) pembangunan antar pusat-pusat pertumbuhan. Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/ sektor dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah. Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2014. Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*.

Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD 2014 ditetapkan dengan tema : "Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumberdaya Alam Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumberdaya Aparatur".

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah menurut prioritas pembangunan daerah maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) alih fungsi lahan pertanian; 2) rendahnya produktivitas pertanian; 3) kurangnya luasan lahan pertanian; 4) kurangnya sarana dan prasarana (irigasi) pertanian; 5) keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian.

Pengentasan Kemiskinan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin belum optimal; 2) partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal; 3) kemitraan BUMN/ BUMD/ Irvestasi swasta dalam pemberdayaan UMKM belum optimal; 4) belum terintegrasinya program kegiatan sektoral untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan; 5) belum



terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat miskin; 6) masih terdapat penyaluran Raskin yang kurang tepat sasaran.

Perluasan Kesempatan Kerja, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) kompetensi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; 2) masih terdapat 187.362 orang miskin yang tidak bekerja (Hasil PPLS 2011); 3) laju peningkatan pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja; 4) tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK); 5) perempuan masih belum memiliki peluang besar bekerja di sektor non pertanian (industri, pertambangan, dan lain lain); 6) sektor ekonomi yang berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) rendahnya kualitas produk UMKM; 2) minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM; 3) rendahnya akses permodalan; 4) keterbatasan fasilitas pendukung usaha.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) masih rendahnya kualitas pelayanan publik; 2) rendahnya kualitas SDM aparatur; 3) belum optimalnya penataan sumberdaya aparatur sesuai standar kompetensi.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) menurunnya mutu lingkungan, akibat alih fungsi lahan; 2) meningkatnya kerusakan/pencemaran lingkungan perairan; 3) kerusakan Hutan Mangrove; 4) penegakan hukum lingkungan tidak efektif; 5) perencanaan belum berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Daya saing ekonomi daerah, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) Peraturan Daerah terkait Investasi ;2) rendahnya Prosentase Rencana Investasi dibandingkan dgn Realisasi Investasi; 3) belum ditetapkannya RTRW Prov dan beberapa RTRW Kab/Kota; 4) kompetensi Tenaga Kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; 5) rendahnya infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan; 6) belum memadainya kualitas infrastruktur: destinasi pariwisata, promosi paket wisata dan jasa pendukung pariwisata.

Perluasan akses dan pelayanan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) belum meratanya prasarana dan sarana pendidikan bagi masyarakat. 2) masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan pendidikan; 3) relevansi pendidikan belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja; 4) tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi kualifikasi S1.



Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal; 2) terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis; 3) masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular.

Pembangunan Infrastruktur, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) belum tercapainya kondisi jalan mantap provinsi yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 2) fasilitas sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) belum representatif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat; 3) kualitas sarana dan prasarana pengendali banjir belum berfungsi secara optimal; 4) belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak; 5) terhambatnya aktivitas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan jembatan.

Pemenuhan Daya Listrik, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) daya listrik PLN yang belum memenuhi kebutuhan; 2) jaringan transmisi listrik yang belum memadai; 3) pengembangan energi baru dan terbarukan belum berjalan secara optimal; 4) diversifikasi bahan bakar.

Pembangunan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan; 2) belum terdapatnya Tenaga Kesehatan di kawasan perbatasan; 3) belum tersedianya sarana transportasi dan Jembatan yang memadai di kawasan perbatasan; 4) belum terdapatnya Bandara di kawasan perbatasan yang representatif dalam menunjang mutu pelayanan; 5) belum tersedianya dermaga yang representatif dalam menunjang mengoptimalkan pelayanan transportasi sungai dan danau; 6) jaringan transmisi listrik belum menjangkau seluruh kawasan perbatasan.

G. Kebijakan Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2014 yaitu *Memantapkan Perekonomian Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan*

Salah satu yang terkandung dalam tema tersebut adalah:

1. Pemertahanan Perekonomian Nasional, dengan:

a. Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiringi oleh: tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang



stabil dan kompetitif, neraca pembayaran yang seimbang, serta fiskal yang berkelanjutan.

- b. Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan dengan:
 - a. Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia
 - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran
 - c. Mitigasi bencana
 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik dengan:
 - a. Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali
 - b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
 - c. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,6-6,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 8,0-10,0 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, apabila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keseragaman pasokan sepanjang waktu.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin





pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan, sehingga proses perjalanan sejarah bangsa ini berada dalam sebuah kontinuitas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan, apabila proses *checks and balances* berjalan dengan baik.

Memperhatikan dan mencermati uraian tersebut di atas, guna menghadapi tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" dengan penjelasan sebagai berikut:

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (*climate change*) mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (*climate change*) tersebut.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya.



Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tetapan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten. Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014. Namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Pertama: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang ditubuhkan pada proses pelaksanaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.





Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dalam menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Ketiga: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan.

Di sisi lain, pembangunan daerah tertinggal harus terus didorong melalui pengembangan agrowisata padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling



melengkapi dan saling menguntungkan peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi, pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja, serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung desampumakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang *pro growth, pro poor, pro job dan pro green*. Paradigma tersebut telah menjadi isu global. Masyarakat dunia sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama yakni pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kerangka dasar tersebut disepakati pula dalam kesepakatan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Kesepakatan tersebut mengikat negara-negara di dunia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bangsa Indonesia, Kabupaten Kutai Timur, tidak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu tema pembangunan Kutai Timur tahun 2014: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG's Melalui Gombang Taman Makmur.

Berikut keterpaduan prioritas RKPD Nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014:



Tabel 2. 100
Keterpaduan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan
RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

No	RKP	RKPD Provinsi Kalimantan Timur	RKPD Kabupaten Kutai Timur
1	Reformasi Birokrasi dan tata kelola	Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)
2	Pendidikan	Pelayanan Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3	Kesehatan	Optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4	Penanggulangan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
5	Kecahanan Pangan	Kemandirian dan kedaulatan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6	Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman
			Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
7	Iklm Investasi dan Usaha	Daya saing ekonomi daerah	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan sektor riil	
8	Energi	Pemenuhan daya listrik	Peningkatan infrastruktur dasar pemukiman
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal	Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)
11	Kebudayaan, ekonomi kreatifitas dan inovasi Teknologi		Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12	Bidang Politik, hukum dan keamanan		
13	Bidang Perekonomian		Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
14	Bidang Kesejahteraan Rakyat		

Keterpaduan prioritas pembangunan RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan (*capacity building*), dimaksudkan untuk peningkatan ketaatan terhadap Perda, peningkatan kualitas layanan publik serta kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Prioritas ini sejalan dengan prioritas RKP Nasional yakni *reformasi birokrasi dan tata kelola* yang diarahkan



pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan *reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan* dengan sasaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dimaksudkan untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan perluasan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *pendidikan* yang diarahkan pada peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan *Pelayanan Pendidikan* yang diarahkan pada penguatan lembaga PAUD, penuntasan wajib belajar 12 tahun, pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis potensi daerah serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh buku perpustakaan yang berkualitas.
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menyefenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif, peningkatan angka harapan hidup serta penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *kesehatan* yang memprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan. Demikian pula prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur yakni



optimalisasi akses dan mutu pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

- 4) **Pengurangan kemiskinan dan pengangguran** dimaksudkan untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yakni rumah tangga miskin. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *penanggulangan kemiskinan* yang diarahkan pada perluasan program keluarga harapan, pengembangan kehidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan produktivitas usaha mikro, pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial bidang kesehatan (*demand side*). Sedangkan prioritas RKPD Kalimantan Timur yakni *pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja* yang diarahkan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin, mengoptimalkan peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
- 5) **Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**, dimaksudkan untuk penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *infrastruktur* yang diarahkan untuk penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah. Demikian pula prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur yakni *pembangunan infrastruktur* yang diarahkan pada peningkatan kondisi jalan mantap, peningkatan infrastruktur transportasi sungai dan penyeberangan serta peningkatan keselamatan jalan di ruas-ruas jalan provinsi.
- 6) **Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman** dimaksudkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta penyediaan listrik yang merata. Prioritas ini selaras dengan RKP Nasional yakni *infrastruktur dan energi* yang diarahkan penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan *regru elektrifikasi*. Demikian pula RKPD Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan *Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan daya listrik* yang diarahkan peningkatan infrastruktur sumber daya air, pengembangan sistem distribusi air minum, pemenuhan kebutuhan energi listrik, pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan sumber EBT.



- 7) Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Berbagai jenis produk unggulan pertanian (dalam arti luas) yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dan sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (*comparative advantage*). Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *iklim investasi dan iklim usaha* yang diarahkan pada peningkatan kemudahan berusaha, penurunan biaya logistic nasional, pengembangan fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru, serta memperkuat kelembagaan hubungan industrial. Demikian pula prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur yakni *pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan sektor riil* serta *daya saing ekonomi daerah* yang mengarahkan pembangunan pada pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah, menciptakan klaster industri kecil berbasis bahan baku lokal, membangun sarana prasarana pemasaran produk UMKM, peningkatan volume dan nilai perdagangan daerah, peningkatan daya saing investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kompetitif, menuju Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia, membangun dan meningkatkan infrastruktur outlet dan infrastruktur penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan industri di Kalimantan Timur.
- 8) Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan dan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini selaras dengan RKP Nasional yakni *lingkungan hidup dan pengelolaan bencana* yang diprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana. Demikian pula prioritas RKPD Kalimantan Timur yakni *pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim* yang diarahkan pada pengendalian kerusakan lingkungan dan implementasi pembangunan rendah Karbon.
- 9) Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan memperolehnya. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional Tahun 2014 yakni *ketahanan*



pangan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan, kesejahteraan petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Demikian pula RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas *kemandirian dan kedaulatan pangan* yang diarahkan untuk pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian serta peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan.

- 10) Peningkatan Pembangunan Perdesaan, dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah serta mengoptimalkan potensi pedesaan. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional tahun 2014 yakni prioritas *daerah tertinggal, terdepan terluar, dan pasca konflik* yang diarahkan untuk pembangunan daerah tertinggal. Demikian pula Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 memprioritaskan *pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal*.
- 11) Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk menyediakan, memberikan dan memfasilitasi informasi dan komunikasi masyarakat dan sistem pelayanan publik. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi* yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 12) Pengelolaan Kawasan Perbatasan (hinterland) dimaksudkan untuk penyelesaian konflik tapal batas serta peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi di kawasan tersebut. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni *daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik* yang diarahkan pada pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Demikian pula prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur yakni *pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal* yang diarahkan pada pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang pendidikan, peningkatan pelayanan tenaga media/kesehatan, pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi serta pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bidang transportasi (darat, udara dan danau/penyeberangan)



2.3.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Program

Tabel 2.101
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kualitas layanan masyarakat - Kinerja keuangan daerah masih tergolong tidak wajar - Rendahnya kualitas SDM aparatur - Belum semua SKPD optimalnya melaksanakan SPM - Masih terbatasnya ketersediaan laporan dan informasi IKM, penegakan hukum dan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kualitas pelayanan masyarakat - Rekrutmen dan distribusi aparatur sesuai kompetensi yang diperlukan - Diklat Teknis dan Fungsional - Perbaikan kinerja keuangan - Pencatatan dan pelaporan berkelanjutan
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah - Lambatnya kenaikan APM/APS sekolah lanjutan - Masih rendahnya pendidikan perguruan tinggi - Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan pendidikan, terutama pendidikan lanjut - Relevansi pendidikan belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan prasarana dan sarana sekolah (lanjutan) bagi masyarakat - Pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, terpencil dan terisolasi - Pengembangan sekolah kejuruan - Optimalisasi keberadaan pendidikan tinggi lokal - Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal. - Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis - Ketimpangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan antar wilayah (terkonsentrasi di ibukota kabupaten) - Masih tingginya angka 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan prasarana dan sarana pendukung pelayanan kesehatan - Penambahan dan pendistribusian tenaga medis/paramedik secara merata - Peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis



No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkemauan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular, - Akurasi dan <i>under reported</i> data kesehatan	- Jaminan Pelayanan Kesehatan - Kelompok rentan [balita, wanita] menjadi prioritas - Budaya masyarakat PHBS
4	Kemiskinan dan Pengangguran	- Belum optimalnya pemanfaatan jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin - Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal - Kemitraan BUMN/ BUMD/ Investasi swasta dalam pemberdayaan UMKM belum optimal - Belum terintegrasinya program kegiatan sektoral untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan - Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin	- Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan - Sinergi Program lintas Sektor untuk pelayanan kebutuhan dasar - Update data masyarakat miskin - Kemitraan CSR untuk pemberdayaan dan keberlanjutan UMKM - Kemudahan berinvestasi untuk perluasan tenaga kerja
5	Daya saing ekonomi	- Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian (agribisnis) - Kecenderungan pasang surut realisasi investasi - Belum ditetapkan perubahan RTRW - Kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja - Rendahnya infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan - Rendahnya kualitas produk UMKM - Minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM	- Optimalkan sektor pertanian sebagai basis agribisnis - Kemudahan berinvestasi - Persetujuan Substansi Perubahan Kawasan dari Menteri Kehutanan - Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja - Daya saing produk - Ketersediaan dan kemudahan modal Usaha bagi UKM (masyarakat miskin)



No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas manajemen koperasi dan keaktifan koperasi - Minimnya fasilitas lembaga jasa keuangan (BPR/LKM) untuk mendukung usaha kecil - Rendahnya akses permodalan LKM 	<ul style="list-style-type: none"> - dan penguasa kecil] - Sarana pemasaran - Promosi produk
6	Kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusutan atau Alih fungsi lahan pertanian - Rendahnya Produktivitas pertanian - Kurangnya luasan lahan pertanian - Kurangnya sarana dan prasarana (irigasi) pertanian - Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian - Ketimpangan distribusi SDM pertanian lapangan - Tidak tersedianya data NTP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan - Intensifikasi untuk peningkatan produktivitas - Ekstensifikasi untuk perluasan tanam (cetak sawah) - Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi - Revitalisasi penyuluhan pertanian
7	Infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak daerah yang belum terjangkau prasarana jalan darat (pedalaman) - Belum tercapainya kondisi jalan mantap yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - Fasilitas sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) belum representatif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat - Fasilitas sarana dan prasarana pengendali banjir belum berfungsi secara optimal - Terhambatnya aktivitas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jalan dan jembatan akses pedesaan dan ekonomi strategis - Transportasi pedesaan - Ketersediaan lahan - Tersedianya akses Listrik - Ketersediaan bahan bakar minyak dan gas - Tersedianya dokumen teknis perencanaan



No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> - Daya Mampu PLN yang belum memenuhi kebutuhan - Jaringan transmisi listrik yang belum mencukupi - Kurang lengkapnya data infrastruktur 	
8	Tata guna lahan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya mutu lingkungan, akibat alih fungsi lahan - Belum selesainya revisi RTRW - Meningkatnya kerusakan/pencemaran lingkungan perairan - Penegakan hukum lingkungan tidak efektif - Perencanaan belum berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Minimnya data lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian perizinan pembukaan lahan - Percepatan revisi RTRW - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan - Ruang terbuka hijau - Penindakan/kasus yang ditangani - Inventarisasi data lingkungan
9	Fasilitas dan Utilitas kawasan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak - Masih minimnya drainase permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses air bersih, dan sanitasi yang memadai - Penanganan sampah
10	Pembangunan Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan akses pembangunan desa - kota - Minimnya fasilitas dan keberadaan lembaga penunjang usaha pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan fasilitas kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan) - Kemudahan usaha dan permodalan (<i>bankable</i>) di daerah tertinggal
11	Batas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur dasar; - Terbatasnya Sarana Prasarana Pendidikan dan kesehatan - Terbatasnya Tenaga Kesehatan dan pendidikan dikawasan perbatasan - Belum tersedianya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sekolah terpadu - Pembangunan fasilitas dan distribusi tenaga kesehatan - Pembangunan Tower dan jaringan komunikasi - Kemudahan usaha kecil di sekitar



No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
		transportasi jalan dan jembatan yang memadai di kawasan perbatasan - Jaringan Telekomunikasi belum menjangkau seluruh kawasan perbatasan - Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan	kawasan
12	Teknologi Informasi	- Masih rendahnya budaya baca masyarakat - Masih adanya wilayah yg belum terjangkau komunikasi dan informasi	Gerakan budaya baca akses informasi ke masyarakat penyempurnaan sistem layanan publik



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan pengalaman keberhasilan di berbagai wilayah, kinerja pembangunan daerah lebih ditentukan oleh dua aspek penting, yaitu kualitas perencanaan pembangunan dan daya dukung keuangan daerah. Oleh karenanya, antara perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik tanpa didukung oleh kekuatan anggaran atau keuangan daerah yang memadai akan menemui banyak kesulitan, demikian pula sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, maka antara rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran kondisi saat ini sekaligus perkiraan kedepan tentang berbagai potensi ekonomi dan kekuatan keuangan daerah.

Gambaran umum untuk situasi perekonomian Kutai Timur tahun 2012 beserta karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2013-2014 tampak dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro hingga semester satu tahun 2013, dan estimasi tahun 2014, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-sasaran yang dimaksud tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Berdasarkan pembangunan sektoral, kontribusi sektor ekonomi menjadi salah satu pemicu sekaligus pemacu bagi sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada keberhasilan pembangunan sektor ekonomi. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ferkembangan situasi ekonomi nasional maupun global saat ini turut mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Situasi perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat resiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Resiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat, (ii) perekonomian negara-negara kawasan Asia yang mulai melemah, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat, (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Sehingga dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dipertahankan pada tahun 2013, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 (Bappenas, 2013, RKP 2014)

Dalam perjalanan tahun 2012, situasi perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa yang melebar ke negara-negara lainnya di kawasan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia. Perekonomian AS berada dalam proses pemulihan yang lambat namun masih sesuai dengan harapan. Membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, serta mulai pulihnya sektor perumahan, mendorong perekonomian AS menjadi tumbuh sebesar 2,2 persen pada tahun 2012.

Sementara itu, kekuatan ekonomi dunia lainnya yakni China terus melambat di kuartal ketiga [tahun ke tahun], walau masih tumbuh sebesar 7,4 persen tahun ke tahun, dan terdapat beberapa perkembangan positif, seperti dari output industri yang menunjukkan sejumlah percepatan dalam pertumbuhan sedang berlangsung. Sementara faktor yang kurang positif, Zona Eropa masih terus berjuang untuk keluar dari resesinya yang berkepanjangan, dan dengan PDB di kuartal ketiga relatif datar



mesasr 0,2 persen dengan penyesuaian musiman yang disetahunkan (*seasonally adjusted annualized rate*, saar) di tengah kekhawatiran melambatnya pertumbuhan dan di Jerman sebagai mesin pertumbuhan wilayah itu dan Prancis. Ekonomi Jepang juga mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (saar) di kuartal ketiga 2012 (Bank Dunia, 2012).

Sementara itu dalam konteks pembangunan nasional, berdasarkan RPJMN 2010-2014 arah kebijakan umum pembangunan nasional salah satunya adalah untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta penjaganya dan pemeliharaannya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2014 yaitu Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Terciptanya Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang lebih baik tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,6-5,7 persen, dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,1-10,7 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya untuk meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan untuk memaksimalkan kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan anggaran riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2014, perekonomian ditargetkan tumbuh sebesar 6,8 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2013 yang sebesar 6,5 persen.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada akhir tahun 2014, dan menciptakan kerja yang tercipta antara 9,6 juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan



berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan bernilai, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara-negara setara dengan Indonesia yaitu sekitar 4-6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 11,6 persen dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 12,7 persen. Dalam keseluruhan tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 6,1 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 7,0 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,7 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,8 persen dan sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1,7 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 6,2 persen; 7,3 persen; 9,6 persen; 10,5 persen; 6,1 persen; serta 5,2 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 persen pada tahun 2014 membutuhkan investasi sebesar Rp. 3.746,6- triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 15,2 persen berasal dari pemerintah dan 84,8 persen berasal dari masyarakat termasuk swasta (Bappenas, 2013, RKP 2014).

Berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, walaupun pertumbuhannya mengalami perlambatan pertumbuhan namun indikator makro ekonomi Kalimantan Timur lainnya dapat dikatakan masih berada pada jalur yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Makro ekonomi daerah yang ada seperti pada indikator penduduk miskin tercatat tahun 2012 sebesar 246,11 ribu jiwa, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7,2 ribu orang dibanding tahun 2011. Jumlah penganggur pada Agustus 2012 mengalami penurunan sebanyak 15.430 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 yang tercatat sebanyak 173.693 orang dan pada Agustus 2012 menjadi 158.263 orang. Indikator makro ekonomi daerah lainnya yaitu inflasi tercatat pada bulan Desember tahun 2012





Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,73 persen, sehingga sampai dengan bulan Desember 2012 inflasi Kalimantan Timur sudah mencapai 5,80 persen. Sedangkan pada periode yang sama inflasi tahun 2011 dan tahun 2010 masing-masing sebesar 6,35 persen dan 7,28 persen.

Memperhatikan data di atas, maka pada tahun 2014 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, maka perlu diterapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar target tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur masih relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi ke depan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi (Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014).

Berdasarkan kondisi di atas maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Melaksanakan revitalisasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Perbaiki insentif untuk kewirausahaan dan akses bagi usaha-usaha menengah, kecil dan mikro serta sektor riil lainnya.

Sementara itu, RPJMD Kabupaten Kutai Timur mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dengan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 adalah "Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro ekonomi daerah yang ada seperti penurunannya jumlah penduduk miskin dari tahun 2011 sebesar 27.432 jiwa menjadi sebesar 24.295 jiwa pada tahun 2012. Demikian pula jumlah angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 7.045 jiwa menjadi sebesar 5.096 jiwa pada tahun 2012. Capaian tersebut diperkirakan juga terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yang ditargetkan mengalami capaian yang positif. Strategi dalam mewujudkan capaian tersebut dilakukan dengan menetapkan 12 prioritas pembangunan yang meliputi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman, peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, peningkatan pembangunan pedesaan, peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*), peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup, peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*).

Namun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang cukup tinggi



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah "PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI TIMUR MANDIRI"

Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai berikut :

Pembangunan daerah bertumpu pada agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis. 2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya saing, baik ditingkat regional, nasional maupun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 diwujudkan dengan ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.
2. Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah.



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparat pemerintah daerah yang dinamis dan efisien.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Guna mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, maka ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan, sebagaimana berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kerukunan hidup beragama; • Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual; • Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni budaya lokal • Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya • Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timur • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya • Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata • Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana dan prasarana olah raga • Tercapainya peningkatan pemuda yang berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja, Pergaulan Bebas dan Miras



MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan

Tujuan	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan • Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis • Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi • Terbitnya Perda RTRW • Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW • Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan (<i>Zoning Regulation</i>) • Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan hidup • Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa • Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA • Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintah • Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikasi lahan masyarakat • Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian • Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan • Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan • Terciptanya penegakan hukum lingkungan • Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup • Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan • Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan • Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan penelitian



MISI 3 : Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah

Tujuan	Meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya tata kerja dan kelembagaan penyuluhan yang berorientasi kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan Kebutuhan Petani setempat • Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian [dalam arti luas] • Terciptanya stabilisasi luasan lahan pertanian produktif • Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan petani • Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama • Tersedianya beberapa desa mandiri pangan • Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang • Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan • Prevalensi penduduk sangat rawan pangan (defisit konsumsi energi tingkat berat) • Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi • Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung ketahanan pangan • Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan • Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada setiap kecamatan • Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti luas • Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu • Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis



- Tersedianya sarana distribusi hasil produksi pertanian
- Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran
- Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani (ternak)
- Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan
- Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat
- Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis hasil perkebunan
- Tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) perkebunan
- Terciptanya iklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif
- Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem tangkap dan ikan olahan
- Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan
- Terpenuhinya kebutuhan produksi ikan untuk konsumsi
- Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan
- Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah lingkungan
- Tawujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/pesisir atas dasar kemandirian dan kewirausahaan
- Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara optimal
- Terlaksananya identifikasi dan monitoring potensi terumbu karang Kabupaten Kutai Timur
- Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur
- Terciptanya keamahan dan ketertiban perikanan
- Termanfaatkannya potensi sumber daya lahan dan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
- Tercapainya peningkatan jumlah, kompetensi dan penyebaran penyuluh sesuai standar
- Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu dan kemasan terjamin serta berorientasi pasar
- Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif



MISI 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi

Tujuan	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya, serta berupaya lebih pemeratakan pemenuhan energi bagi masyarakat
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan • Terwujudnya pemerataan perkembangan aksesibilitas darat untuk mendukung mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonomi daerah • Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika perkotaan • Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum • Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan angkutan barang • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau • Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara • Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektor pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah • Tercapainya peningkatan pengendalian banjir dipertanian (Menurunnya persentase luasan genangan banjir) • Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan jaringan drainase • Tercapainya peningkatan ketersediaan air baku baik secara kualitas maupun kuantitas • Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat • Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas



<p>infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan fasilitas kegiatan sosial masyarakat • Tersedianya listrik pedesaan dan daerah terpencil • Tertaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengoperasian kelistrikan • Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup • Terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pemerintahan kecamatan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD
--

MISI 5 Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan

Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada peningkatan ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin dalam pembangunan pertanian dalam arti luas • Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin • Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis • Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan • Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan • Tercapainya peningkatan kemudahan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan usaha • Tercapainya peningkatan kualitas perumahan bagi rumah tangga sasaran



- Tercapainya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sasaran (RTS)
- Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan
- Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan
- Tercapainya peningkatan kontribusi program KB dalam kesejahteraan keluarga
- Terbinanya perempuan dan berkembangnya partisipasi dalam pembangunan
- Terlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan atau Sarana Usaha
- Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar parti sosial
- Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Parto Sosial
- Pelayanan sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- Bantuan sosial Korban Bencana pada masa tanggap darurat
- Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap darurat
- Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi
- Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

MISI 6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparaturn pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien

Tujuan	Meningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa, terlaksananya penegakan hukum, terlaksananya pembinaan SDM aparat penegak hukum; meningkatkan peran aparat dalam meminimalisir berbagai konflik kepentingan melalui pendekatan
---------------	---



	persuasif dan membuka ruang dialog; serta meningkatkan pembinaan politik bagi masyarakat
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif • Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugas SKPD • Terwujudnya tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait • Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor • Terlaksananya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang Menjamin Peningkatan Profesionalisme Aparatur • Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat • Terwujudnya pembinaan terhadap parpol, ormas, LSM, paguyuban • Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana • Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta dalam pembangunan politik • Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan yang efektif • Terwujudnya kemandirian penataan sarana dan Prasarana Kerja Aparatur pada instansi pemerintah • Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah • Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan investor • Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar • Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan permintaan masyarakat • Terwujudnya kemandirian dan pembinaan mental/spiritual • Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur • Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip <i>Good</i>



Governance

- Terlaksananya kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan
- Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional, ramping, luwes dan responsif
- Terpenuhinya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD
- Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam menyusun produk-produk perencanaan pembangunan
- Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan
- Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dinamis dan responsive
- Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah yang sudah berkekuatan Hukum
- Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD
- Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pernda
- Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih
- Terwujudnya kerjasama dan komunikasi dengan daerah lain
- Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan para pengusaha
- Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam pemberian izin dan operasi pasar
- Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan debirokratisasi perijinan
- Tercepatnya peningkatan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
- Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional



<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Data Objek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang Akurat • Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

MISI 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta mewujudkan adanya pelayanan prima pada pelaksana teknis penyelenggara kesehatan secara berjenjang.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan dasar • Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/anak, remaja dan lansia • Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan • Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan • Tercapainya peningkatan ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan • Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan • Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin • Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan • Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan pembangunan RSU yang representatif, serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi • Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Tercapainya peningkatan penyelidikan epidemiologis dan penanggulangan KLB


MISI 8 : Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang

Tujuan	Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf • Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni • Tercapainya peningkatan sebaran sarana pendidikan • Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (PLS) • Tercapainya peningkatan sistem manajemen pengelolaan sekolah • Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan dan Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif • Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekolah • Tercapainya peningkatan Angka Pendidikan Tamatan/ Angka kelulusan • Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun • Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang pendidikan

MISI 9 : Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya

Tujuan	Meningkatkan peran lintas sektor terutama swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. serta upaya-upaya langsung dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan bentuk intervensi keuangan pada lembaga pemodal
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan koperasi aktif • Tercapainya peningkatan koperasi sehat • Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR



<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan akses permodalan KUMKM • Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem pendukung bagi koperasi dan UMKM • Terlaksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan investasi sektor perbankan • Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal yang ditandai berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di kecamatan • Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutai Timur • Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja • Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan • Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja
--

4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan yang lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Korelasi program prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMD 2011-2015	RKPD 2014
1	Peningkatan kapasitas pemerintahan	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (4)
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan (2)
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan (3)
4	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman (9)
5	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan (6)
6	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Peningkatan pembangunan pedesaan (10)



No	RPJMD 2011-2015	RKPD 2014
7	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat (5)
8	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>) (1)
9	Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (7)
10	Peningkatan pembangunan perdesaan	Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup (8)
11	Pengelolaan kawasan perbatasan	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi (12)
12	Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	Pengelolaan kawasan perbatasan (<i>hinterland</i>) (11)

Penentuan prioritas (*top priority*) pembangunan dilakukan dengan cara pembobotan untuk menentukan skor terhadap kriteria-kriteria yang ditetapkan, meliputi: 1) Besaran pengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) Besaran dampak yang ditimbulkan terhadap publik; 4) Besaran daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dan 6) Prioritas janji politik Kepala Daerah yang perlu diwujudkan.

Hasil penentuan *top priority*, diperoleh 3 program pembangunan dengan dengan skor tertinggi yaitu 1) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Berdasarkan hasil *top priority* dapat dipilih tema pada program pembangunan RKPD tahun 2014 Kabupaten Kutai Timur yaitu: "Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian *Millenium Development Goals* [MDG's] Melalui Gerbang Taman Makmur". Kesepakatan *Millenium Development Goal's* (MDG's) tersebut mengikat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tahun 2014 merupakan momentum yang sangat penting bagi Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan komitmen terhadap kesepakatan global MDGs, mengingat pada tahun 2015 akan dilakukan evaluasi pencapaian. Kabupaten Kutai Timur akan bekerja lebih keras dan dukungan alokasi anggaran untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat sehingga dengan sendirinya sasaran MDGs dapat dicapai pada waktunya. Untuk itu, Kabupaten Kutai Timur



menyusun strategi "Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) Melalui Gerbang Taman Makmur".

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target MDGs adalah mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam pencapaian MDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata pemerintahan yang baik, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pada dasarnya setiap manusia dan bangsa yang beradap berusaha mencapai kesejahteraan dengan berbagai upaya dengan potensi diri dan ekologi. Masalah kesejahteraan yang rendah atau disebut kemiskinan, kelaparan dan kesakitan, selalu menjadi masalah aktual dari waktu ke waktu. Ketiga masalah tersebut selalu menarik perhatian, lagi jika dikaitkan dengan komitmen global dan HAM, seperti melalui MDGs. (Hardisyah, 2007). Studi yang telah dilakukan oleh Lanjouw, dkk (2001) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia (MDGs) sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan

Alokasi dana dalam APBD Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mendukung pencapaian MDG's pada tahun 2014 akan ditingkatkan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi positif Kabupaten Kutai Timur sebesar 11,39 persen yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang pada gilirannya menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan ini berkaitan dengan MDGs yang dapat dimonitor dan dievaluasi kemajuannya dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna dalam menyesuaikan perencanaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan pembangunan manusia dan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah diakui oleh Ranis dan Stewart (1998) dan (2005). Studi sejenis telah banyak



dilakukan, misalnya tentang dampak pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil proses pendidikan. Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan mengambil data panel untuk 31 provinsi di Indonesia dalam periode 1996-2002. Berdasarkan studi tersebut telah terungkap bahwa investasi sektor publik dalam bidang pembangunan manusia sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Penjelasan tentang masing-masing program menurut prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Miskin adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kemiskinan perlu mendapat perhatian serius, bukan semata karena kemiskinan itu, namun karena memiliki korelasi sangat kuat dengan berbagai masalah sosial, terutama kriminalitas dan penyakit. Bahkan dalam agama pun disebutkan bahwa "kefakiran menjadi sumber kekafiran". Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kutai Timur.

Dalam kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Oleh karena itu persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu proses pembangunan yang mengikutsertakan dan komitmen semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks and balances* berjalan dengan baik.

Apabila dihubungkan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, maka tingginya tingkat kemiskinan (rendahnya pendapatan riil masyarakat) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatif terhadap IPM. IPM



walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia, namun dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang rendah, maka dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga rendah. Oleh karena itu dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan cara peningkatan mutu dan pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/ keluarga miskin agar dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Agenda penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang diarahkan untuk peningkatan mutu SDM dan kemandirian ekonomi keluarga miskin, dengan melalui: 1) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan), 2) Pengembangan dan pemanfaatan system perlindungan sosial, 3) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan, 4) Kemudahan berinvestasi untuk perluasan penyerap tenaga kerja penduduk lokal (ber KTP Kota Timur) yang berorientasi sektor pertanian, 5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPD untuk membuat terobosan/ inovasi dalam membuat program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan maupun pengangguran yang berbasis pada problem-problem bersifat lokal.

Agar agenda-agenda pengentasan kemiskinan tersebut dapat terwujud, diperlukan komitmen dan kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemisahan maupun perlindungan usaha. Di samping itu, dalam penanggulangan kemiskinan juga memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang kondusif. Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan, etos kerja dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

Prioritas 2: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Tujuan pembangunan manusia berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan



program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warganegara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global, *Millennium Development Goals (MDGs)* yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100 persen.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dilakukan dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya-upaya : (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Agenda peningkatan lebih difokuskan pada: 1) Percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui akses pendidikan masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait penduduk migrasi; 2) Peningkatan APM SLTA; 3) Peningkatan APS SLTP dan SLTA; 4) Penurunan putus sekolah, 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan 6) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak mampu. Selain itu perlu inventarisasi angka putus sekolah.

Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi. Upaya peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di Kutim, dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif.

Peningkatan aksesibilitas kesehatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan



tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebih difokuskan pada : 1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan yankes yang tersedia terutama Gakin, berperilaku PHBS dan sadar gizi serta *universal access & coverage* untuk pelayanan KIA termasuk KB; 2) Percepatan peningkatan AHH dengan intervensi pada prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi, dan balita yang terintegrasi dalam penanganan kemiskinan; 3) Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan (RS) serta tenaga kesehatan antar wilayah; 4) Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawal pertumbuhan penduduk yang tinggi karena kontribusi migrasi . Selain itu perlu dicermati akurasi data dan *under reported* untuk perhitungan AKI, AKB, dan Gizi Kurang yang lebih representatif. Kabupaten Kutai Timur,

Prioritas 4: Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman

Investasi infrastruktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan tujuan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Masalah kesehatan dan lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk percepatan penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskan melalui: 1) Penyediaan akses air bersih dan listrik; serta 2) Penyediaan prasarana sanitasi, terutama penanganan sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman. Selain itu diperlukannya inventarisasi kawasan pemukiman tertata.

Prioritas 5: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Pangan memegang peranan penting bagi kebutuhan suatu bangsa, tanpa pangan negara dapat mengalami kekacauan sosial dan politik. Selain kelembagaan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan juga tidak lepas dari keberhasilan produksi pertanian. Permasalahan ketahanan pangan akan berjalan seiring dengan adanya permasalahan pertanian dan pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan sektor pertanian (BKP-Deptan, 2005)..



Ketahanan pangan di Kutai Timur terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi (ketersecaian), melainkan juga pada subsistem distribusi dan subsistem konsumsi.

Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pangan daerah baik ketersediaan maupun kemudahan akses sehingga terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi keunggulan kompetitif daerah yang berbasis agribisnis.

Agenda peningkatan ketahanan pangan, lebih diarahkan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan orientasi sektor agribisnis dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian dan pendapatan perkapita petani (Nilai Tukar Petani) melalui: 1) Peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian dengan Peningkatan ketrampilan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya; 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) Mengantisipasi adanya penyusutan lahan tanaman pangan; 4) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi serta 5) Regulasi pangan, 6) Pengembangan kawasan agropolitan Malay dan 7) Pengembangan kawasan pertanian (arti luas) dengan *One Village One Product* (DVOP) untuk mendorong percepatan *food estate*. Selain itu perlu; 7) Inventarisasi data lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi, 8) Diupayakan terjadi pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara. Kondisi ini diarahkan agar ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pembangunan yang bertumpu pada agribisnis, secara bertahap akan mampu dicapai.

Prioritas 6: Peningkatan pembangunan pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Padahal seharusnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan terjadi mekanisme pertukaran sumberdaya yang saling menguntungkan sehingga hubungan yang saling memperkuat ini akan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang (Rustiadi dan Dardak, 2005).



Penduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar (klastering). Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti karakteristik usahatani atau infrastruktur (jalan dan komunikasi). Sering dengan berlalunya waktu, penduduk yang bermukim berpencar bertambah, sedangkan lahan usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investasi termasuk investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi, pendidikan maupun kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ternyata berkontribusi besar bagi pemiskinan di pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran akhir setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu kawasan pedesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industry hasil pertanian.

Agenda peningkatan pembangunan wilayah pedesaan, dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala utama yaitu: masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitas atau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan kesimbangan pembangunan (SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah dasa dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan yang lebih difokuskan pada upaya-upaya mengurangi kesenjangan akses pembangunan dengan mengatasi kendala kualitas SDM dan infrastruktur pedesaan, yaitu 1) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan, 2) Peningkatan jangkauan telekomunikasi serta 3) Kemudahan modal usaha kecil (UMKM, koperasi pasar) terutama daerah-daerah tertinggal (Busang, Muara Ancalong, Muara Wahau dan Teluk Pandan).

Prioritas 7: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar memberikan pengaruh berganda dalam pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan



dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis agribisnis, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja.

Struktur ekonomi Kutai Timur yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumber daya alam; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Timur.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur 2007 hingga 2010 memberikan modal yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi (tanpa migas dan batubara) yang cukup baik pada kisaran 5,16 persen, sampai 6,11 persen. Sektor yang kontribusinya cukup besar, setelah sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor pertanian, meskipun sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian yang sistemnya masih tradisional. Hal ini merupakan modal positif untuk pembangunan di masa mendatang, karena dengan indikator kenaikan di setiap sektor dari PDRB tersebut berarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia sudah mulai bisa dimanfaatkan.

Pada tahun 2014, pembangunan ekonomi masih terpusat pada sektor agribisnis (pertanian). Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yang berpotensi dijadikan sebagai sektor unggulan dibandingkan sektor yang lain di luar sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur bertumpu dan diarahkan pada sektor pertanian dan bertujuan untuk menjadi daerah agribisnis. Hasil-hasil pertanian diupayakan dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, *agrotechno park* (pertanian integratif) dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri. Sebab, masalah pertanian tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pasca panen. Untuk



mengoptimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan pengembangan kawasan Agropolitan Mallo.

Sektor Pertanian tanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan hortikultura, padi, jagung, dan kedelai sebagai komoditas unggulan. Sektor perkebunan juga dikembangkan komoditas unggulan yakni kelapa sawit, karet, dan kakao. Sektor peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor kelautan dan perikanan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap. Sedangkan dalam pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) tersebut, perlu didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus diarahkan untuk dapat tetap memberi dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, peternak, agribisnis/ahwan kecil, koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Untuk mewujudkan sektor agribisnis yang tangguh, maju dan efisien sehingga menjadi *leading sector* dalam pembangunan Kutai Timur, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang maju dan efisien. Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian (*on farm agribusiness*) dan kegiatan lainnya dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu agenda, perlu lebih difokuskan pada: 1) pengembangan agroindustri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, 2) memperkuat pertumbuhan koperasi dan lembaga keuangan (BPR dan LKM) serta 3) kemudahan berinvestasi.

Prioritas 8. Peningkatan kapasitas pemerintahan [*capacity building*]

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, dimana fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai berbagai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi SPM dan kualitas yang diharapkan, dimana salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Demikian juga opini BPK terhadap kinerja keuangan daerah yang masih diperlukan pembenahan. Oleh karena itu Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penata kelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, *the right man on the right place*, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.



Agenda peningkatan kapasitas pemerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip *good government* dan pelaksanaan *e-government*. Dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan, kegiatan perlu lebih difokuskan pada: peningkatan kapasitas pemerintahan, berupa upaya-upaya: 1) menegakan perda; 2) meningkatkan kualitas layanan prima; 3) mengoptimalkan layanan pengadaan sistem elektronik, 4) mendorong SKPD melaksanakan SPM, 5) perbaikan penyusunan laporan keuangan, dan 6) optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu. Selain itu, perlu dilakukan pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasi data Perda.

Selain tersebut di atas diperlukan pengembangan/pengkaderan sumberdaya manusia dalam organisasi (SKPD) khususnya tenaga perencana, sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan, kapasitas, dan perkembangan SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan indikator kinerja baik di tingkat Rencana Strategis maupun Rencana Kerja SKPD..

Prioritas 9: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Suatu wilayah akan berkembang dengan berhubungan dengan wilayah lain. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin dan penduduk pedalaman (daerah tertinggal) tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur wilayah.

Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan yang lebih diarahkan pada percepatan pembukaan isolasi wilayah dan sarana kewilayahan melalui : 1) Pemerataan akses transportasi terutama di perdesaan; 2) Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan jalan-jalan dalam rangka membuka akses social dan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan sentra perekonomian di beberapa wilayah penyangga ibukota kabupaten



Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga perlu diperhatikan. Jalan penghubung untuk mempercepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota dan kabupaten, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan terminal serta angkutan pedesaan juga diutamakan agar mempermudah akses masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.

Prioritas 10: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup

Kabupaten Kutai Timur dalam bidang lingkungan hidup memiliki dua wajah yang berbeda. Di satu sisi kabupaten ini dikenal dengan sumberdaya alamnya, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak, yang sangat melimpah. Sumberdaya tersebut berada di daratan maupun di perairan (laut, sungai dan danau). Akan tetapi di sisi lainnya sumberdaya yang kaya tersebut pada umumnya merupakan ekosistem yang relatif rentan (*fragile*) dengan daya pertahanan (*resistance*) dan kemampuan lenting (*resilience*) yang rendah terhadap segala bentuk pemanfaatan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya (*carrying capacity*). Terlebih secara klimatis dan fisiografis, juga ada faktor pendorong lainnya yaitu curah hujan di Kabupaten Kutai Timur yang relatif tinggi, serta di beberapa tempat topografi bergelombang hingga curam.

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.

Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk 1) menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah; 2) pengaturan zona rencana pola ruang; 3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten serta; 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.



Sedangkan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk: (1) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (2) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (3) mendorong pengembangan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan; (4) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (5) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (6) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (7) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (8) mengembangkan hutan kota serta (9) kawasan ruang terbuka hijau.

Fokus kebijakan yang dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih, reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Dalam hal penataan ruang disamping percepatan penyelesaian revisi perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), perlu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional.

Prioritas 11 : Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah. Namun disisi lain minimnya jumlah perpustakaan yang dimiliki Pemda menjadi penghambat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan tuntutan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi. Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu, instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar.



Namun demikian berbagai hambatan dan kendala masih ditemukan, diantaranya TIK masih dipandang sebagai *cost center* dan bukan sebagai *long term investment* sehingga belum dapat dilihat kemanafaatannya secara jelas. Selain itu, faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah daerah juga masih terbatas. Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan fokus kegiatan melalui: 1) Penumbuhan budaya baca dan kesadaran masyarakat tentang iptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaan yang merata, 2) Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media) ke masyarakat terutama daerah pedesaan dan tertinggal, dan 3) Penyempurnaan sistem pelayanan publik.

Prioritas 12. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)

Penguasaan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap teknologi yang masih rendah dan keterbatasan infrastruktur adalah dua faktor utama yang menyebabkan keteringgalan kawasan tersebut dari kawasan lainnya. Padahal kawasan perbatasan menjadi beranda depan daerah. Namun disisi lain *Hinterland* adalah daerah pedalaman yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan daerah *hinterland* cukup penting dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat lokal. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang sebagian wilayah masih merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah pembukaan isolasi wilayah dan pembangunan sarana kewilayahan.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*), kebijakan diarahkan pada pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas pada informasi dalam hubungan pengembangan kawasan agropolitan, difokuskan untuk mendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan dan pedalaman) dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan mengurangi kesenjangan dan keterbatasan infrastruktur sosial ekonomi melalui: 1) Peningkatan akses-akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya (air bersih dan jalan), dan 2) Penguatannya *Integrated Rural Development (IRD)* yang bertumpu pada aktivitas utama sector pertanian.

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 4. 1
Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
1	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Sosial			
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial	45,25 persen	Dinsos
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	76,83 persen	Dinsos
		Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terbina	Meningkat	Dinsos
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mandiri	Meningkat	Dinsos
		Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan jaminan kesejahteraan sosial	Meningkat	Dinsos
		Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kecepatan Tanggap darurat :a. Bantuan Sosial korban bencana b. Sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkat	Dinsos
		Ketenagakerjaan			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat	Disnakertrans
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Kesempatan kerja	Meningkat	Disnakertrans
			Tingkat pengangguran terbuka	4 persen	
			Angka Pengangguran	4,28	
			Rasio penduduk yang bekerja	81,07	
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio serikat buruh/perusahaan		Disnakertrans
		Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja	Perjanjian kerja dari perusahaan		Disnakertrans



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)	Jumlah peserta BLK Mandiri	Meningkat	Disnakertrans
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLKI Mandiri)	Rasio ketergantungan	33,45	Disnakertrans
		Pemberdayaan Masyarakat			
		Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan	Rasio penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk	Menurun	Bapemas
			Jumlah keluarga miskin yang berusaha di agribisnis	Meningkat	
		Ketransmigrasian			
		Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi	Penempatan transmigrasi		Disnakertrans
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan Bagi Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS binaan	Meningkat	BPPKB
		Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkat	BPPKB
		Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkat	BPPKB
		Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) / Penyediaan dukungan operasional IMP	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)	Meningkat	BPPKB
		Ketahanan Pangan			
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		BKPP
			Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	10 - 19 Juta	
2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Pendidikan			
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD per kecamatan	Meningkat	Disdik
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga pendidikan non formal	Meningkat	Disdik
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang lulus uji kompetensi	Meningkat	Disdik
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	akreditasi sekolah	Meningkat	Disdik



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET	SKPD PELAKSANA
		Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah [APS] 7 - 12	Minimal 99 persen	Disdik
			Angka Partisipasi Kasar [APK] SMA/SMK/MA/Paket C	74,63 persen	
			Angka Partisipasi Murni [APM] SD/MI/Paket A	minimal 97,30 persen	
			Angka Partisipasi Murni [APM] SMP/MTs/Paket B	Minimal 76 persen	
			Angka Partisipasi Murni [APM] SMA/SMK/MA/Paket	65 persen	
			Angka Partisipasi Sekolah [APS] 16 - 19	Minimal 78,56 persen	
			Angka melek huruf	97,90 persen	
			Angka rata-rata lama sekolah	8,82	
			Angka Partisipasi Kasar [APK] SD/MI/Paket A	minimal 98 persen	
			Angka Partisipasi Kasar [APK] SMP/MTs/Paket B	minimal 97 persen	
		Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Jumlah peserta didik inklusi		Disdik
		Perpustakaan			
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan	Kantor arsip
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat	
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat	
			Jumlah perpustakaan keliling	Meningkat	
3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan			
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkat	Dinkes
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	Minimal 0,45	Dinkes
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	kasus keracunan	Menurun	Dinkes
			kasus kadaluarsa obat dan makanan	Menurun	
			obat dan makanan tidak layak edar	Menurun	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	PHBS Masyarakat		Dinkes, RSUD
			Angka usia harapan hidup	71,66	
			Rasio penyandu per satuan balita	11,87	



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014.

Dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan tema *"Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Melalui Gerakan Taman Makmur"* (Gerakan Pembangunan, Pemerataan dan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur), dengan menetapkan 12 (dua belas) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6. Peningkatan pembangunan pedesaan
7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)
9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
10. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
11. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)



Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a). 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) Penataan Ruang.
- 6) Perencanaan Pembangunan.
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal Daerah;
- 17) Kebudayaan
- 18) Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Pemerintahan Umum, otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21) Ketahanan Pangan
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika
- 26) Perpustakaan



b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Ketransmigrasian

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk perubahan program, kegiatan serta pagu indikatif yang diuraikan sebagai sebagai berikut (terlampir):



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 dilakukan dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan proyeksi yang telah ditetapkan terutama adanya perkembangan perubahan ekonomi makro sehingga diperlukan adanya penyesuaian. Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014, yang tetap memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2014. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2014, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 12 (dua belas) prioritas pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergisitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yakni bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2014 beserta perubahannya.

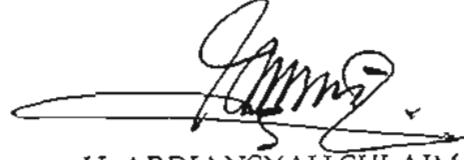
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan program dan kegiatan beserta perubahannya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahun 2014;
2. Dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka Perubahan RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk



melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2014.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN